



Katalog BPS :

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BAWANG MERAH INDONESIA 2015



BADAN PUSAT STATISTIK
Statistics Indonesia

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BAWANG MERAH INDONESIA 2015

<http://www.bps.go.id>

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BAWANG MERAH INDONESIA 2015

ISBN : 978-979-064-890-6

Nomor Publikasi : 06130.1503

Katalog BPS : 8201018

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xvi + 105 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPS menyajikan publikasi hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 34 Provinsi Tahun 2015. Pemilihan komoditas yang diteliti didasarkan pada kontribusinya dalam pembentukan total output yang bersumber dari tabel *Input-Output* (I-O) 2005 dan juga kontribusinya pada fluktuasi inflasi nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2015 ditetapkan lima komoditas yang diteliti yaitu beras, jagung, bawang merah, cabai merah, dan daging ayam ras.

Publikasi ini memuat kajian ringkas rantai distribusi komoditas bawang merah mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran hingga ke tangan konsumen. Informasi yang disajikan antara lain sebaran sentra produksi, pola distribusi perdagangan dan margin perdagangan dan pengangkutan komoditas bawang merah.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, November 2015
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tk
Badan Pusat Statistik



Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo M.Sc.
NIP. 19570411 198003 1 001

<http://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Saat ini, diduga Indonesia sedang mengalami masalah pada distribusi bawang merah. Dugaan ini didasarkan dari adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah plot tanam yang hanya fokus pada beberapa daerah dan belum dikembangkannya daerah produksi baru. Kondisi tersebut tentu secara alamiah akan berdampak pada meningkatnya biaya distribusi atau transportasi, sehingga margin distribusi pun turut meningkat. Peningkatan margin distribusi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi komoditas semakin tidak efisien. Disatu sisi, tata niaga yang belum terorganisir dengan optimal juga menjadi pemicu melambungnya harga bawang merah di level konsumen dibandingkan harga yang diperoleh dari petani. Publikasi ini menganalisa pola distribusi perdagangan dalam negeri komoditas bawang merah di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 152 kabupaten/kota. Hasil survei menunjukkan bahwa pedagang pengepul merupakan fungsi usaha yang memiliki akses paling tinggi terhadap penjualan dari produsen (hampir 90 persen). Hal ini membuat peran pengepul semakin nyata terhadap penentuan harga komoditas bawang merah. Selain itu, ketersediaan pasokan bawang merah masih terpusat di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa.

Kata Kunci: *Distribusi, Pola, Peta, Bawang Merah, Margin.*

ABSTRACT

Currently, Indonesia allegedly was having problems on the distribution of onions. This assumption is based on the disparity of a fairly high price disparity between the prices at the producer level with the consumer prices, especially in big cities. One contributing factor is the plot planting only focus on a few areas and have not developed a new production area. That condition would naturally have an impact on the rising costs of distribution or transportation, so that the distribution margin also increasing. An increasing of the distribution margin indicates that the distribution of commodities increasingly inefficient. On the other side, the marketing which has not been optimally organized also become a trigger soaring of onion prices at the consumer level than the price obtained from the farmers. This publication analyzes the distribution model of domestic trade commodity onion in 34 provinces in Indonesia covering 152 regency/cities. The survey data showed the assembler is a function of the business that has the highest access to sales from producers (nearly 90 percent). This makes more evident the role of them to determine the commodity price of onion. Besides of that, the supply of onions is still concentrated in the provinces on the island of Java.

Keywords : *Distribution, Model, Maps, Onion, Margin.*

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan Survei.....	2
1.4 Cakupan Komoditas.....	2
1.5 Cakupan Wilayah.....	3
1.6 Metodologi.....	3
1.7 Konsep dan Definisi	4
BAB II ULASAN RINGKAS	7
2.1. Gambaran Umum	7
2.2. Provinsi Aceh.....	8
2.3. Provinsi Sumatera Utara.....	11
2.4. Provinsi Sumatera Barat.....	14
2.5. Provinsi Riau	17
2.6. Provinsi Jambi	19
2.7. Provinsi Sumatera Selatan.....	22
2.8. Provinsi Bengkulu	24
2.9. Provinsi Lampung	27
2.10. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	29
2.11. Provinsi Kepulauan Riau	31
2.12. Provinsi DKI Jakarta.....	33
2.13. Provinsi Jawa Barat.....	35
2.14. Provinsi Jawa Tengah	38
2.15. Provinsi DI Yogyakarta.....	42
2.16. Provinsi Jawa Timur.....	44
2.17. Provinsi Banten	48
2.18. Provinsi Bali.....	50
2.19. Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	52

2.20. Provinsi Nusa Tenggara Timur	55
2.21. Provinsi Kalimantan Barat.....	57
2.22. Provinsi Kalimantan Tengah	59
2.23. Provinsi Kalimantan Selatan	61
2.24. Provinsi Kalimantan Timur	63
2.25. Provinsi Kalimantan Utara	65
2.26. Provinsi Sulawesi Utara	67
2.27. Provinsi Sulawesi Tengah	69
2.28. Provinsi Sulawesi Selatan	72
2.29. Provinsi Sulawesi Tenggara	75
2.30. Provinsi Gorontalo	77
2.31. Provinsi Sulawesi Barat	79
2.32. Provinsi Maluku	81
2.33. Provinsi Maluku Utara	82
2.34. Provinsi Papua Barat.....	84
2.35. Provinsi Papua.....	86
2.36. Indonesia.....	88
BAB III KESIMPULAN	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Bawang Merah	3
Tabel 2.	Provinsi Sentra Produksi Bawang Merah di Indonesia Tahun 2014	8
Tabel 3.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Aceh	11
Tabel 4.	Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara	14
Tabel 5.	Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat	17
Tabel 6.	Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Riau.....	19
Tabel 7.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Jambi.....	22
Tabel 8.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sumatera Selatan	24
Tabel 9.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Bengkulu.....	26
Tabel 10.	Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Lampung	28
Tabel 11.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30
Tabel 12.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Riau.....	32
Tabel 13.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi DKI Jakarta	35
Tabel 14.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat	38
Tabel 15.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah	41
Tabel 16.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi D.I. Yogyakarta	44
Tabel 17.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur	47
Tabel 18.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Banten	49
Tabel 19.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Bali	52
Tabel 20.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	54

Tabel 21.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	57
Tabel 22.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Barat	59
Tabel 23.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Tengah	61
Tabel 24.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Selatan	62
Tabel 25.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Timur	64
Tabel 26.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Utara	66
Tabel 27.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara.....	69
Tabel 28.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah.....	72
Tabel 29.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Selatan	75
Tabel 30.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	77
Tabel 31.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Gorontalo	78
Tabel 32.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat.....	80
Tabel 33.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Maluku	82
Tabel 34.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Maluku Utara	84
Tabel 35.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Papua Barat.....	85
Tabel 36.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Papua	88
Tabel 37.	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Indonesia.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan Produksi Bawang Merah (ribu ton) Indonesia dan Kontribusi Impor Tahun 2009 – 2014	7
Gambar 2.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Aceh	9
Gambar 3.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Aceh	9
Gambar 4.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Aceh	10
Gambar 5.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Aceh	10
Gambar 6.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara	11
Gambar 7.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara	12
Gambar 8.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara	13
Gambar 9.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara	13
Gambar 10.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat	15
Gambar 11.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat	15
Gambar 12.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat.....	16
Gambar 13.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat.....	16
Gambar 14.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Riau.....	18
Gambar 15.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Riau	18
Gambar 16.	Peta Distribusi Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jambi.....	20
Gambar 17.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jambi.....	20
Gambar 18.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jambi.....	21
Gambar 19.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jambi.....	21
Gambar 20.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Selatan	23
Gambar 21.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Selatan.....	23
Gambar 22.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bengkulu.....	25
Gambar 23.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bengkulu	26
Gambar 24.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Lampung	27
Gambar 25.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Lampung	28
Gambar 26.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bangka Belitung	29
Gambar 27.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bangka Belitung	30
Gambar 28.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Riau	31
Gambar 29.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Riau	32
Gambar 30.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DKI Jakarta	33
Gambar 31.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DKI Jakarta	34
Gambar 32.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat	36

Gambar 33.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat	36
Gambar 34.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat	37
Gambar 35.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat	37
Gambar 36.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah	39
Gambar 37.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah	39
Gambar 38.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah	40
Gambar 39.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah	41
Gambar 40.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta	42
Gambar 41.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta	42
Gambar 42.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta	43
Gambar 43.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta	43
Gambar 44.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur	45
Gambar 45.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur	45
Gambar 46.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur	46
Gambar 47.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur.....	47
Gambar 48.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Banten.....	48
Gambar 49.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Banten	49
Gambar 50.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Bali.....	50
Gambar 51.	Peta Penjualan Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bali	50
Gambar 52.	Pola Distribusi Produksi Bawang Merah di Provinsi Bali	51
Gambar 53.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bali	51
Gambar 54.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	52
Gambar 55.	Peta Penjualan Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	53
Gambar 56.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	53
Gambar 57.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	54
Gambar 58.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	55
Gambar 59.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur	55
Gambar 60.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	56
Gambar 61.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	56
Gambar 62.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Barat.....	57
Gambar 63.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Barat	58
Gambar 64.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Tengah.....	59
Gambar 65.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Tengah	60
Gambar 66.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Selatan.....	61

Gambar 67.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Selatan	62
Gambar 68.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Timur	63
Gambar 69.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Timur.....	64
Gambar 70.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Utara.....	65
Gambar 71.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Utara	66
Gambar 72.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara	67
Gambar 73.	Peta Penjualan Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara.....	67
Gambar 74.	Pola Distribusi Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara.....	68
Gambar 75.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara.....	68
Gambar 76.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah	70
Gambar 77.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah	70
Gambar 78.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah.....	71
Gambar 79.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah.....	71
Gambar 80.	Peta Distribusi Penjualan Produksi Bawang Merah Provinsi Sulawesi Selatan.....	73
Gambar 81.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Selatan.....	73
Gambar 82.	Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Selatan.....	74
Gambar 83.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Selatan	74
Gambar 84.	Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tenggara	75
Gambar 85.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	76
Gambar 86.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Gorontalo.....	77
Gambar 87.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Gorontalo	78
Gambar 88.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat.....	79
Gambar 89.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat.....	80
Gambar 90.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Maluku.....	81
Gambar 91.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Maluku	82
Gambar 92.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Maluku Utara.....	83
Gambar 93.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Maluku Utara	83
Gambar 94.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Papua Barat	85
Gambar 95.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Papua Barat.....	85
Gambar 96.	Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Papua	86
Gambar 97.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Papua	87
Gambar 98.	Peta Sentra Produksi Bawang Merah Tahun 2014 di Indonesia	88
Gambar 99.	Pola Penjualan Produksi Bawang merah di Indonesia	89
Gambar 100.	Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Indonesia.....	90

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar VPDP15-PEDAGANG	97
Lampiran 2: Daftar VPDP15-PRODUSEN	101
Lampiran 3: Surat Tanda Terima Perusahaan	105

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani produksi dan konsumsi sehingga barang dapat tersalurkan dari produsen sampai ke tangan konsumen. Masing-masing sektor perekonomian tentu memiliki pola distribusi tersendiri yang mencirikan bagaimana jalur kegiatan di sektor-sektor tersebut berjalan. Untuk sektor perdagangan, distribusi di sektor penyumbang produk domestik bruto terbesar ketiga ini menunjukkan perjalanan suatu komoditas mulai dari produsen hingga konsumen dapat menikmati komoditas tersebut, termasuk peran dari mediator-mediator yang terlibat di dalamnya. Rantai distribusi ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat, karena dapat memberikan nilai tambah bagi setiap pelaku perdagangan. Jika rantai distribusi dapat terwujud secara efisien, maka pergerakan suatu komoditas dari produsen ke konsumen akan ditempuh dengan biaya yang paling murah. Hal ini dapat berdampak pada pembagian nilai tambah yang adil pada keseluruhan lembaga distribusi yang terlibat diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau oleh konsumen.

Permasalahan rantai distribusi tersebut harus diperhatikan khususnya pada komoditas kebutuhan pokok seperti komoditas bahan makanan. Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, komoditas ini termasuk komoditas nonsubstitusi yang hampir selalu dibutuhkan sebagai bumbu masakan oleh masyarakat Indonesia. Dari sisi ekonomi, bawang merah juga termasuk komoditas dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi yang tercermin dari kontribusinya dalam perkembangan inflasi Indonesia. Data BPS mencatat pada 2012 komoditas ini menyumbangkan nilai inflasi sekitar 0,10 dari 1,31 inflasi yang terjadi pada bahan makanan (sekitar 7,63 persen). Satu tahun berikutnya, nilai inflasi nasional bawang merah merangkak naik menjadi 0,38 dari 2,75 inflasi yang terjadi pada keseluruhan bahan makanan (13,82 persen). Di samping itu, kebutuhan akan salah satu sumber fosfor dan juga vitamin C ini idealnya juga akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Meskipun memiliki potensi produksi yang cukup memadai, saat ini diduga Indonesia sedang mengalami masalah pada distribusi bawang merah. Dugaan ini didasarkan dari adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah plot tanam yang hanya fokus pada beberapa daerah dan belum dikembangkannya daerah produksi baru. Kondisi tersebut tentu secara alamiah akan berdampak pada meningkatnya biaya distribusi atau transportasi, sehingga margin distribusi pun turut meningkat. Margin distribusi merupakan salah

satu indikator efisiensi pada sistem distribusi. Peningkatan margin distribusi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi komoditas semakin tidak efisien. Disatu sisi, tata niaga yang belum terorganisir dengan optimal juga menjadi pemicu melonjaknya harga bawang merah di level konsumen dibandingkan harga yang diperoleh dari petani.

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut terkait permasalahan tersebut, pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya adalah komoditas bawang merah. Kegiatan ini dilakukan kabupaten/kota terpilih di 34 provinsi di Indonesia. Hasil dari survei ini diharapkan bisa digunakan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditas-komoditas strategis dan sekaligus memperoleh gambaran pola distribusi perdagangan yang lebih baik sebagai upaya untuk menjawab permasalahan rantai distribusi di atas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2015 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan Survei

Survei Poldis Perdagangan 2015 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Menganalisis Pola Penjualan Produksi dan Pola Distribusi Perdagangan.
- b. Mengkaji Peta Wilayah Penjualan Produksi dan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.
- c. Memperoleh data margin perdagangan dan pengangkutan baik di tingkat pedagang besar maupun pedagang eceran.

1.4 Cakupan Komoditas

Penentuan komoditas dalam survei ini adalah komoditas strategis, yaitu komoditas-komoditas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditas yang dalam Survei Biaya Hidup tercatat paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia.
- b. Komoditas yang memiliki peran penting dalam pembentukan inflasi nasional.
- c. Komoditas yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi cukup besar.

1.5 Cakupan Wilayah

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas 2015 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH (68 kabupaten/kota), dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 152 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 118 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih.

1.6 Metodologi

a. Ruang Lingkup

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, maupun pedagang eceran.

b. Cakupan KBLI Komoditas Bawang Merah

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Bawang Merah

Komoditas	KBLI 2009	KBLI 2005	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Bawang merah	01134	01121	Pertanian Tanaman Hortikultura Sayuran Umbi
	46319	51220; 53220; 54220	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman
	47213	52213	Perdagangan Eceran Sayuran
	47111	52111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
	47112	52112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

c. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk meliputi kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen, kerangka sampel berasal dari SE06-UMB kategori-A (pertanian). Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang bawang merah berasal dari

berbagai macam sumber, yaitu dari:

1. SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Dari data tersebut bisa ditentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai distributor, subdistributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, dan pedagang eceran dengan pendekatan berdasarkan hasil dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan Rincian 8 (menurut penjualan barang).
2. Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
3. Direktori perusahaan ekspor dan impor.
4. Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
5. Sumber- sumber lain dari internet.

d. Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memerhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan empat komoditas terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditas. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

e. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan untuk mendapatkan data yang lengkap.

1.7 Konsep dan Definisi

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk, bertujuan untuk penyaluran barang serta mendapatkan nilai tambah (keuntungan).

Dua pelaku utama dalam kegiatan perdagangan adalah pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang besar lain yang bertindak sebagai agen, broker dan/atau kepada pemakai industri, lembaga swasta, dan pemakai komersial dimana volume yang dijual tidak sama dengan volume yang diperdagangkan pada konsumen akhir. Pada umumnya selain melakukan aktivitas pembelian dan penjualan, beberapa kategori pedagang

besar juga melakukan penentuan harga, penyimpanan, promosi, hingga pemasaran barang dalam partai besar. Pada Survei POLDIS 2015, ada beberapa kategori fungsi kelembagaan pedagang besar dan menengah yang termasuk dalam cakupan penelitian, antara lain:

1. **Distributor** adalah unit usaha yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung dan bertindak atas nama sendiri, sehingga risiko keberlangsungan kegiatan juga ditanggung sendiri. Distributor biasanya juga diberikan hak/wewenang khusus terhadap hasil produksi dari produsen. Sementara itu, **Sub Distributor** adalah unit usaha yang ditunjuk langsung oleh distributor untuk melakukan kegiatan distribusi hingga ke pengecer. Idealnya jangkauan kegiatan Sub Distributor lebih sempit dibandingkan Distributor.
2. **Agen** dapat didefinisikan sebagai pihak (perorangan/badan usaha) yang melakukan penjualan/pemasaran barang atas nama *prinsipal* (pihak yang memakai jasa agen, biasanya adalah distributor utama) ke wilayah dagang-wilayah dagang tertentu dari prinsipal. Agen cenderung bersifat independen, memiliki hak pengendalian barang yang sangat terbatas untuk komoditas yang diperdagangkan karena terikat pada kontrak/perjanjian dengan *prinsipal* yang diwakilinya. Pendapatan agen diperoleh dari komisi berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dijualnya.
3. **Pedagang Grosir** termasuk pedagang level menengah-besar yang bersifat *cash and carry*, dimana transaksi (partai besar) biasanya dilakukan langsung di lokasinya berada dan proses transaksi sebagian besar dilakukan tanpa penghantaran (barang diambil sendiri oleh pembeli). Secara garis besar, ada dua karakteristik penjualan dari pedagang grosir, yaitu yang menjual berbagai jenis komoditas (*general line wholesaler*) dan yang khusus menjual komoditas secara spesifik (*specity wholesaler*).
4. **Pedagang pengepul (*assembler*)** tergolong sebagai pedagang besar (bersifat perorangan atau lembaga) yang biasanya membeli komoditas dari produsen secara langsung untuk dijual kembali ke fungsi kelembagaan lainnya. Pedagang pengepul seringkali ditemui pada produk-produk hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan peternak yang membawa sendiri komoditas yang diperdagangkan ke beberapa pusat-pusat pasar.
5. **Importir** adalah unit usaha yang kegiatan utamanya menyalurkan barang (pembelian, penerimaan dan/atau pemasukan barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara penerima. Sedangkan **Eksportir** adalah unit usaha perusahaan yang memiliki fungsi dalam menyalurkan (penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain.

Pedagang Eceran (*retailer*) adalah pedagang yang kegiatannya berkaitan dengan penjualan barang dan jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk kepentingan konsumsi pribadi atau nonbisnis dalam volume eceran/satuan. Termasuk di dalamnya adalah **Supermarket**, yang tergolong sebagai *self service retailing*. *The Food Marketing Institute* mendefinisikan supermarket sebagai pengecer dengan diversifikasi produk yang lebih luas dan memposisikan pembelinya memilih produk (utamanya makanan) yang dibutuhkan secara mandiri dengan pelayanan yang terbatas (pelayanan diberikan hanya pada pembayaran dan pembungkusan).

Cakupan **konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, hotel, sekolah, dan rumah sakit. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, seperti industri mi instan, tepung beras, makanan ringan, industri pembuatan sosis atau *nudget* dan lainnya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, yayasan jompo, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Marjin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan. Sedangkan **Marjin Perdagangan (MP)** adalah nilai MPP yang telah dikurangi dengan biaya pengangkutan barang (marjin transportasi).

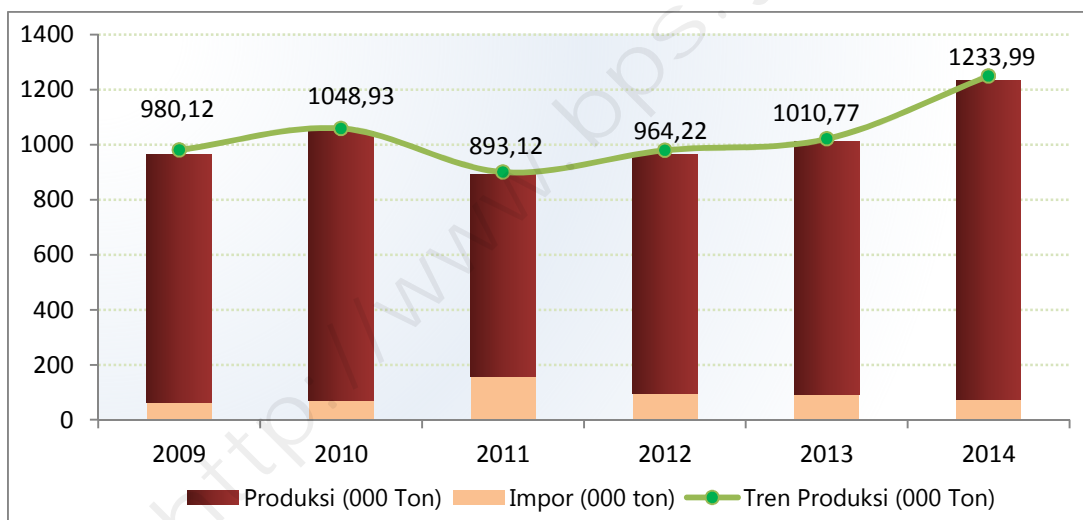
BAB II

ULASAN RINGKAS

2.1 Gambaran Umum

Bawang merah merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan masakan. Selain digunakan sebagai bumbu utama masakan, kandungan gizi yang ada di dalam bawang merah juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Di antaranya adalah untuk meningkatkan nafsu makan, mencegah penyempitan pembuluh darah, kaya akan antioksidan dan ekstraknya dipercaya berkhasiat menyembuhkan flu serta sesak nafas. Komoditas jenis sayuran ini termasuk jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, ditinjau dari sisi pemenuhan konsumsi nasional, sumber penghasilan petani, maupun potensinya sebagai penghasil devisa negara.

Gambar 1. Perkembangan Produksi Bawang Merah (ribu ton) Indonesia dan Kontribusi Impor Tahun 2009 – 2014



Sumber : BPS, diolah

Di Indonesia sendiri, secara umum kebutuhan akan bawang merah sudah cukup terpenuhi oleh produksi dari petani dalam negeri. Sempat mengalami krisis bawang merah di penghujung 2014 hingga mendekati pertengahan 2015 karena pengaruh cuaca (*el-nino*), kini Indonesia justru mulai melakukan ekspor bawang merah ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Ekspor tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga bawang merah yang sedang surplus produksi. Sementara itu, jika ditinjau dari aktivitas impor, terhitung dari tahun 2009 ada kecenderungan penurunan kontribusi volume impor bawang merah terhadap produksi bawang merah dalam negeri. Hal ini dapat dikatakan wajar mengingat hasil produksi dalam negeri yang terus mengalami peningkatan dan mampu mengkomodir kebutuhan dalam negeri. Tren tersebut tampak pada Gambar 1.

Lebih lanjut, sentra produksi bawang merah hingga saat ini masih terpusat di wilayah Pulau Jawa, dimana Jawa Tengah menjadi provinsi dengan hasil panen terbesar setiap tahunnya. Adapun provinsi sentra produksi bawang merah berdasarkan *output* yang dihasilkan petani yang terdapat di masing-masing provinsi menurut data BPS tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Provinsi Sentra Produksi Bawang Merah di Indonesia Tahun 2014

Provinsi	Produksi (ton)	Kontribusi terhadap Stok Nasional (%)
(1)	(2)	(3)
Jawa Tengah	519.356	42,09
Jawa Timur	293.179	23,76
Jawa Barat	130.083	10,54
Nusa Tenggara Barat	117.513	9,52
Sumatera Barat	61.336	4,97
Sulawesi Selatan	51.728	4,19

Sumber : BPS, diolah

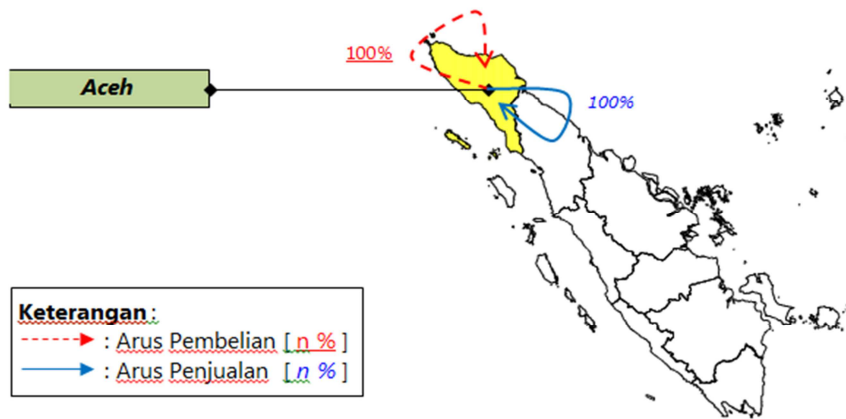
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Pulau Jawa masih menjadi kawasan paling potensial yang mampu menyumbangkan tiga perempat pasokan bawang merah Indonesia. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling produktif (produksi hampir 520 ribu ton di tahun 2014), dengan Kabupaten Brebes sebagai kontributor utama dan dikenal sebagai lumbung bawang merah berkualitas (mampu mensuplai sekitar 30 persen kebutuhan nasional). Lebih lanjut, diharapkan hasil Survei Pola Distribusi (POLDIS) perdagangan bawang merah ini mampu memperoleh potret persebaran bawang merah di Indonesia dan informasi terkait tingkat ketersediaan bawang merah di masing-masing wilayah, serta persebarannya. Berikut ini disajikan analisis distribusi perdagangan bawang merah hasil survei VPDP 2015 secara ringkas di setiap provinsi.

2.2 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie, dan Kota Banda Aceh.

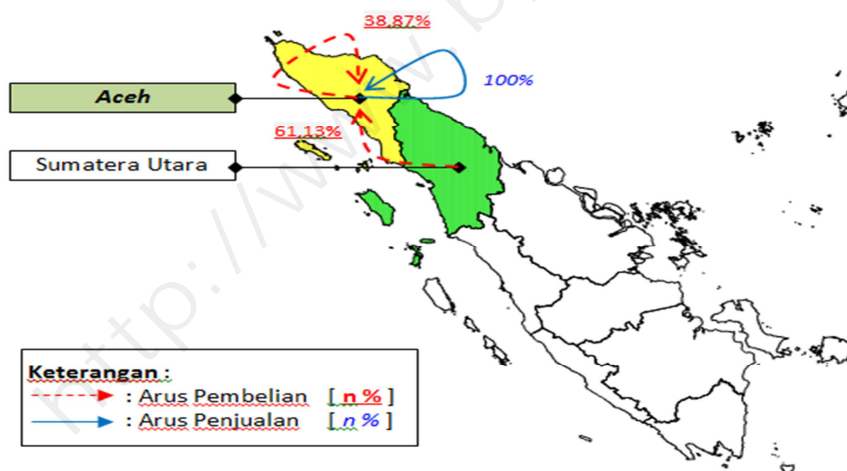
2.2.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Aceh memperoleh keseluruhan (100,00 persen) bahan baku atau bibit bawang merah dari dalam wilayah Aceh sendiri. Hasil panen bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya (100,00 persen) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di provinsi Aceh. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Aceh

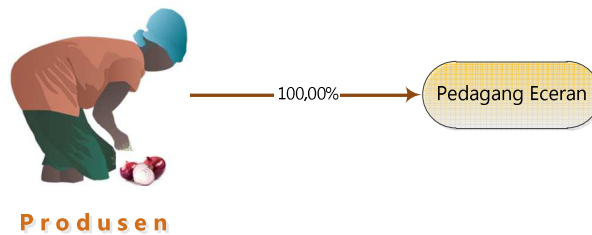
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa sebagian besar pasokan bawang merah diperoleh dari luar provinsi Aceh. Data survei menunjukkan bahwa 61,13 persen stok bawang merah di provinsi Aceh diperoleh dari Sumatera Utara sebagai provinsi terdekat dari Aceh, sementara sisanya (38,87 persen) dipasok dari internal wilayah Aceh. Bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi permintaan masyarakat di dalam Provinsi Aceh. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Aceh secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Aceh

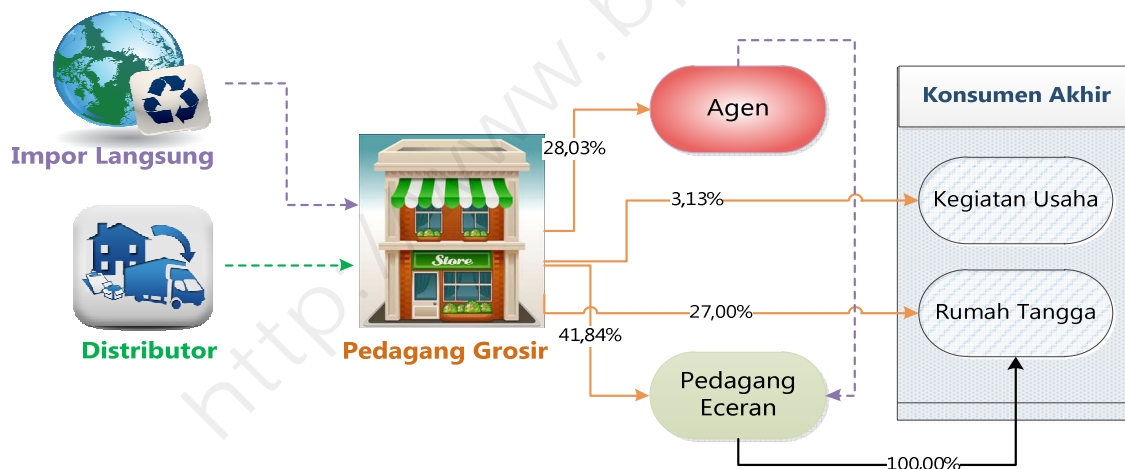
2.2.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Aceh seluruhnya dijual langsung oleh petani ke pedagang eceran, tanpa melalui fungsi kelembagaan lainnya. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Aceh

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Aceh melibatkan fungsi usaha seperti distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Jalur perdagangan berawal dari pedagang grosir (PG) yang mendapatkan pasokan bawang merah dari berbagai fungsi usaha di atasnya, diantaranya distributor. Data survei juga menangkap adanya aktivitas impor langsung dari luar negeri yang dilakukan oleh PG dalam menginventarisir stok bawang merahnya. Selanjutnya PG menjual sebagian besar stok bawang merahnya (41,84 persen) ke pedagang eceran (PE). Pada penghujung rantai perdagangan, PE meneruskan ujung jalur distribusi dengan memperdagangkan seluruh pasokan bawang merah ke rumah tangga. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Aceh secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Aceh

2.2.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan (MP) untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah di Aceh adalah sekitar Rp79,45 juta dengan rasio marjin sebesar 14,74 persen. Sementara itu, rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE sekitar Rp944 ribu dengan rasio marjin sebesar 33,79 persen. Secara umum, rata-rata MP

yang diperoleh pedagang adalah sekitar Rp70,72 juta dengan rasio margin sebesar 14,75 persen. Indikator ini dapat diartikan bahwa secara umum pedagang bawang merah di Aceh mengambil keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 14,75 persen.

Tabel 3. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Aceh

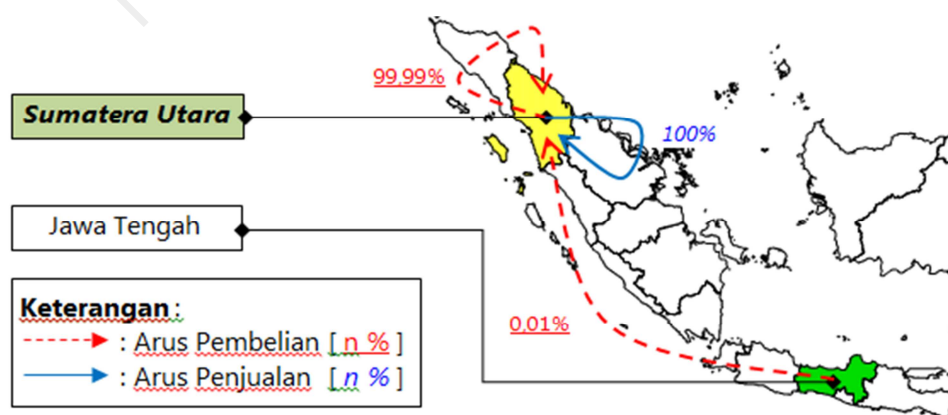
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	623.836,50	3.810,00	554.944,67
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	539.035,75	2.794,00	479.453,33
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	8.565,80	72,00	7.150,17
Rata-rata MPP (000 Rp)	84.800,75	1.016,00	75.491,33
Rasio MPP (%)	15,73	36,36	15,75
Rata-rata MP (000 Rp)	79.447,00	944,00	70.724,44
Rasio MP (%)	14,74	33,79	14,75

2.3 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Daili, Karo, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar dan Kota Medan.

2.3.1 Peta Distribusi Perdagangan

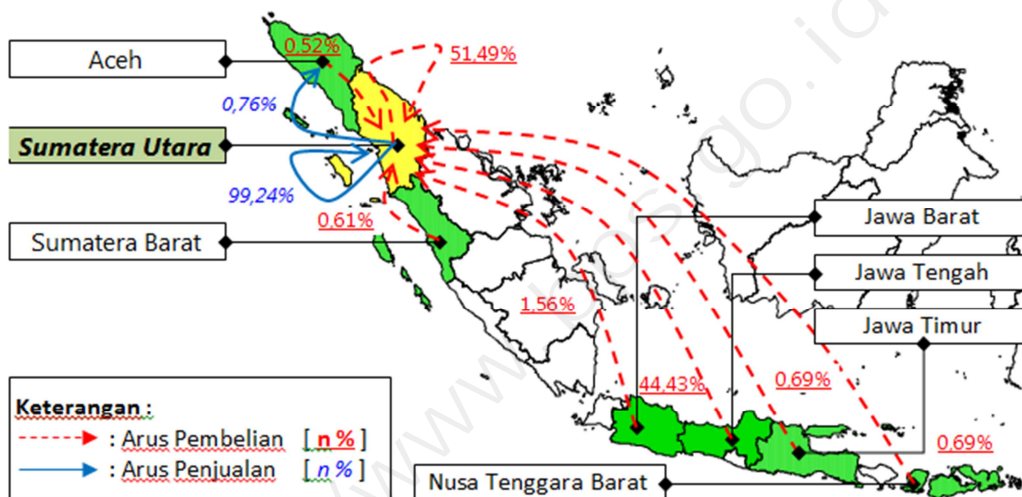
Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Sumatera Utara memperoleh hampir keseluruhan (99,99 persen) bibit bawang merah dari dalam wilayah Sumatera Utara sendiri, sedangkan sebagian kecil sisanya dibeli dari Jawa Tengah.



Gambar 6. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara

Hasil panen bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya (100,00 persen) untuk memenuhi kebutuhan lokal provinsi Sumatera Utara. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 6.

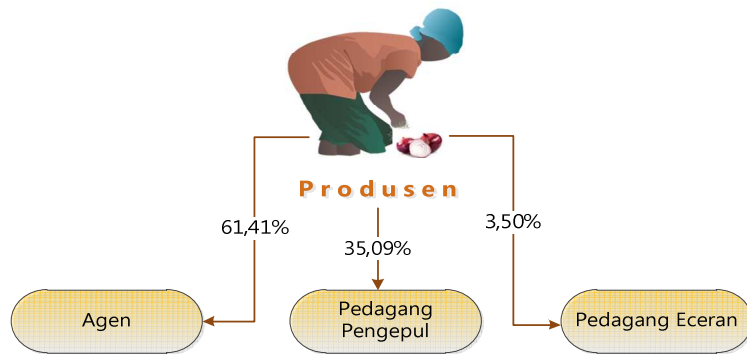
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa mayoritas pasokan (51,49 persen) bawang merah diperoleh dari dalam provinsi Sumatera Utara sendiri. Sementara itu, sebagian lainnya diperoleh dari Aceh, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi dari Pulau Jawa yang didominasi oleh pasokan dari Jawa Barat. Data survei menunjukkan bahwa Jawa Barat mampu mendistribusikan sekitar (44,43 persen) dari keseluruhan stok bawang merah yang diperdagangkan di provinsi Sumatera Utara. Bawang merah tersebut kemudian dijual hampir seluruhnya (99,24 persen) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam Provinsi Sumatera Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Sumatera Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 7. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara

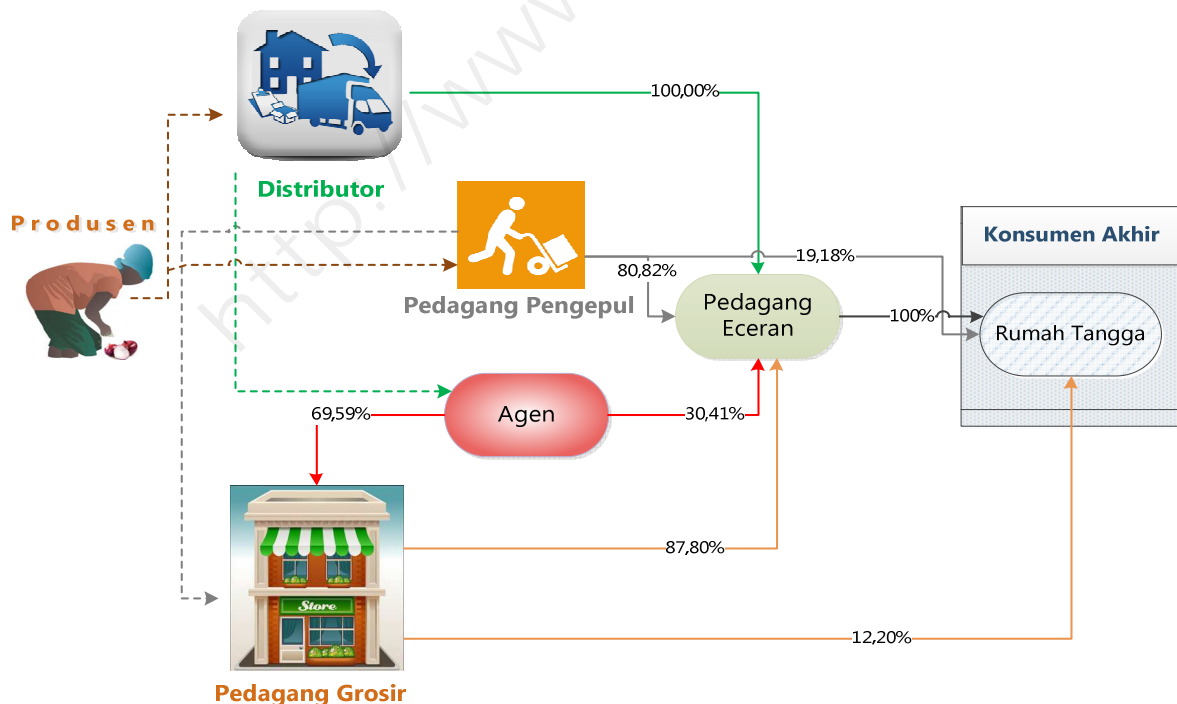
2.3.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Sumatera Utara sebagian besar dijual langsung oleh petani ke agen (61,41 persen). Sementara itu, sebagian lainnya dijual ke pedagang pengepul (35,09 persen) dan juga pedagang eceran (3,50 persen). Pola tersebut tersaji pada Gambar 8.



Gambar 8. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Sumatera Utara melibatkan fungsi usaha seperti distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan untuk level konsumen akhir, terdiri dari hanya rumah tangga saja. Jalur perdagangan berawal dari distributor, agen, dan juga pedagang grosir yang mendistribusikan pasokan bawang merah baik dari produsen langsung maupun fungsi kelembagaan di atasnya ke PE. Selanjutnya PE menjual seluruh stok bawang merahnya ke rumah tangga (RT). Selain dari PE, RT juga dapat membeli bawang merah secara langsung dari pedagang pengepul dan juga pedagang grosir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 9. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara

2.3.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp485,64 juta dengan rasio marjin sebesar 5,87 persen. Adapun rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp700ribu dengan rasio marjin marjin sebesar 16,20 persen. Jika digabung, rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp453,31 juta dengan rasio marjin sebesar 5,87 persen. Indikator ini dapat diartikan bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 5,87 persen.

Tabel 4. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah di Provinsi Sumatera Utara

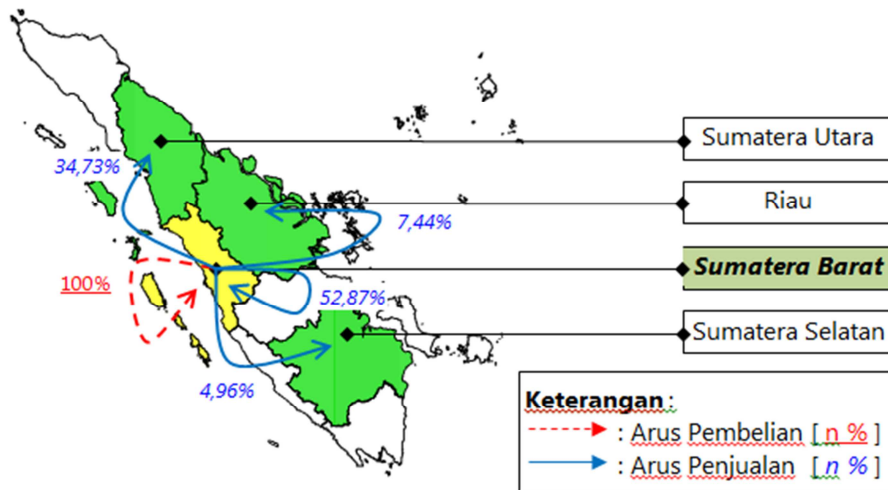
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	9.286.177,50	5.520,00	8.667.467,00
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	8.276.784,50	4.320,00	7.725.286,87
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	564.043,08	500,00	523.790,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.009.393,00	1.200,00	942.180,13
Rasio MPP (%)	12,20	27,78	12,20
Rata-rata MP (000 Rp)	485.638,71	700,00	453.309,47
Rasio MP (%)	5,87	16,20	5,87

2.4 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat dan Kota Padang.

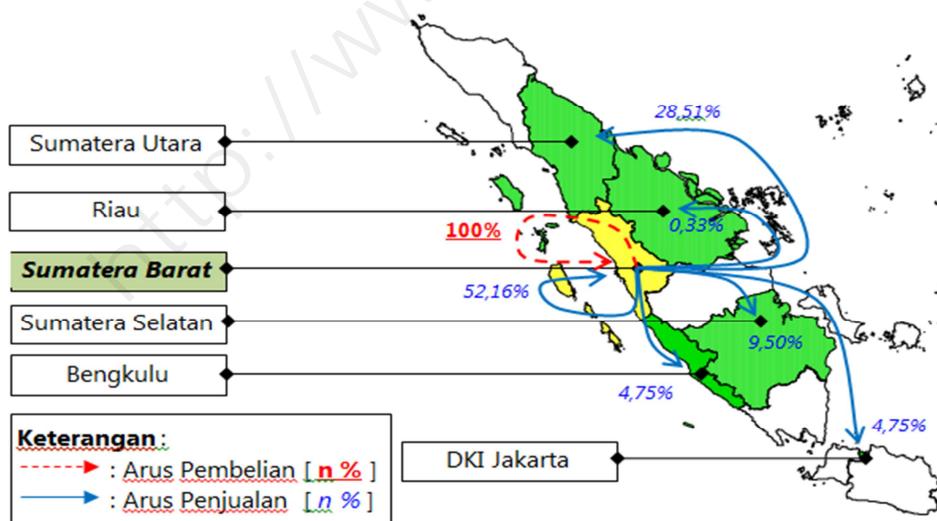
2.4.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Sumatera Barat memperoleh 100,00 persen bibit bawang merah dari dalam wilayah Sumatera Barat sendiri. Hasil panen bawang merah tersebut kemudian dijual separuh lebih (52,87 persen) ke dalam wilayah sendiri guna memenuhi kebutuhan lokal Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, bawang merah yang berhasil diproduksi juga didistribusikan ke beberapa provinsi terdekat seperti Sumatera Utara (34,73 persen), Riau (7,44 persen) dan Sumatera Selatan (4,96 persen). Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 10. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa pedagang lokal memilih untuk menyediakan pasokan bawang merah dari dalam wilayah Sumatera Barat sendiri. Setengah lebih dari pasokan tersebut kemudian diperdagangkan di dalam provinsi. Sementara itu, sebagian lainnya didistribusikan ke beberapa provinsi terdekat antara lain Sumatera Utara (28,51 persen), Sumatera Selatan (9,50 persen), Bengkulu (4,75 persen), dan juga Riau (0,33 persen). Lebih lanjut, distribusi penjualan bawang merah tersebut juga mampu menjangkau hingga ke luar pulau (DKI Jakarta) meskipun dalam jumlah yang sangat kecil yaitu sekitar 4,75 persen. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Sumatera Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

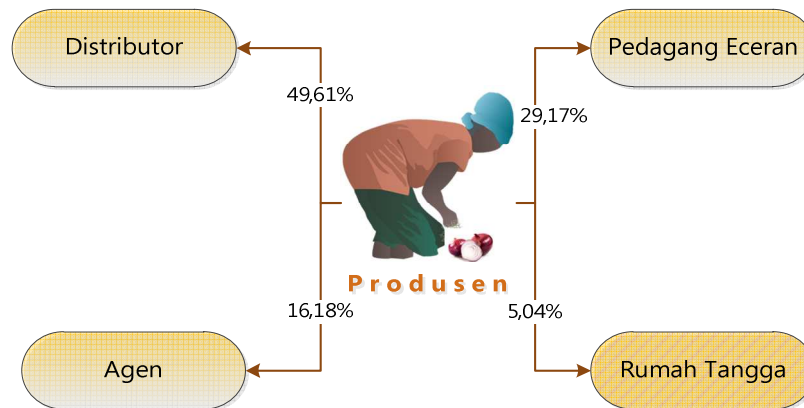


Gambar 11. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat

2.4.2 Pola Distribusi

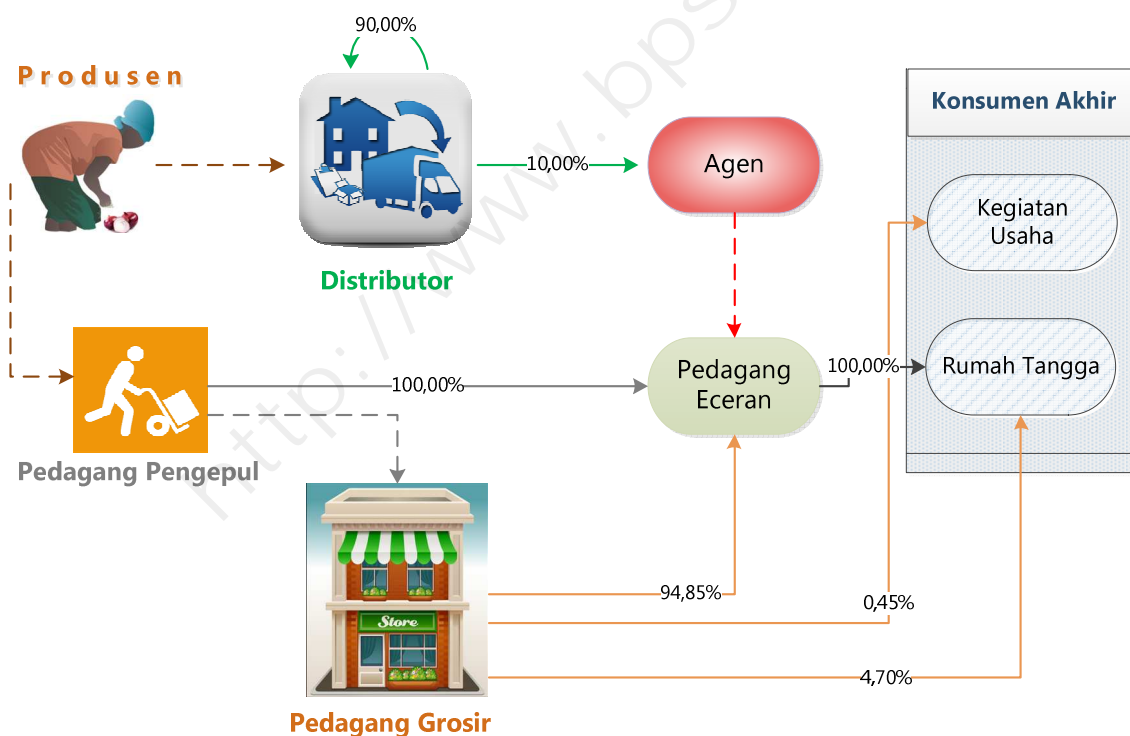
Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Sumatera Barat mayoritas dijual ke pihak distributor (49,61 persen), sedangkan sisanya dijual ke pedagang

eceran, agen, dan juga dari konsumen akhir (rumah tangga). Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 12. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Sumatera Barat melibatkan fungsi usaha seperti distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Barat

Pola distribusi berawal dari distributor yang memperoleh pasokan dari produsen dan pedagang pengepul, kemudian menjual (90,00 persen) pasokan tersebut ke sesama distributor yang ada diluar provinsi, sementara (10,00 persen) sisanya ke agen. Di level pedagang besar lainnya, pedagang grosir berperan cukup penting dalam rantai distribusi bawang merah di Provinsi Sumatera

Barat. Pedagang grosir yang mendapatkan pasokan secara langsung dari pedagang pengepul memasarkan hampir seluruh stok bawang merahnya ke PE. Selanjutnya PE menjual seluruh stok bawang merahnya ke rumah tangga (RT). Selain dari PE, RT juga membeli bawang merah secara langsung dari agen. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan pada Gambar 13.

2.4.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Dari data survei diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB adalah sekitar Rp229,16 juta dengan rasio marjin sebesar 12,59 persen. Sementara itu, rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE bawang merah adalah sekitar Rp29 juta dengan rasio marjin yang diambil sebesar 27,10 persen. Jika digabungkan rata-rata MPP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp169,12 juta dengan rasio marjin sebesar 12,94 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa secara umum pedagang bawang merah di Sumatera Barat mengambil keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 12,94 persen.

Tabel 5. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Sumatera Barat

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.084.200,00	136.040,00	1.499.752,00
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.820.678,57	107.036,00	1.306.585,80
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	34.357,14	-	34.357,14
Rata-rata MPP (000 Rp)	263.521,43	29.004,00	193.166,20
Rasio MPP (%)	14,47	27,10	14,78
Rata-rata MP (000 Rp)	229.164,29	29.004,00	169.116,20
Rasio MP (%)	12,59	27,10	12,94

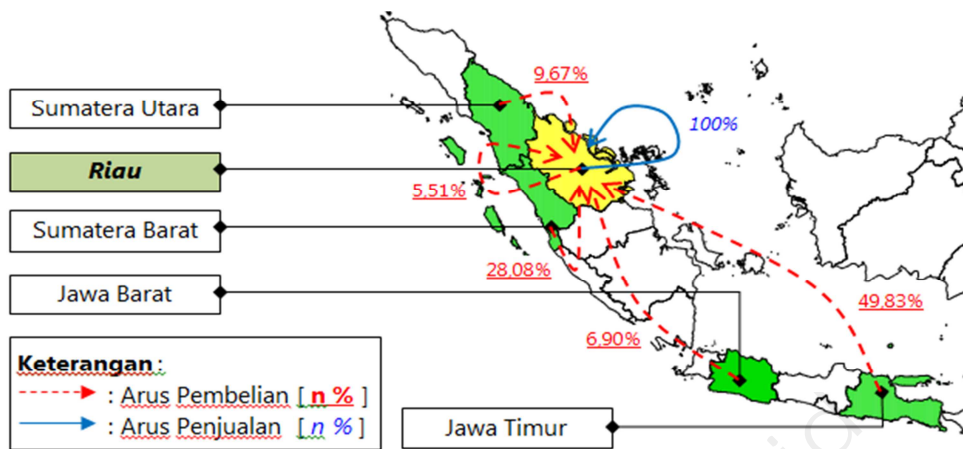
2.5 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, dan Kota Pekanbaru.

2.5.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, pengadaan bawang merah yang diperdagangkan di Provinsi Riau disuplai dari berbagai wilayah yang didominasi oleh provinsi Jawa Timur (49,83 persen). Provinsi lain yang turut menyumbang stok antara lain Sumatera Barat (28,08 persen), Sumatera Utara (9,67

persen) dan juga Jawa Barat (6,90 persen). Sebagian kecil sisanya dipasok dari dalam wilayah Riau sendiri. Dari sisi penjualan, seluruh stok bawang merah tersebut dijual hanya ke dalam wilayah Riau. Berikut peta distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Riau:



Gambar 14. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Riau

2.5.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Riau melibatkan beberapa fungsi usaha pedagang besar seperti distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, dan juga pedagang eceran.

Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Riau

Sub agen yang memperoleh pasokan dari agen menjual (60,00 persen) stok bawang merahnya ke pedagang eceran. Jalur tersebut beriringan dengan jalur penjualan PG yang memasarkan (82,08 persen) bawang merahnya ke PE. Stok yang didapatkan oleh PE kemudian didistribusikan sebesar 87,69 persen ke rumah tangga. Di titik ini, arus distribusi berujung pada rumah

tangga sebagai konsumen akhir yang mendapatkan kebutuhan bawang merahnya dari PE, dan juga langsung dari sub agen serta pedagang grosir.

2.5.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp1,01 milyar dengan rasio marjin sebesar 48,45 persen. Sementara itu, rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE bawang merah adalah sekitar Rp20,77 juta dengan rasio marjin yang diambil sebesar 13,02 persen. Jika digabung, rata-rata MPP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp617,21 juta dengan rasio marjin sebesar 46,74 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa secara umum pedagang bawang merah di Riau mengambil keuntungan penjualan yang cukup besar sebesar 46,74 persen.

Tabel 6. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Riau

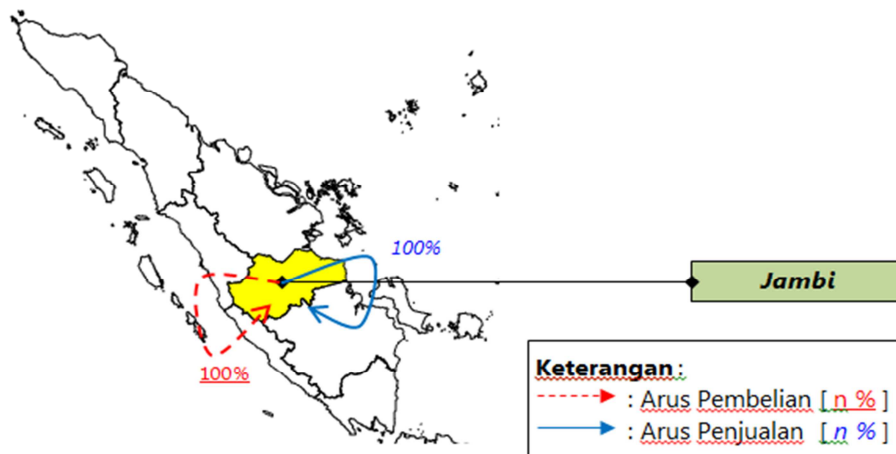
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.144.678,17	180.859,00	1.959.150,50
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.094.677,33	159.492,50	1.320.603,40
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	70.333,33	2.400,00	53.350,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.050.000,83	21.366,50	638.547,10
Rasio MPP (%)	50,13	13,40	48,35
Rata-rata MP (000 Rp)	1.014.834,17	20.766,50	617.207,10
Rasio MP (%)	48,45	13,02	46,74

2.6 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Kerinci, Muaro Jambi, dan Kota Jambi.

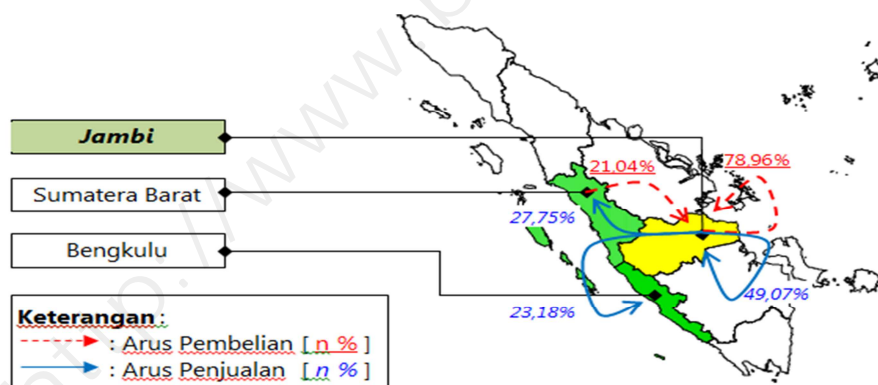
2.6.1 Peta Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan bahwa petani bawang merah memperoleh seluruh bibit tanaman bawang merah dari dalam wilayah Jambi. Kemudian, hasil produksi bawang merah seluruhnya dijual petani hanya di dalam wilayah lokal saja. Berikut peta distribusi penjualan produksi bawang merah di Provinsi Jambi:



Gambar 16. Peta Distribusi Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jambi

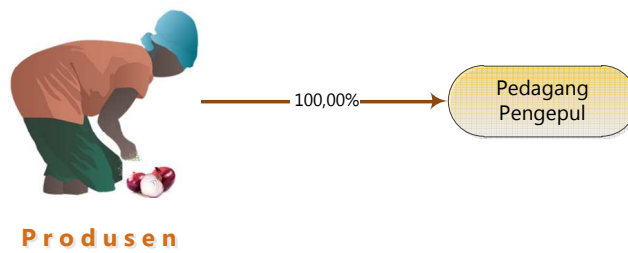
Ditinjau dari sisi perdagangan, diketahui bahwa pelaku perdagangan komoditas bawang merah di Jambi memasok hampir 80,00 persen bawang merah dari dalam wilayah Jambi sendiri, sementara sisanya didatangkan dari Sumatera Barat. Kemudian, pasokan bawang merah ini dijual separuhnya ke dalam wilayah Jambi, sementara separuh sisanya dijual ke Sumatera Barat dan juga Bengkulu. Berikut peta distribusi penjualan produksi bawang merah di Provinsi Jambi:



Gambar 17. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jambi

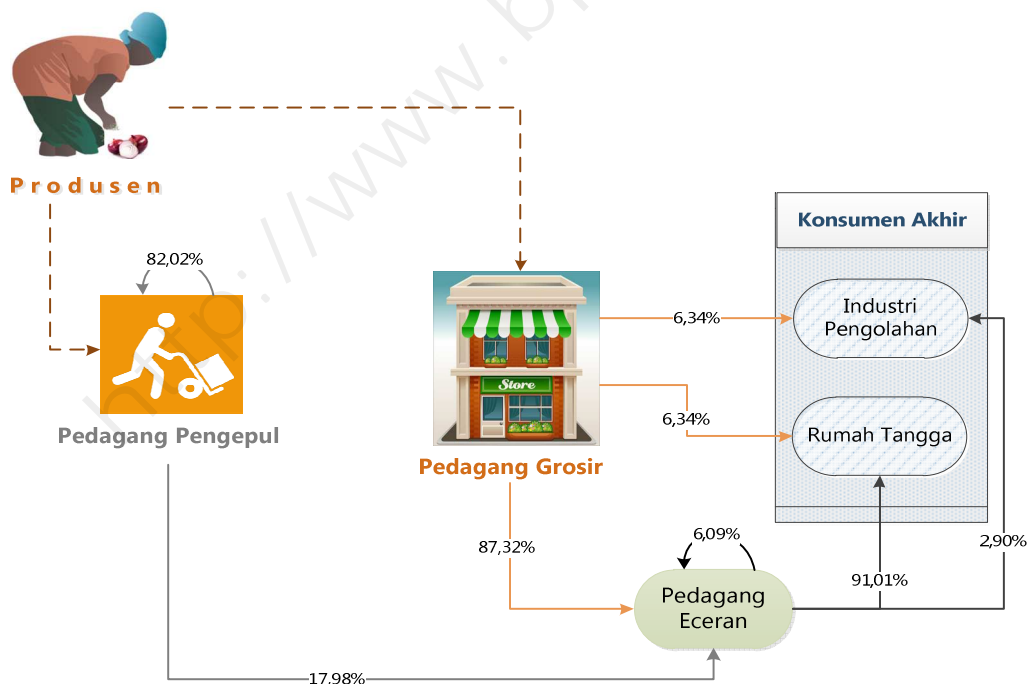
2.6.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Aceh seluruhnya dijual langsung oleh petani ke pedagang pengepul, tanpa dijual ke fungsi kelembagaan lainnya. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 18. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jambi

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Jambi tidak banyak melibatkan fungsi usaha pedagang besar. Pedagang grosir mendapatkan stok dari produsen, kemudian stok tersebut sebagian besar dijual ke pedagang eceran (87,32 persen). Selain itu, PG juga berperan dalam memberikan stok bawang merahnya ke industri pengolahan dan rumah tangga secara langsung meskipun dalam skala kecil. Di sisi lain, pedagang pengepul menjual pasokan yang diperoleh langsung dari produsen ke sesama pedagang pengepul sedangkan sebagian kecil sisanya disalurkan ke PE. Dari Pedagang eceran stok bawang merah di jual ke konsumen akhir seperti rumah tangga (91,01 persen) dan juga Industri pengolahan (2,90 persen). Detil dari pola penjualan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jambi

2.6.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 7, didapatkan keterangan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp44,18 juta. Adapun rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE bawang merah adalah sekitar Rp53,65 juta. Jika digabung, rata-rata MPP

untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp48,24 juta dengan rasio margin yang diambil sebesar 11,76 persen. Hal yang menarik disini adalah rata-rata MP pedagang eceran ternyata mampu melebihi rata-rata MP pedagang besar. Hal ini mungkin disebabkan salah satunya oleh biaya transportasi yang cukup besar yang harus ditanggung PB untuk mendatangkan pasokan bawang merah dari luar wilayah Jambi.

Tabel 7. Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Jambi

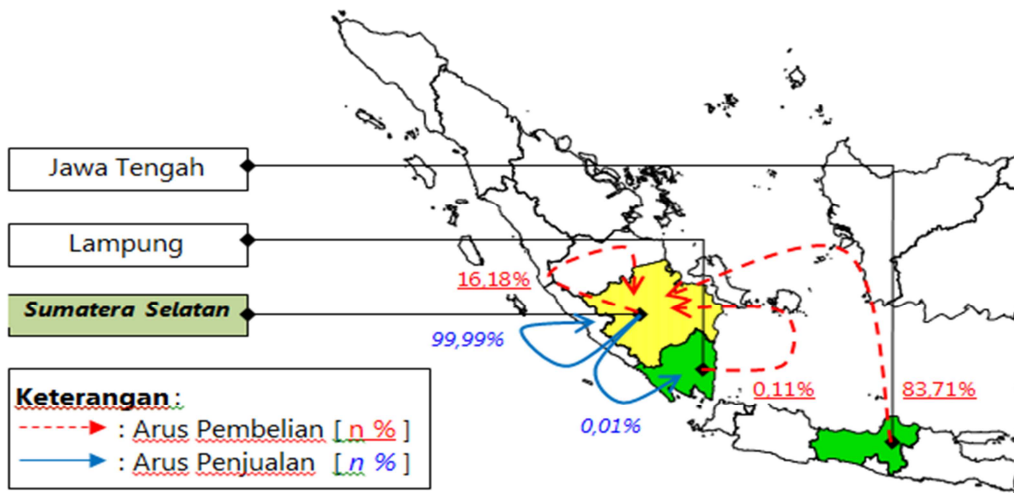
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	524.402,50	400.746,67	471.407,14
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	458.802,50	345.302,67	410.159,71
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	28.556,00	5.400,00	22.767,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	65.600,00	55.443,67	61.247,29
Rasio MPP (%)	14,30	16,06	14,93
Rata-rata MP (000 Rp)	44.183,00	53.643,67	48.237,57
Rasio MP (%)	9,63	15,54	11,76

2.7 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Banyuasin, Ogan Kemiring Ulu Timur, Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

2.7.1 Peta Distribusi Perdagangan

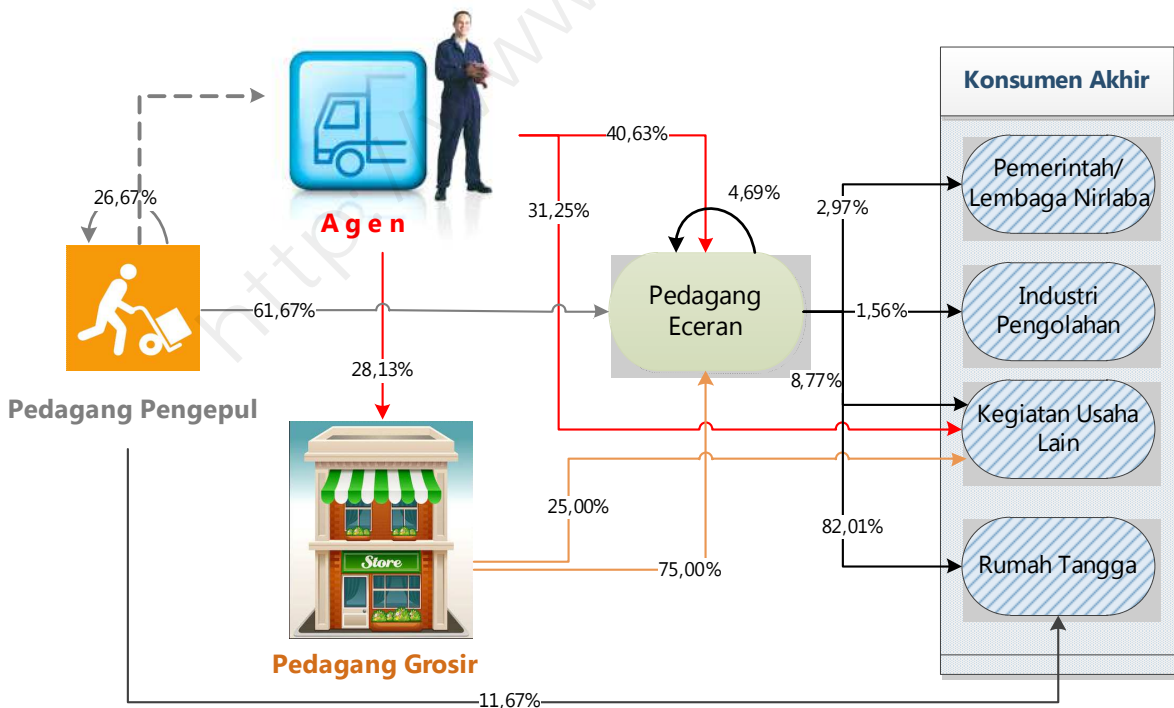
Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengadaan bawang merah yang diperdagangkan di Provinsi Sumatera Selatan dipasok dari luar provinsi, yaitu Jawa Tengah dengan persentase sebesar 83,71 persen. Sementara itu, pasokan dari internal wilayah Sumatera Selatan sendiri hanya menyumbang sekitar 16,18 persen saja. Dari sisi penjualan, hampir seluruh persediaan bawang merah tersebut dijual ke dalam wilayah Sumatera Selatan. Sedikit sisanya dipasarkan ke provinsi terdekat yakni Lampung (0,01 persen). Berikut visualisasi distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sumatera Selatan yang tersaji pada Gambar 20.



Gambar 20. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Selatan

2.7.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi Sumatera Selatan melibatkan beberapa fungsi usaha pedagang besar seperti pedagang pengepul, agen dan pedagang grosir. Dari sisi konsumen, hasil survei menangkap bahwa pemerintah/lembaga nirlaba, industri, kegiatan usaha lain hingga rumah tangga merupakan konsumen akhir muara dari rantai distribusi yang berlangsung.



Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum, agen dan pedagang eceran memainkan peran penting dalam rangkaian distribusi bawang merah di Sumatera Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan agen yang memasok bawang merah ke pedagang grosir, pedagang eceran, sekaligus kegiatan usaha. Di level pedagang besar lainnya, pedagang pengepul dan pedagang eceran juga menjual sebagian besar stoknya ke PE. Selanjutnya, PE yang berhubungan langsung dengan konsumen mendistribusikan stok bawang merah yang di dapat ke empat konsumen akhir, dimana penjualan ke RT memiliki persentase terbesar (82,01 persen).

2.7.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menginformasikan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp530,33 juta. Sementara itu, rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE bawang merah adalah sekitar Rp20,01 juta. Jika digabung, rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp251,98 juta dan sanggup mendapatkan rasio marjin sebesar 18,39 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa secara umum pedagang bawang merah di Sumatera Selatan mengambil keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 18,39 persen.

Tabel 8. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Sumatera Selatan

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.451.400,00	118.583,33	1.633.500,00
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.896.050,00	98.276,33	1.369.991,64
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	41.698,33	417,50	18.109,29
Rata-rata MPP (000 Rp)	555.350,00	20.307,00	263.508,36
Rasio MPP (%)	19,18	20,66	19,23
Rata-rata MP (000 Rp)	530.331,00	20.028,67	251.984,27
Rasio MP (%)	18,31	20,38	18,39

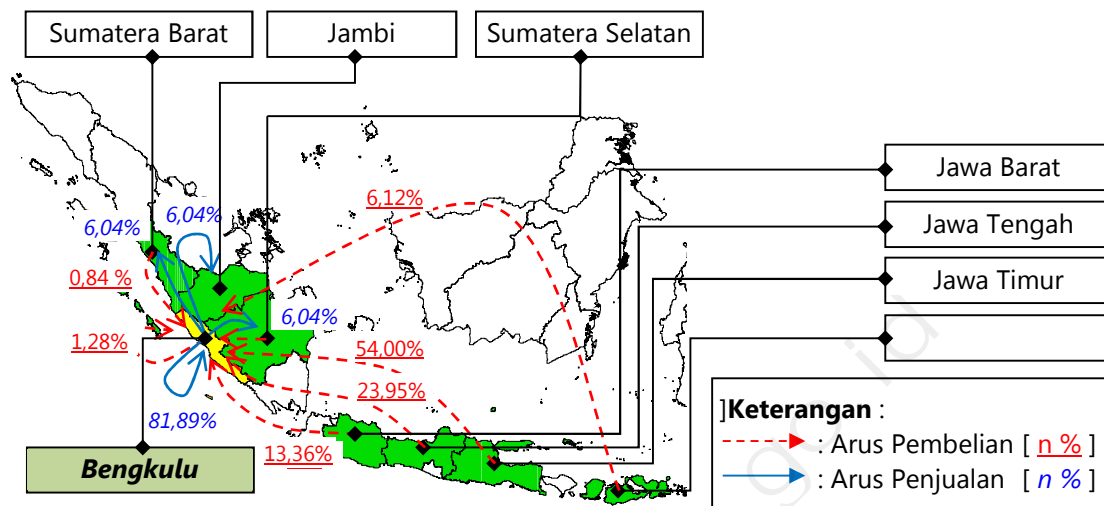
2.8 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Kota Bengkulu.

2.8.1 Peta Distribusi Perdagangan

Data survei menunjukkan bahwa pelaku perdagangan di provinsi Bengkulu mendatangkan pasokan bawang merah dari berbagai daerah, bahkan hingga ke wilayah Indonesia Tengah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Jawa Timur merupakan daerah pemasok favorit dengan persentase 54,00 persen, diikuti oleh Jawa Tengah dengan persentase 23,95 persen. Sementara sisanya dipasok

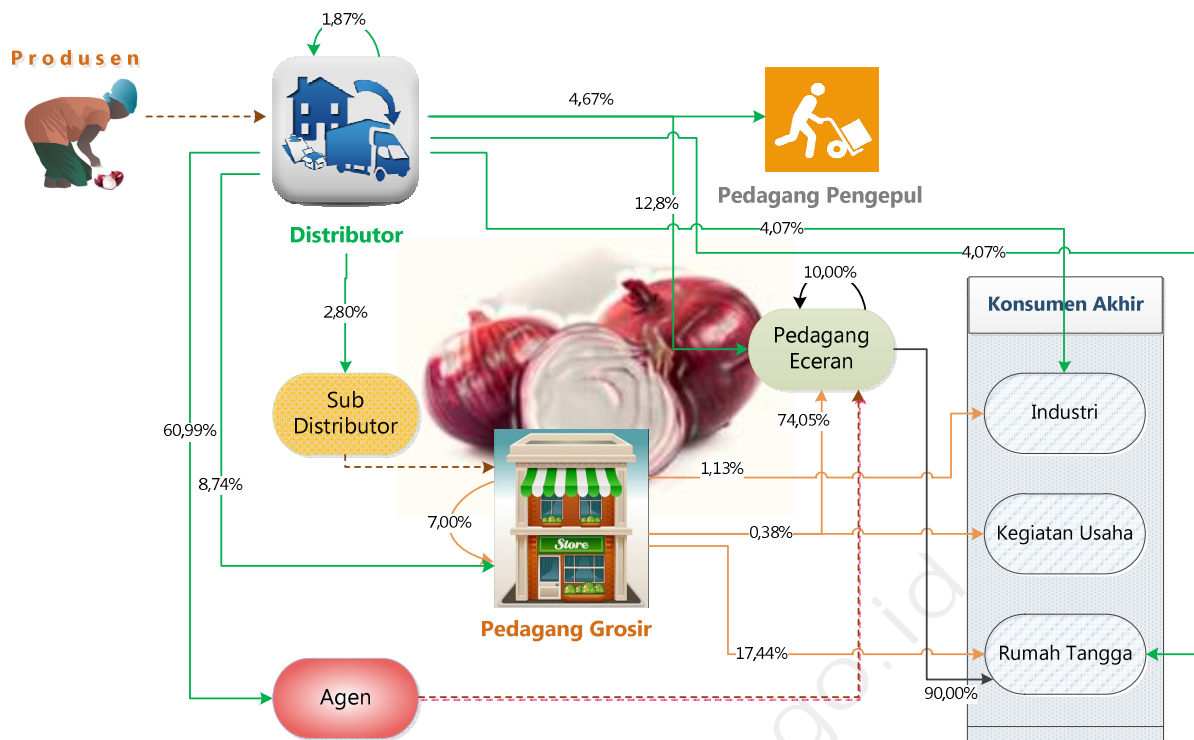
dari Jawa Barat, NTB, Sumatera Barat dan juga stok dari internal wilayah Bengkulu. Dari sisi penjualan, sebanyak 81,89 persen inventori bawang merah yang ada diperdagangkan di dalam wilayah Bengkulu, sedangkan sisanya dipasarkan ke beberapa provinsi terdekat seperti Jambi dan juga Sumatera Selatan. Gambaran distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Bengkulu disajikan pada peta sebagai berikut:



Gambar 22. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bengkulu

2.8.2 Pola Distribusi

Berdasarkan Gambar 23, dapat dilihat bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi Bengkulu melibatkan cukup banyak fungsi usaha di level pedagang besar seperti distributor, sub distributor, agen dan pedagang grosir. Pada level konsumen akhir terdiri atas industri, kegiatan usaha lain, dan rumah tangga (RT). Secara umum, distributor memegang peranan yang cukup vital pada jalur distribusi perdagangan bawang merah. Setelah menerima pasokan dari produsen, distributor mengawali arus penjualan ke seluruh level pedagang yang ada, hingga menyentuh langsung ke tangan konsumen akhir seperti industri dan rumah tangga. Di sisi lain, pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari distributor meneruskan rantai perdagangan dengan menjual sebagian besar (74,05 persen) bawang merah ke pedagang eceran, dan sebagian sisanya dijual ke sesama PG dan juga ke konsumen akhir. Selanjutnya, PE yang berhubungan langsung dengan konsumen mendistribusikan stok bawang merah yang di dapat ke sesama PE dan mayoritas ke RT (90,00 persen).



Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bengkulu

2.8.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menginformasikan bahwa rata-rata MP yang dicapai oleh lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp4,48milyar sedangkan rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE bawang merah adalah sekitar Rp15,93 juta. Jika digabung, rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp3,49 milyar dengan rasio marjin sebesar 36,66 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa secara umum pedagang bawang merah di Bengkulu sanggup meraup keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 36,66 persen.

Tabel 9. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Bengkulu

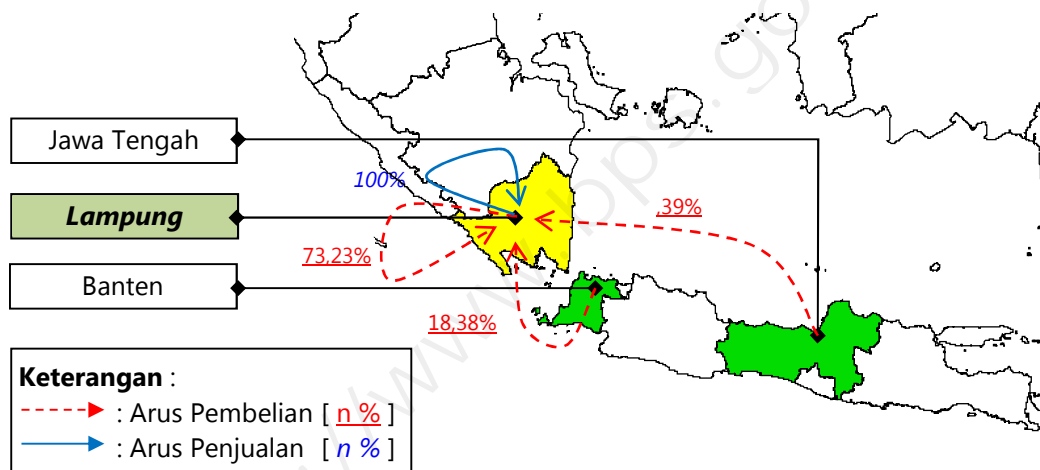
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	17.036.342,86	91.384,00	13.270.796,44
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	12.214.885,71	61.956,00	9.514.234,67
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	598.561,25	13.500,00	403.540,83
Rata-rata MPP (000 Rp)	4.821.457,14	29.428,00	3.756.561,78
Rasio MPP (%)	39,47	47,50	39,48
Rata-rata MP (000 Rp)	4.479.422,14	15.928,00	3.487.534,56
Rasio MP (%)	36,67	25,71	36,66

2.9 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung.

2.9.1 Peta Distribusi Perdagangan

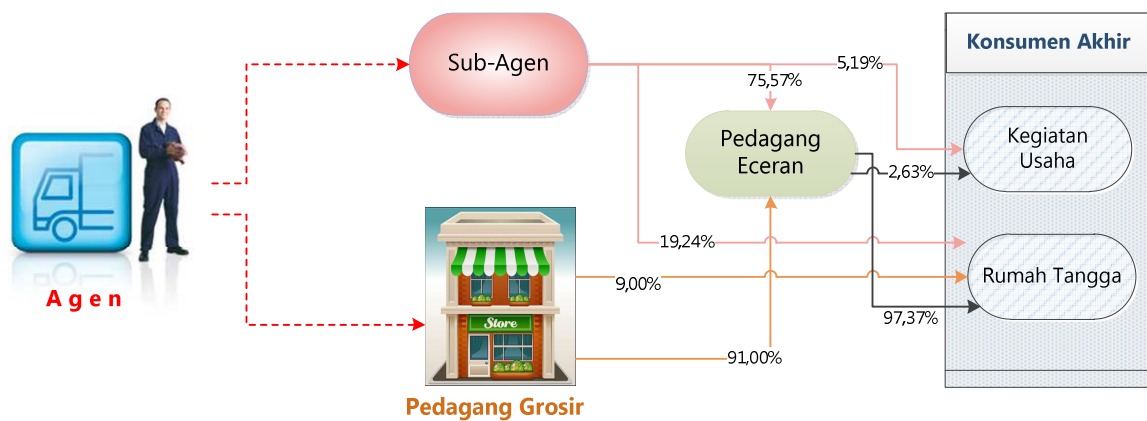
Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar bawang merah yang diperdagangkan di provinsi Lampung berasal dari dalam wilayah Lampung sendiri, yakni sebesar 73,23 persen. Provinsi Banten dan Jawa Tengah juga turut menyumbangkan pasokan bawang merahnya masing-masing sekitar 18,38 persen dan 8,39 persen. Dari sisi penjualan, seluruh stok bawang merah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di wilayah Lampung. Gambaran distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Lampung disajikan pada peta sebagai berikut:



Gambar 24. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Lampung

2.9.2 Pola Distribusi

Berdasarkan , dapat dilihat bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi Lampung relatif cukup sederhana. Data survei menangkap hanya sub agen dan pedagang grosir yang tercatat melakukan aktivitas penjualan di level pedagang besar. Rantai distribusi ini berawal dari sub agen dan juga PG yang menjual sebagian besar stok bawang merahnya ke PE. Selain ke PE, kedua fungsi lembaga tersebut juga mensuplai kebutuhan bawang merah secara langsung ke tangan konsumen akhir. Selanjutnya, PE yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir mendistribusikan mayoritas stok bawang merah ke rumah tangga dan sebagian kecil lainnya ke kegiatan usaha.



Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Lampung

2.9.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menginformasikan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp124,05 juta sedangkan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE mendapatkan MP sekitar Rp3,13 juta. Jika digabung, rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp72,23 juta dengan rasio margin sebesar 18,31 persen. Secara absolut, nilai MP tersebut dapat dikatakan tidak terlalu tinggi untuk provinsi besar seperti Lampung. Hal ini sesuai dengan kondisi rantai distribusi perdagangan bawang merah yang relatif cukup pendek, sehingga nilai barang yang dibayarkan oleh pedagang eceran hingga level konsumen akhir relatif murah.

Tabel 10. Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Lampung

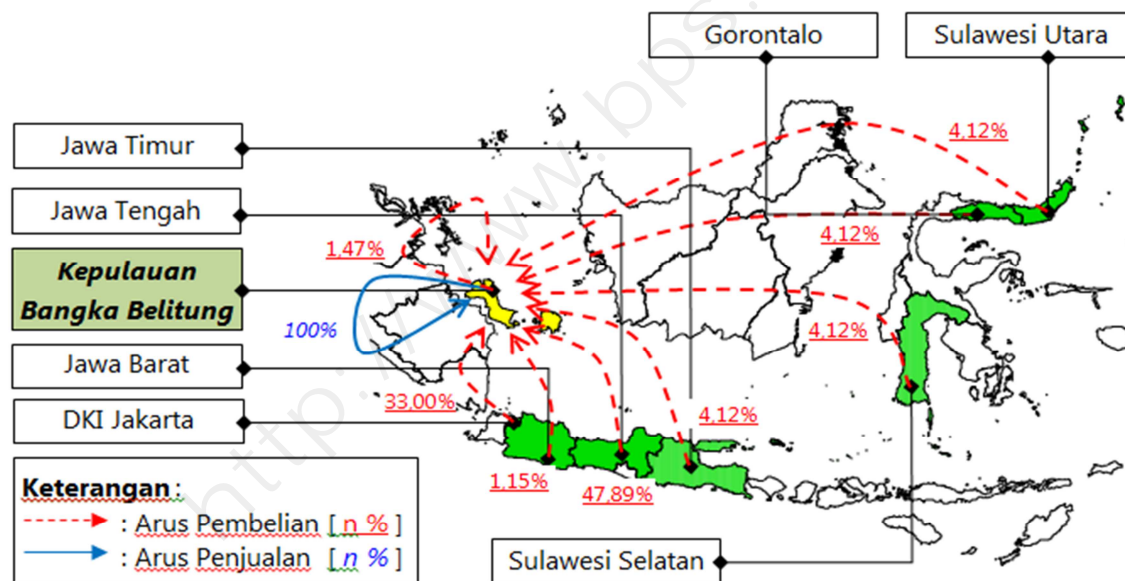
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	801.445,00	33.023,33	472.121,43
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	667.912,50	29.695,00	394.390,71
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	9.487,50	290,00	6.421,67
Rata-rata MPP (000 Rp)	133.532,50	3.328,33	77.730,71
Rasio MPP (%)	19,99	11,21	19,71
Rata-rata MP (000 Rp)	124.045,00	3.135,00	72.226,43
Rasio MP (%)	18,57	10,56	18,31

2.10 Provinsi Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang.

2.10.1 Peta Distribusi Perdagangan

Data survei menunjukkan bahwa hampir seluruh bawang merah yang diperdagangkan di Provinsi Bangka Belitung berasal dari luar wilayah Bangka Belitung (Babel). Tercatat hanya sekitar 1,47 persen saja pasokan bawang merah yang berasal dari dalam provinsi. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling banyak menyumbangkan pasokan stok bawang merah ke Babel (47,89 persen), diikuti dengan provinsi DKI Jakarta (33,00 persen), dan juga Jawa Timur (4,12 persen). Sementara itu, sebagian sisanya didatangkan dari daerah Indonesia Tengah seperti Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dari sisi penjualan, seluruh stok bawang merah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di wilayah Bangka Belitung. Gambaran distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Bangka Belitung disajikan pada peta sebagai berikut:

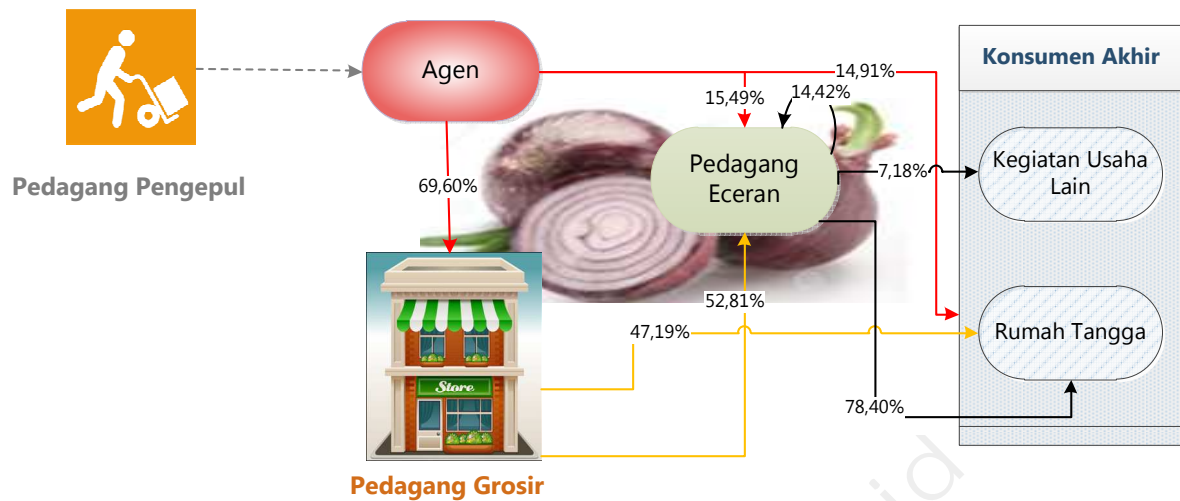


Gambar 26. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bangka Belitung

2.10.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Bangka Belitung relatif cukup sederhana. Tercatat hanya agen dan pedagang grosir yang melakukan aktivitas penjualan di level pedagang besar. Rantai distribusi diawali dari agen yang menerima pasokan dari pedagang pengepul, kemudian menjual sebagian besar pembeliannya tersebut ke pedagang grosir. Kemudian, PG membagi rata pasokan yang didapat ke pedagang eceran dan juga rumah tangga. Sebagai hilir dari rantai distribusi, pengecer mendistribusikan stok bawang

merahnya ke sesama pengecer (14,42 persen), rumah tangga (78,40 persen), dan juga ke kegiatan usaha lain (7,18 persen).



Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bangka Belitung

2.10.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Dari data survei dapat digali pula informasi terkait MP komoditas bawang merah. Diketahui bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp2,35 milyar sedangkan rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp42,63 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp1,07 milyar dengan rasio marjin sebesar 21,03 persen. Berarti, secara umum pelaku perdagangan komoditas bawang merah di Bangka Belitung mampu meraup untung hingga 21 persen.

Tabel 11. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Bangka Belitung

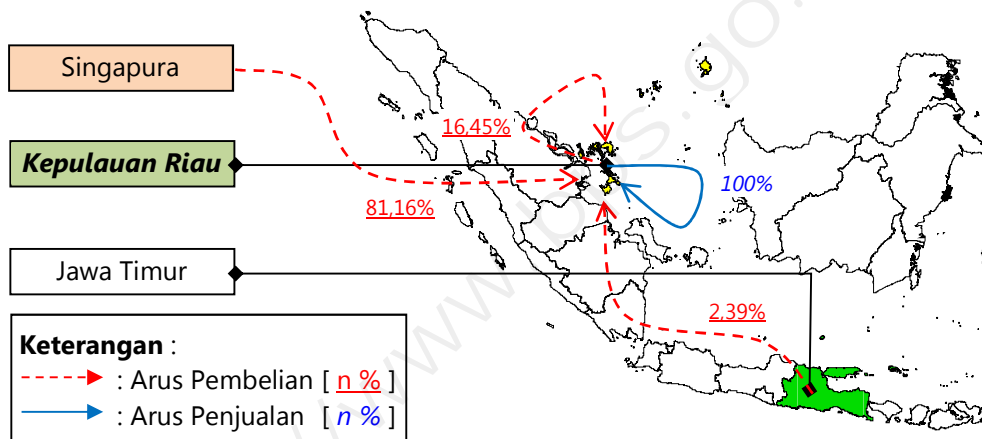
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	13.543.800,25	390.840,00	6.236.600,11
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	11.006.124,50	347.392,00	5.084.606,44
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	185.375,00	1.370,67	106.516,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	2.537.675,50	43.448,00	1.151.993,56
Rasio MPP (%)	23,06	12,51	22,66
Rata-rata MP (000 Rp)	2.352.300,50	42.625,60	1.069.147,78
Rasio MP (%)	21,37	12,27	21,03

2.11 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

2.11.1 Peta Distribusi Perdagangan

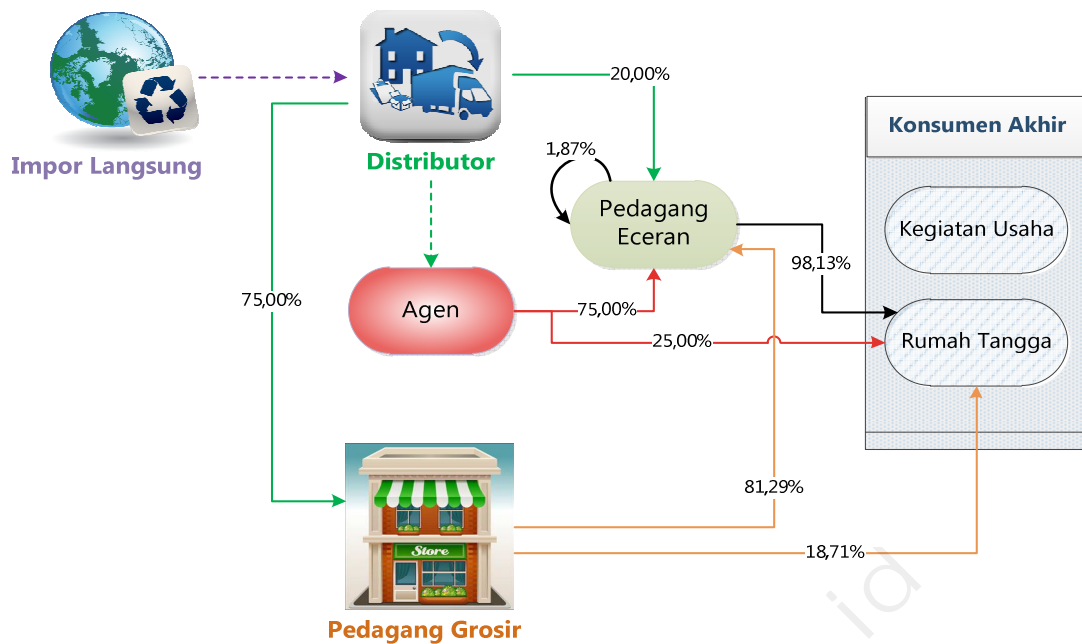
Data survei menangkap bahwa untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan bawang merah di Kepulauan Riau (Kepri) dilakukan impor bawang merah dari Singapura. Aktivitas impor ini mampu mensuplai sekitar 81,21 persen bawang merah yang akan diperdagangkan di Kepri. Lebih lanjut, 16,40 persen sisanya diperoleh dari dalam wilayah Kepri sendiri dan sedikit yang didatangkan dari Jawa Timur. Dari sisi penjualan, seluruh stok bawang merah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di wilayah Kepulauan Riau. Gambaran distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada peta sebagai berikut:



Gambar 28. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Riau

2.11.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi Kepulauan Riau relatif cukup sederhana. Distributor yang mendapatkan pasokan melalui impor langsung dari luar negeri memasarkan sebagian besar pasokannya ke pedagang grosir, sedangkan sebagian kecil lainnya ke pengecer. Selanjutnya, rantai distribusi dilanjutkan oleh PG yang memasarkan mayoritas stok bawang merahnya ke pedagang eceran. Di lain sisi, agen juga turut mendistribusikan tiga perempat pasokan bawang merahnya ke pedagang eceran. Hilir dari rantai distribusi direpresentasikan oleh pengecer yang mendistribusikan sedikit stok bawang merahnya ke sesama pengecer (1,87 %persen) dan kebanyakan stok dijual ke rumah tangga (98,13%).



Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Riau

2.11.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menunjukkan bahwarata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp136,59 juta sedangkan di level pengecer rata-rata MP yang didapatkan adalah sekitar Rp4,97 juta. Jika digabung, rata-rata MPP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp70,78 juta dengan rasio marjin keuntungan yang diperoleh sekitar 23,31 persen. Berarti, secara umum pelaku perdagangan komoditas bawang merah di Kepulauan Riau mampu meraup untung hingga 23,31 persen.

Tabel 12. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Kepulauan Riau

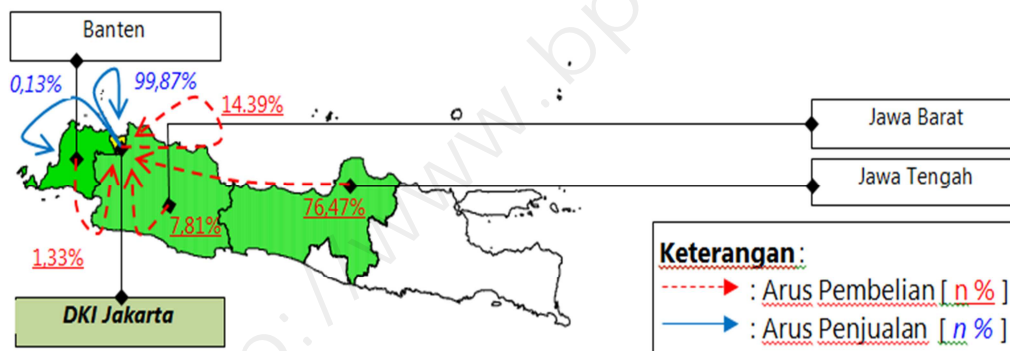
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	806.227,50	35.293,50	420.760,50
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	577.167,50	30.198,00	303.682,75
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	184.935,00	486,00	123.452,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	229.060,00	5.095,50	117.077,75
Rasio MPP (%)	39,69	16,87	38,55
Rata-rata MP (000 Rp)	136.592,50	4.974,00	70.783,25
Rasio MP (%)	23,67	16,47	23,31

2.12 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi seluruh kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Kota Administratif Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

2.12.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, bawang merah yang diperdagangkan di wilayah ibukota Indonesia ini diperoleh dari beberapa wilayah terdekat saja. Sekitar tiga perempat lebih stok bawang merah yang beredar di Jakarta didatangkan dari Jawa Tengah. Jawa Barat dan Banten turut menyumbang sebagian sisanya dengan persentase masing-masing 14,39 persen dan 1,33 persen. Dari sisi penjualan, hampir seluruh stok bawang merah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di wilayah DKI Jakarta. Hanya sedikit saja yang dipasarkan ke luar wilayah Jakarta, yakni ke Banten (0,13 persen). Distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi DKI Jakarta secara visual dapat dilihat peta sebagai berikut:



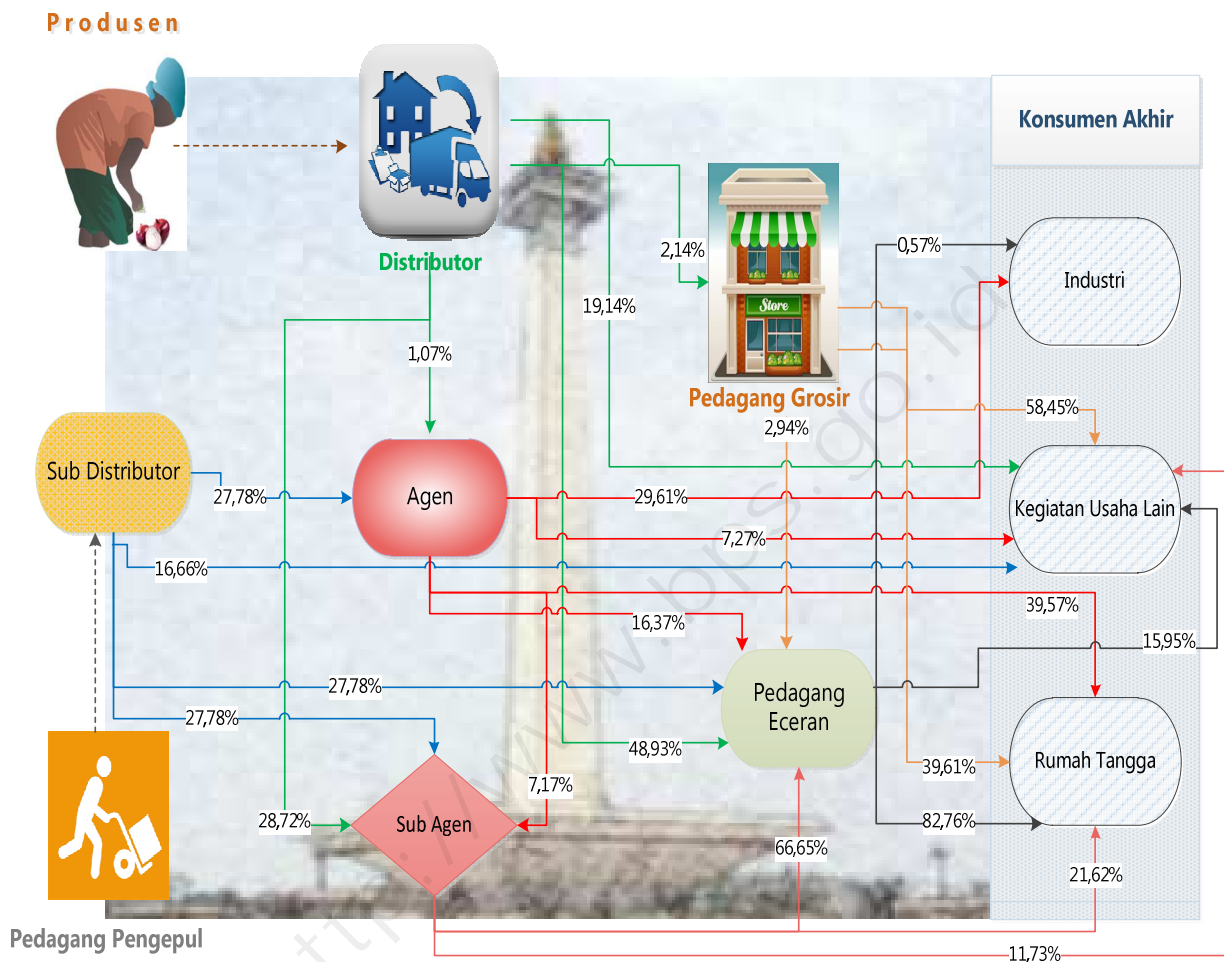
Gambar 30. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DKI Jakarta

2.12.2 Pola Distribusi

Dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kebutuhan masyarakat DKI Jakarta akan komoditas-komoditas utama seperti bawang merah pun kian meningkat. Hal ini tercermin dari cukup kompleksnya rantai distribusi perdagangan komoditas sayuran tersebut di daerah Megapolitan ini. Hasil survei menunjukkan secara umum cukup banyak fungsi kelembagaan pada level pedagang besar yang berperan dalam jalur jual-beli seperti distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang pengepul hingga pedagang grosir.

Jalur distribusi berawal dari distributor yang mendapatkan pasokan langsung dari produsen dan menjual sebagian besar stoknya ke pedagang eceran. Selain ke pengecer, distributor juga turut memasok ke berbagai fungsi kelembagaan pedagang besar lainnya bahkan hingga ke level konsumen akhir secara langsung (kegiatan usaha lain). Pada level pedagang besar yang lain seperti agen, sub

agen dan PG, memiliki pola penjualan yang mirip dengan distributor. Ketiganya menjual stok bawang merahnya ke berbagai fungsi kelembagaan lain tetapi lebih dominan ke konsumen akhir. Selanjutnya, rantai distribusi berujung pada PE yang mendapatkan pasokan dari seluruh PB yang terlibat dan kemudian memasarkan mayoritas stok bawang merahnya ke rumah tangga (82,76%). Pola tersebut secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DKI Jakarta

2.12.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Dari data survei didapatkan keterangan terkait MP komoditas bawang merah. Diketahui bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp550,19 juta. Adapun MP di level pengecer yang didapatkan adalah sekitar Rp21,65 juta dengan. Jika digabung, rata-rata MPP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp335,47 juta dengan rasio margin keuntungan yang diperoleh sekitar 37,66 persen. Berarti, secara umum pelaku perdagangan komoditas bawang merah di DKI Jakarta mampu meraup untung hingga 37,66 persen.

Tabel 13. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi DKI Jakarta

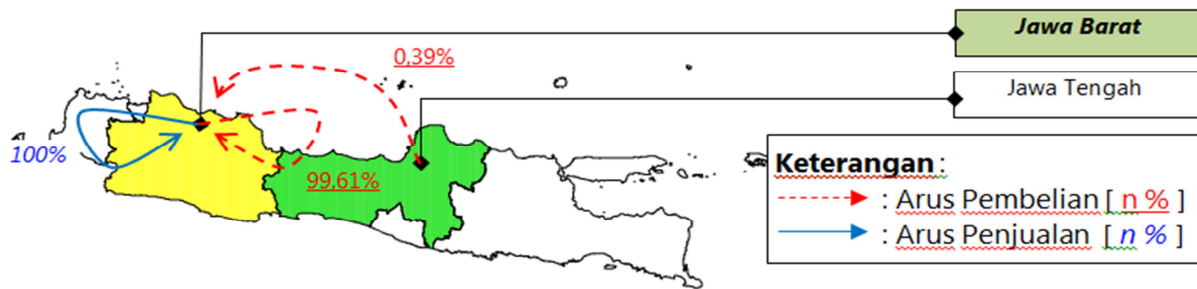
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.002.888,05	148.174,62	1.249.410,72
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.415.757,89	123.515,00	890.784,22
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	43.859,75	3.913,70	28.495,88
Rata-rata MPP (000 Rp)	587.130,16	24.659,62	358.626,50
Rasio MPP (%)	41,47	19,96	40,26
Rata-rata MP (000 Rp)	550.195,63	21.649,08	335.473,59
Rasio MP (%)	38,86	17,53	37,66

2.13 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah untuk wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Bandung Barat. Untuk wilayah perkotaan, cakupan survei meliputi Kota Bogor, Bandung, Bekasi, Bandung, Cimahi dan Tasikmalaya.

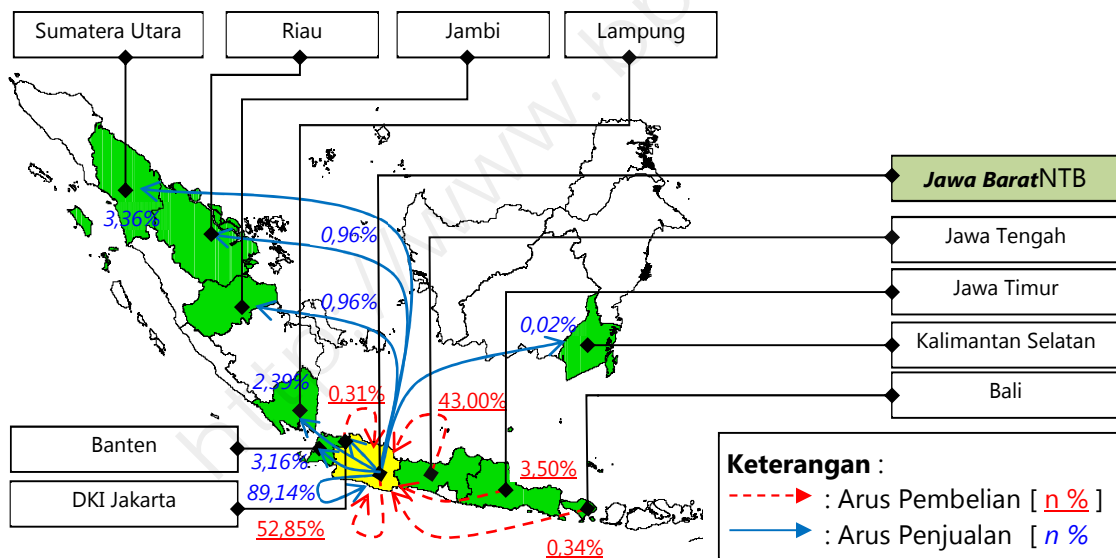
2.13.1 Peta Distribusi Perdagangan

Kondisi geografis Jawa Barat yang memiliki banyak gunung berapi membuat tanah Jawa Barat kaya akan kandungan vulkanik sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian termasuk tanaman hortikultura. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu daerah potensial yang mampu berkontribusi terhadap produksi bawang merah secara nasional. Hasil survei mendukung fakta tersebut, dimana Provinsi Jawa Barat secara mandiri mampu menjaga stok bawang merah tanpa bergantung pada provinsi lain. Dari sisi distribusi produksinya, hasil survei menunjukkan bahwa petani bawang merah di Provinsi Jawa Barat memperoleh hampir seluruh (99,61%) bibit bawang merah dari dalam wilayah Jawa Barat sendiri, sedangkan sebagian kecil sisanya mayoritas dibeli dari Jawa Tengah (0,39%). Hasil panen bawang merah tersebut kemudian dijual seutuhnya ke provinsi untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat provinsi Jawa Barat. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 32.



Gambar 32. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat

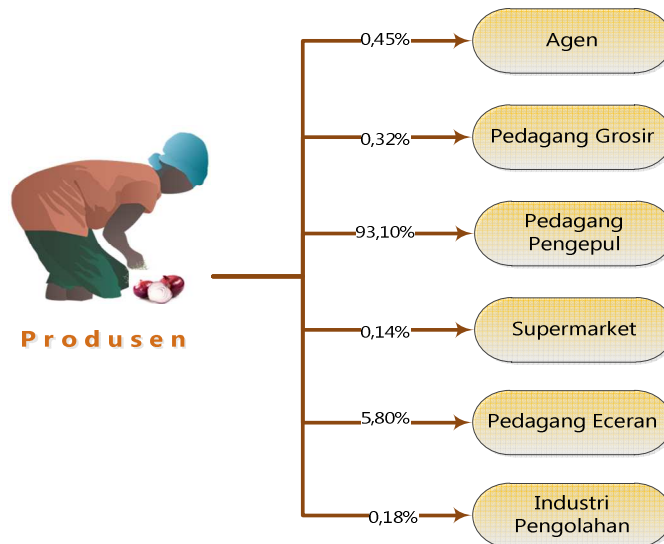
Dari sisi perdagangan, arus distribusi perdagangan bawang merah Provinsi Jawa Barat mirip dengan arus penjualan produksinya. Diketahui bahwa mayoritas pasokan didapatkan dari dalam wilayah Jawa Barat sendiri (52,85%). Sementara itu, sebagian lainnya diperoleh dari Jawa Tengah (43,00%), Jawa Timur (3,50%), Bali (0,34%) dan dari DKI Jakarta (0,31%). Dari sisi penjualan, data survei menunjukkan bahwa pedagang bawang merah di Jawa Barat cenderung menjual pasokannya ke dalam wilayah sendiri, yakni sekitar 89,14 persen. Sementara sisa stok bawang merah diperdagangkan di provinsi-provinsi terdekat seperti Banten, Lampung, Riau, Jambi, hingga ke Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 33. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat

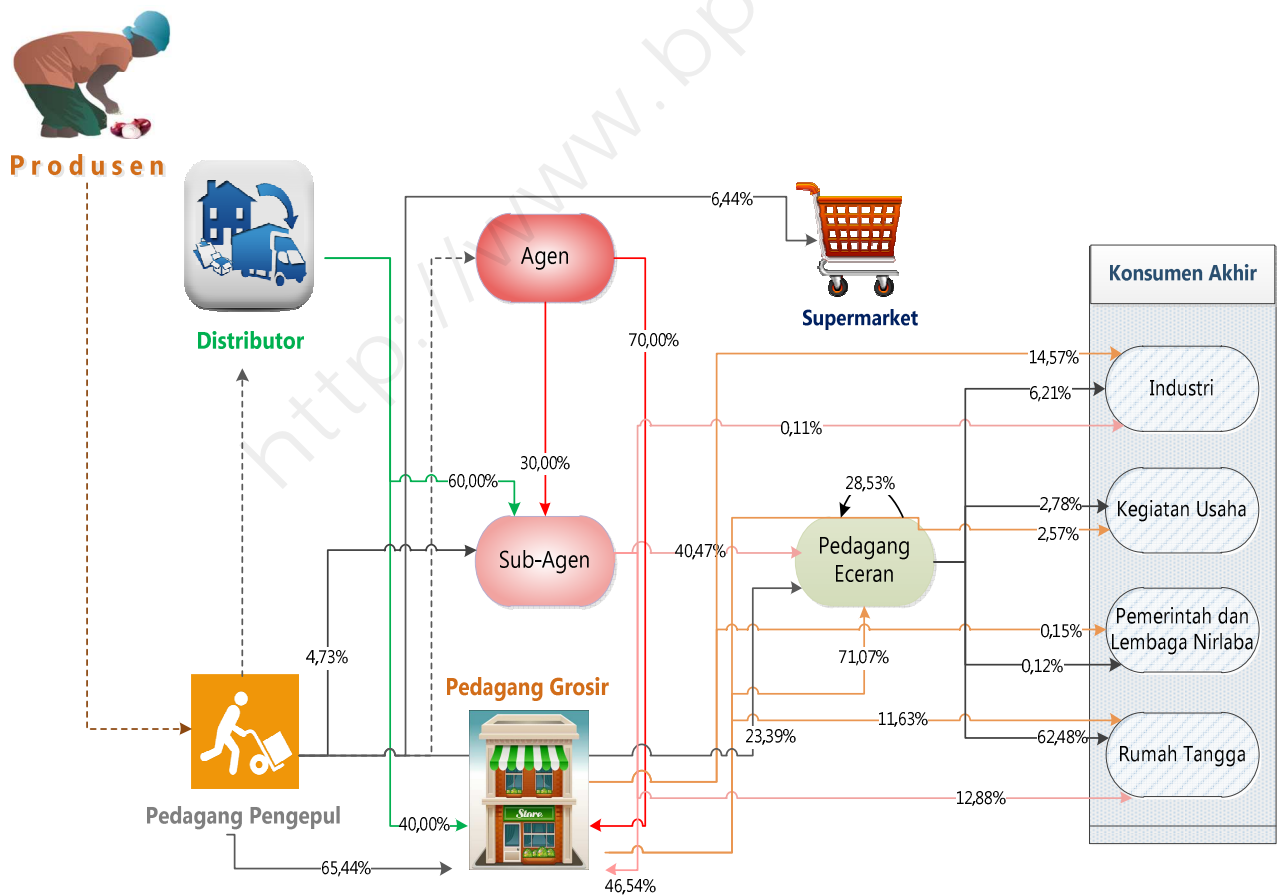
2.13.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Jawa Barat sebagian besar dijual langsung oleh petani ke pedagang pengepul (93,10%). Sementara itu, sebagian lainnya dijual ke pedagang eceran (5,80%), agen (0,45%), pedagang grosir (0,32%) supermarket (0,14%), hingga ke level konsumen akhir yaitu industri pengolahan (0,18%). Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 34. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 35, dapat dilihat bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Jawa Barat melibatkan cukup banyak fungsi usaha di level pedagang besar seperti distributor, agen, pedagang grosir dan juga pedagang pengepul.



Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Barat

Pada level konsumen akhir terdiri atas industri pengolahan, kegiatan usaha lain, pemerintah dan lembaga nirlaba, dan rumah tangga (RT). Secara umum, distributor memegang peranan yang cukup vital pada jalur distribusi perdagangan bawang merah. Berawal dari distributor inilah, rantai perdagangan bawang merah di Jawa Barat tampak cukup efisien. Stok bawang merah yang didapatkan oleh subdistributor didistribusikan ke dua pedagang besar sub agen dan pedagang grosir. Kedua fungsi lembaga ini mampu menjaring pasar hingga ke seluruh elemen konsumen akhir, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang eceran. Selanjutnya, PE yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir mendistribusikan stok bawang merah yang di dapat ke sesama PE dan mayoritas ke RT (62,48%).

2.13.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menginformasikan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp383,34 juta sedangkan untuk rata-rata MP lembaga usaha yang termasuk kategori PE bawang merah adalah sekitar Rp122,94 juta. Secara total, rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp301,50 juta dengan rasio marjin sebesar 16,55 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa secara umum pedagang bawang merah di Jawa Barat secara rata-rata mengambil keuntungan penjualannya sebesar 16,55 persen.

Tabel 14. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Jawa Barat

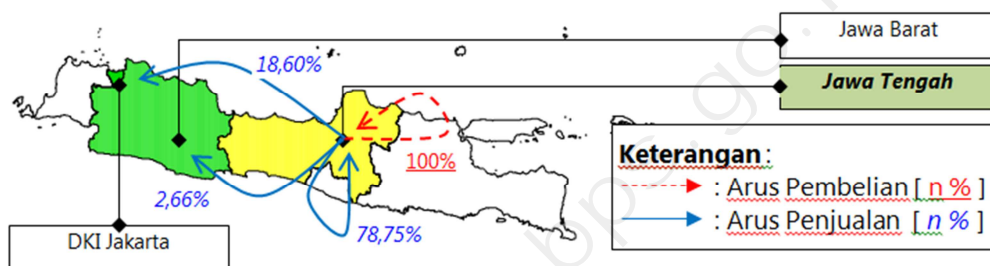
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.936.913,96	462.246,82	2.159.161,43
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.510.337,92	318.628,18	1.821.514,86
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	57.643,39	25.279,89	46.855,56
Rata-rata MPP (000 Rp)	426.576,00	143.618,64	337.646,54
Rasio MPP (%)	16,99	45,07	18,54
Rata-rata MP (000 Rp)	383.343,46	122.935,09	301.500,83
Rasio MP (%)	15,27	38,58	16,55

2.14 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah untuk wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Cilacap, Banyumas, Boyolali, Grobogan, Magelang, Blora, Demak, Brebes, dan Semarang. Untuk wilayah perkotaan, cakupan survei meliputi Kota Salatiga dan Semarang.

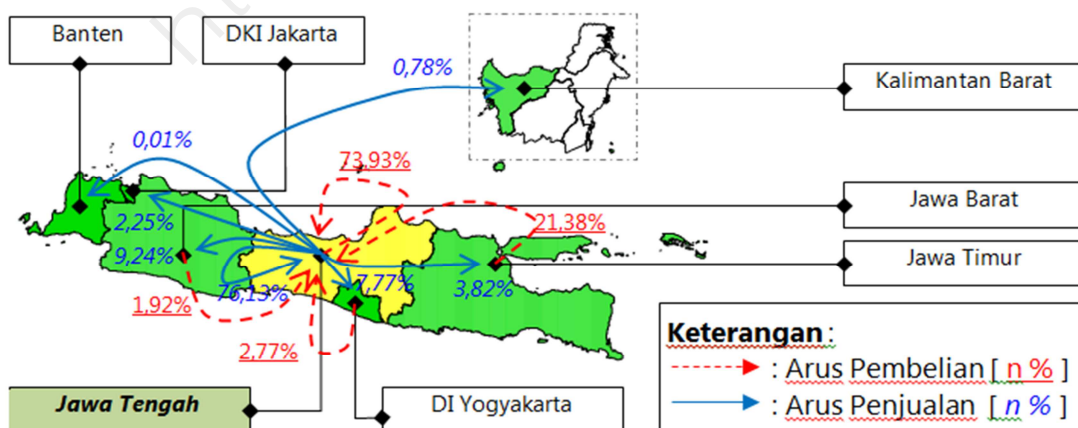
2.14.1 Peta Distribusi Perdagangan

Sama halnya dengan Jawa Barat, keadaan geografis Jawa Tengah yang dikelilingi banyak gunung berapi membuat tanah Jawa Tengah kaya akan kandungan vulkanik sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian. Di area lereng gunung jenis tanahnya adalah tanah vulkanis jenis andosol yang terkenal sangat subur cocok untuk pertanian hortikultura seperti bawang merah. Hal tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah paling potensial yang mampu berkontribusi terhadap hampir setengah stok bawang merah secara nasional. Hasil survei mendukung fakta tersebut, dimana pengadaan bibit seluruhnya dibeli dari dalam wilayah tanpa bergantung pada provinsi lain. Hasil panen bawang merah tersebut kemudian dijual baik ke dalam maupun keluar provinsi. Sebanyak 78,75 persen hasil produksi dijual ke dalam provinsi, sedangkan 18,60 persen dijual ke DKI Jakarta dan sedikit sisanya disuplai ke Jawa Barat. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 36. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah

Dari sisi perdagangan, meskipun dikenal sebagai daerah lumbung bawang merah nasional, hasil survei menunjukkan bahwa pelaku perdagangan di Jawa Tengah masih mendatangkan sebagian stok bawang merah dari provinsi-provinsi terdekat seperti Jawa Timur (21,38%), DIY (2,77%), dan Jawa Barat (1,92%), sementara sebagian besar stok dipasok dari dalam wilayah.

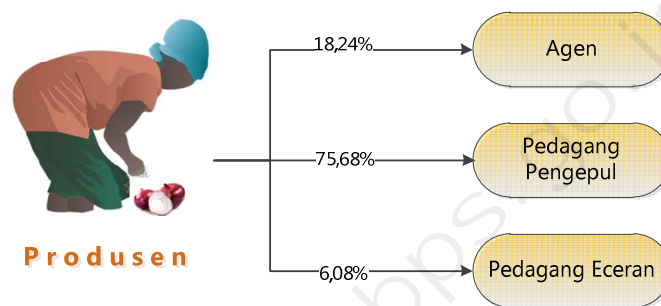


Gambar 37. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah

Ditinjau dari aspek penjualannya, data survei menunjukkan bahwa pedagang bawang merah di Jawa Tengah cenderung menjual pasokannya ke dalam wilayah sendiri, yakni sekitar 76,13 persen. Sementara itu, sisa stok bawang merah diperdagangkan di provinsi-provinsi terdekat seperti Banten, DKI Jakarta, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur hingga ke Kalimantan Barat. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Jawa Tengah secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 37.

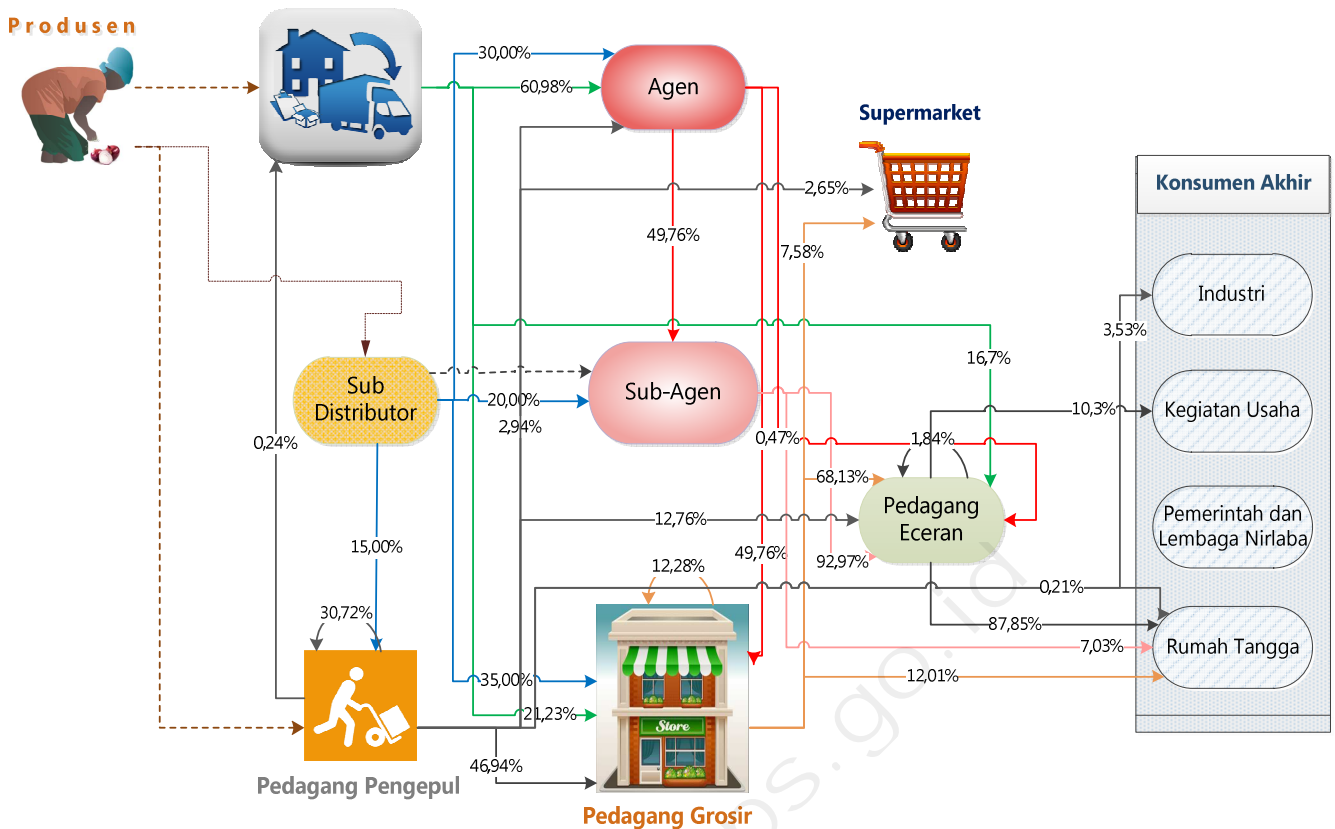
2.14.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar dijual langsung oleh petani ke pedagang pengepul (75,68%). Sementara itu, sebagian lainnya dijual ke agen (18,24%) dan pedagang eceran (6,08%). Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 38. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 38, dapat dilihat bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi Jawa Tengah melibatkan cukup banyak fungsi usaha di level pedagang besar seperti distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir dan juga pedagang pengepul. Pada level konsumen akhir terdiri atas industri pengolahan, kegiatan usaha lain, pemerintah dan lembaga nirlaba, dan rumah tangga (RT). Secara umum, sub distributor memegang peranan penting pada jalur distribusi perdagangan bawang merah. Berawal dari sub distributor yang mendapatkan pasokan dari produsen, sub distributor mendistribusikan stok bawang merahnya ke berbagai fungsi kelembagaan dan paling banyak dijual ke pedagang grosir. Kemudian, pedagang grosir yang juga memperoleh stok dari agen dan pedagang pengepul, memasarkan stok bawang merahnya ke level pengecer seperti supermarket dan pedagang eceran konvensional, serta langsung ke rumah tangga. Selanjutnya, PE yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir mendistribusikan stok bawang merah yang di dapat ke sesama PE dan mayoritas ke RT (87,85%).



Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Tengah

2.14.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menginformasikan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp652,49 juta. Sementara itu, rata-rata MPP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE bawang merah adalah sekitar Rp17,03 juta.

Tabel 15. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Jawa Tengah

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	5.386.797,52	134.353,58	3.770.660,92
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	4.710.034,00	114.409,42	3.295.995,67
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	38.549,41	4.997,71	28.763,50
Rata-rata MPP (000 Rp)	676.763,48	19.944,17	474.665,23
Rasio MPP (%)	14,37	17,43	14,40
Rata-rata MP (000 Rp)	652.491,63	17.028,83	456.964,62
Rasio MP (%)	13,85	14,88	13,86

Lebih lanjut, jika digabungkan rata-rata MP untuk pelaku perdagangan keseluruhan adalah sekitar Rp456,96 juta dengan rasio marjin sebesar 13,86 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa

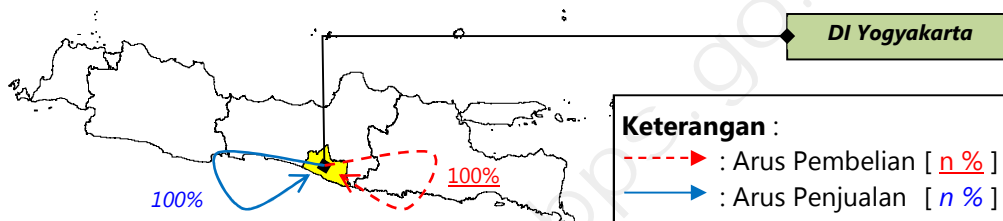
secara umum pedagang bawang merah di Jawa Tengah mengambil keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 13,86 persen.

2.15 Provinsi DI Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DI Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.

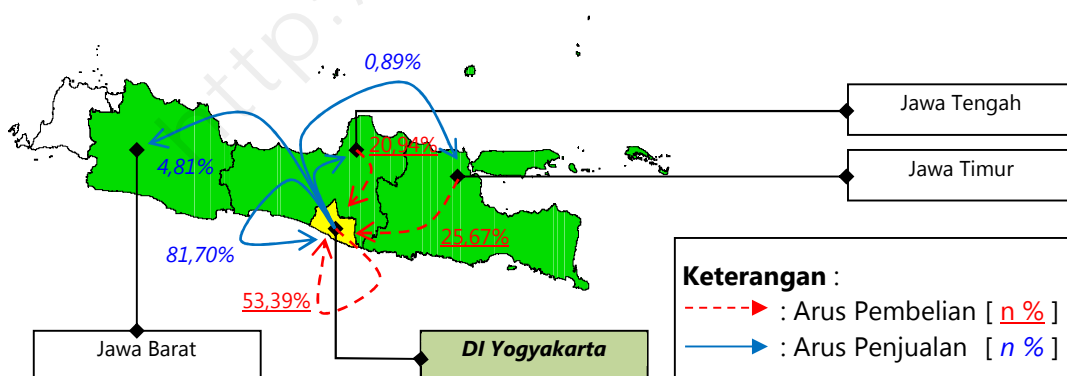
2.15.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi DI Yogyakarta memperoleh keseluruhan bibit bawang merah dari dalam wilayah DI Yogyakarta sendiri, dan hasil produksinya kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat DI Yogyakarta. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 40. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta

Dari sisi perdagangan, provinsi yang terkenal dengan gudegnya ini mampu mensuplai sebagian besar stok bawang merah dari dalam provinsi (53,39%). Sebagian sisanya dipasok oleh produsen besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

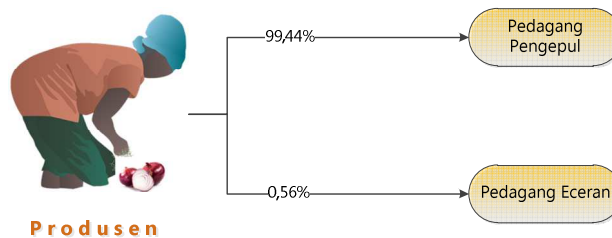


Gambar 41. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta

Sementara itu, dari sisi penjualan, sekitar 81,70 persen stok bawang merah dipasarkan di wilayah internal DI Yogyakarta. Sedangkan sisanya diperdagangkan di provinsi-provinsi terdekat seperti Jawa Barat (4,81%), Jawa Tengah (12,60%), dan Jawa Timur (0,89%). Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di DI Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar 41 di atas.

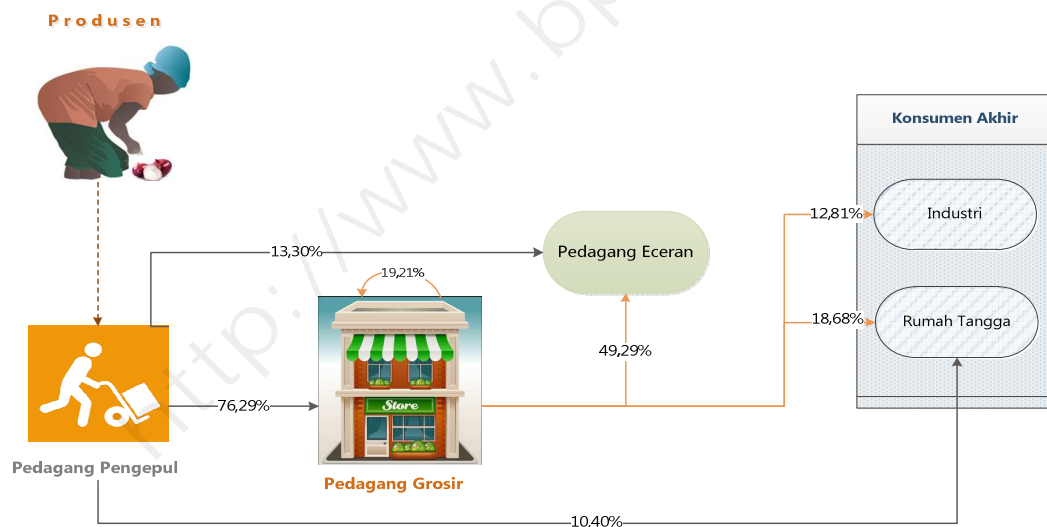
2.15.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi DI Yogyakarta hampir seluruhnya dijual ke pedagang pengepul (99,44%). Selain itu, hasil produksi tersebut juga dijual oleh petani secara langsung ke pengecer (0,56%). Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 42. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan Gambar 42, dapat dilihat bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi DI Yogyakarta relatif lebih sederhana dibandingkan provinsi penghasil bawang merah lainnya, khususnya untuk produsen-produsen di pulau Jawa.



Gambar 43. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi DI Yogyakarta

Data survei mencatat praktis hanya pedagang pengepul dan pedagang grosir saja yang berperan sebagai pedagang besar. Sementara untuk konsumen akhir terdiri atas industri pengolahan dan rumah tangga. Rantai distribusi terpusat pada pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari pedagang pengepul, mendistribusikan hampir setengah stok yang didapatkan pada pedagang eceran, dan juga menjual secara langsung ke industri serta rumah tangga. Data survei tidak menangkap sampel pedagang eceran sehingga pola dari pedagang eceran pun tidak terdeteksi. Pola distribusi perdagangan tersebut tersaji pada Gambar 43.

2.15.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menginformasikan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp530,33 juta. Sementara itu, tidak terekam data pedagang eceran sehingga nilai MP tidak dapat diidentifikasi. Secara keseluruhan, rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp189,40 juta dengan rasio marjin sebesar 9,41 persen. Indikator ini menggambarkan bahwa secara umum pedagang bawang merah di DI Yogyakarta mengambil keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 9,41 persen.

Tabel 16. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi DI Yogyakarta

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.221.430,67	-	2.221.430,67
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.013.341,33	-	2.013.341,33
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	18.689,00	-	18.689,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	208.089,33	-	208.089,33
Rasio MPP (%)	10,34	-	10,34
Rata-rata MP (000 Rp)	189.400,33	-	189.400,33
Rasio MP (%)	9,41	-	9,41

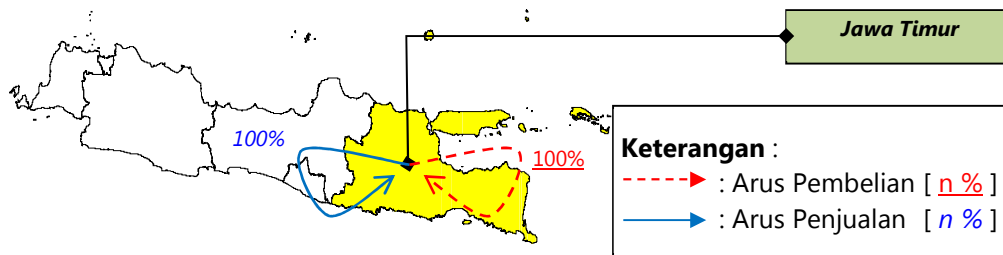
2.16 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah untuk wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Kediri, Malang, Jember, Probolinggo, Ngajuk, Magetan, Pamekasan, dan Sumenep. Untuk wilayah perkotaan, cakupan survei meliputi Kota Blitar, Malang, Surabaya, dan Batu.

2.16.1 Peta Distribusi Perdagangan

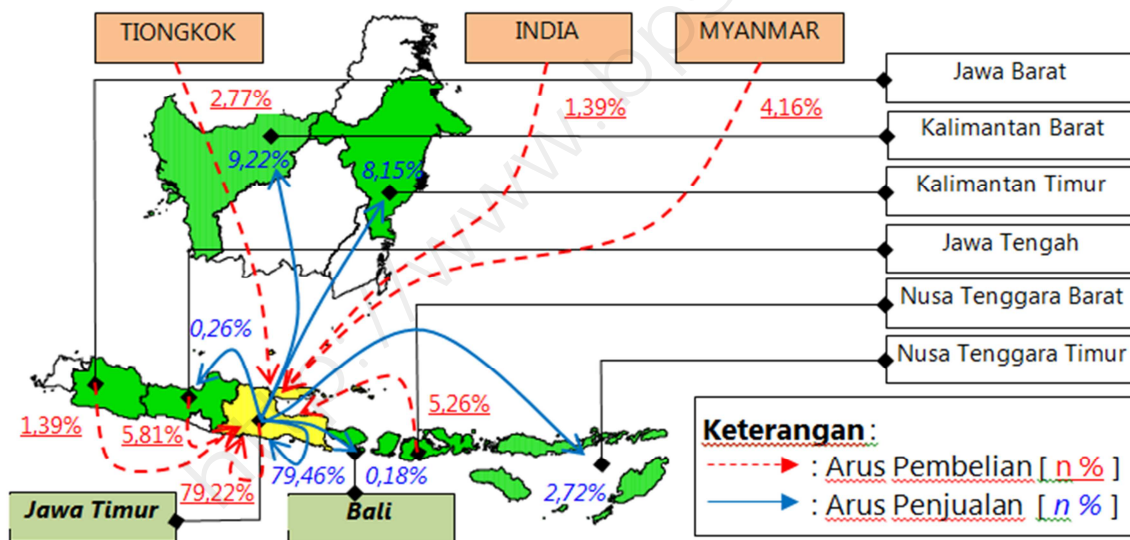
Secara umum, kondisi geologi tanah Jawa yang terbentuk dari aktivitas vulkanik membuat pulau Jawa menjadi daerah primadona hasil pertanian baik dalam skala nasional maupun internasional. Demikian pula dengan Jawa Timur, yang komposisi tanahnya tersusun dari batuan sedimen alluvium yang tersebar disepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo. Hal tersebut membuat kawasan Jawa Timur kaya akan hasil pertaniannya termasuk bawang merah. Hasil survei mendukung fakta tersebut, dimana Provinsi Jawa Timur secara mandiri mampu menjaga ketersediaan stok bawang merah tanpa bergantung pada provinsi lain. Dari sisi distribusi produksinya, diketahui bahwa petani bawang merah di Provinsi Jawa Timur memperoleh hampir seluruh bibit bawang merah dari dalam wilayah Jawa Timur sendiri. Hasil panen bawang merah tersebut kemudian dijual

seluruhnya ke dalam provinsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 44. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur

Dari sisi perdagangan, meskipun statistik menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar kedua stok bawang merah nasional, hasil survei menunjukkan bahwa pelaku perdagangan di Jawa Timur masih mendatangkan sebagian sebagian stok bawang merah dari provinsi-provinsi terdekat seperti Jawa Barat (1,39%), Jawa Tengah (5,81%), dan Bali (5,62%), sementara sebagian besar stok dipasok dari dalam wilayah seperti yang tersaji pada Gambar 45.

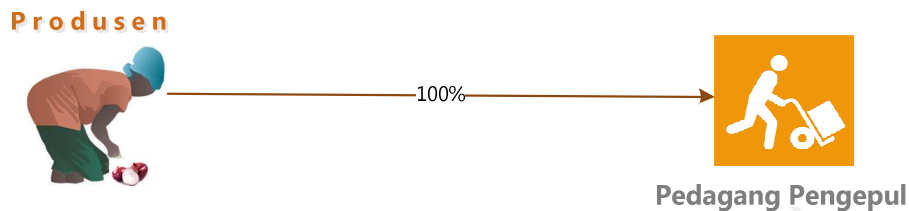


Gambar 45. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur

Selain itu, data survei juga menangkap adanya aktivitas impor bawang merah dari luar negeri antara lain dari Tiongkok, India, dan juga Myanmar, meskipun dalam proporsi kecil. Ditinjau dari aspek penjualannya, sebagian besar stok bawang merah di Jawa Timur cenderung dijual ke dalam wilayah sendiri, yakni sekitar 79,46 persen. Sementara sisa stok bawang merah diperdagangkan di Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

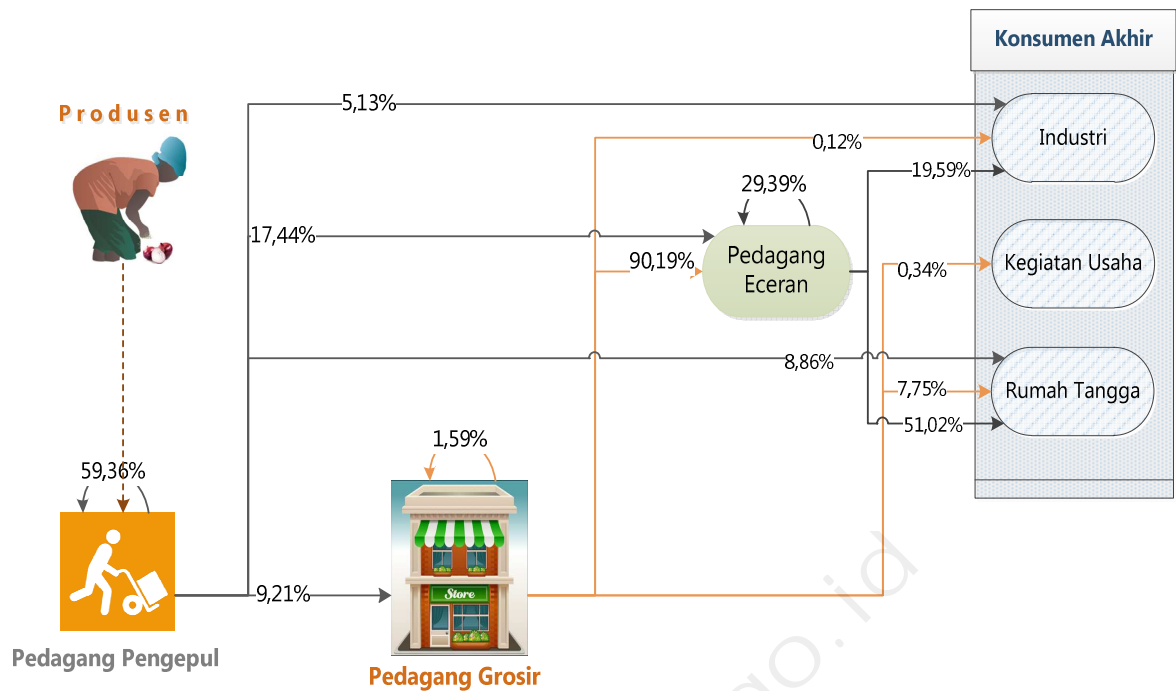
2.16.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Jawa Timur seluruhnya dijual langsung oleh petani ke pedagang pengepul. Pola ini juga tidak berbeda dengan Provinsi Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah. Fakta ini mengindikasikan bahwa pedagang pengepul memiliki akses yang kuat terhadap petani bawang merah, terlebih ini terjadi di daerah-daerah paling potensial seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 46. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 47, dapat dilihat bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi Jawa Timur sangat bergantung pada peran dari pedagang pengepul dalam mendistribusikan stok bawang merahnya ke berbagai fungsi usaha lainnya. Setelah mendapatkan pasokan dari produsen dan juga impor dari luar negeri secara langsung, pedagang pengepul memasarkan sebagian besar pasokan tersebut ke sesama pedagang pengepul lain. Sementara itu, sebagian sisanya dijual ke pedagang grosir, pedagang eceran, dan juga ke konsumen akhir. Stok bawang merah yang didapatkan pedagang eceran baik dari pedagang pengepul dan juga pedagang grosir dijual ke rumah tangga (51,02%), industri pengolahan (19,59%) dan sisanya ke sesama pengecer. Jika dilihat sepintas rantai distribusi bawang merah di provinsi ini dapat dikatakan cukup sederhana. Namun, perlu diperhatikan bahwa pedagang pengepul memainkan peran yang vital, dengan jaringan distribusi yang komprehensif. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada kemungkinan fluktuasi harga yang karena hulu pendistribusian yang cenderung bersifat sentris tersebut.



Gambar 47. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Jawa Timur

2.16.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data survei menginformasikan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp263,69sedangkan rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp235,10 juta. Jika digabung, rata-rata MP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp251,98 juta dengan rasio marjin sebesar 18,39 persen. Statistik ini mengindikasikan bahwa secara umum pedagang bawang merah di Jawa Timur mengambil keuntungan penjualannya rata-rata sebesar 18,39 persen.

Tabel 17. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Jawa Timur

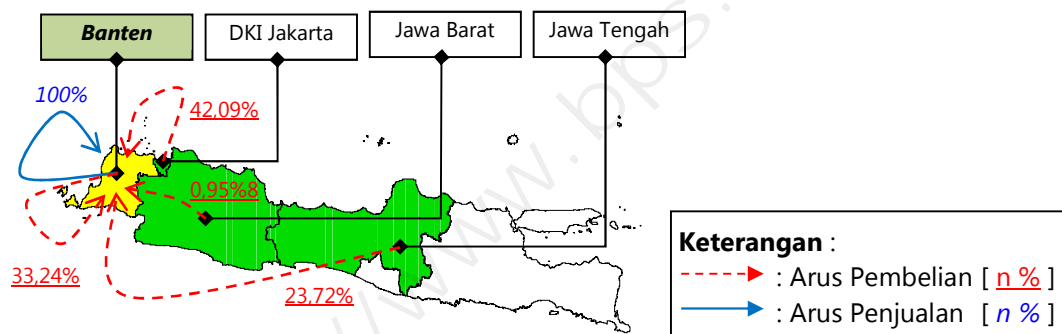
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.672.256,26	1.062.506,40	2.384.800,93
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.385.346,00	827.405,00	2.107.142,25
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	35.596,67	-	35.800,93
Rata-rata MPP (000 Rp)	286.910,26	235.101,40	277.658,68
Rasio MPP (%)	12,03	28,41	13,18
Rata-rata MP (000 Rp)	263.695,04	234.488,60	258.479,61
Rasio MP (%)	11,05	28,34	12,27

2.17 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Lebak, Serang, Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

2.17.1 Peta Distribusi Perdagangan

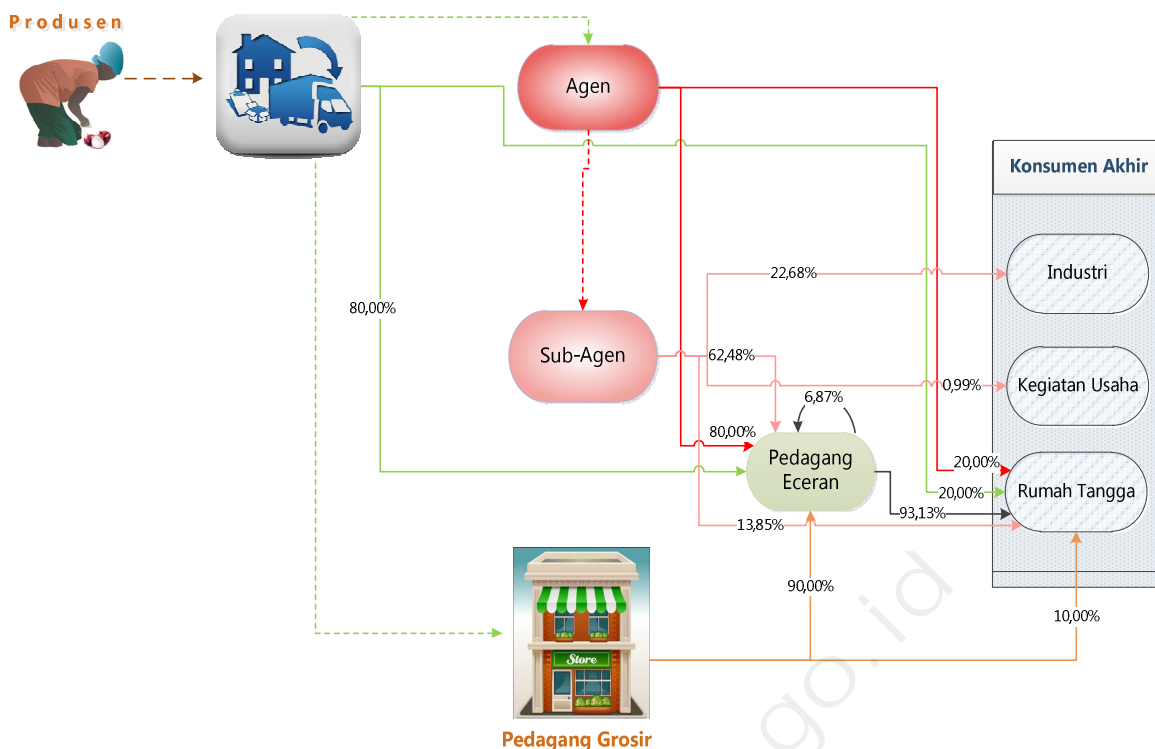
Berdasarkan hasil survei, bawang merah yang diperdagangkan di wilayah Banten diperoleh dari beberapa wilayah terdekat saja. DKI Jakarta merupakan provinsi penyumbang stok bawang merah terbesar dengan persentase sebesar 42,09 persen. Setelah DKI Jakarta, provinsi terdekat yang turut menyumbangkan pasokan bawang merah adalah Jawa Tengah (23,72%) dan hanya sedikit sekali dari Jawa Barat (0,95%). Sementara sisanya mampu diperoleh dari pasokan dalam wilayah Banten sendiri. Dari sisi penjualan, diketahui seluruh stok bawang merah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di wilayah Banten. Distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Banten secara visual dapat dilihat peta sebagai berikut:



Gambar 48. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Banten

2.17.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pola distribusi bawang merah di Banten melibatkan beberapa fungsi kelembagaan pada level pedagang besar seperti distributor, agen, sub agen, hingga pedagang grosir. Jalur distribusi berawal dari distributor yang mendapatkan pasokan langsung dari produsen dan menjual sebagian besar stoknya ke pedagang eceran. Selain ke pengecer, secara tidak langsung distributor juga turut memasok ke berbagai fungsi kelembagaan pedagang besar lainnya bahkan hingga memasarkan ke level konsumen akhir secara langsung (rumah tangga). Pada level pedagang besar yang lain seperti agen, sub agen, dan PG, yang menjual sebagian stoknya ke pengecer. Selanjutnya, rantai distribusi berujung pada PE yang mendapatkan pasokan dari seluruh PB yang terlibat dan kemudian memasarkan mayoritas stok bawang merahnya ke rumah tangga (93,13%).



Gambar 49. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Banten

2.17.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Dari data survei didapatkan keterangan terkait MP komoditas bawang dimana rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp87,73 juta. Sementara itu di level pengecer, rata-rata MPP yang didapatkan adalah sekitar Rp65,19 juta. Jika digabung, rata-rata MPP untuk pelaku perdagangan adalah sekitar Rp82,90 juta dengan rasio marjin keuntungan yang diperoleh sekitar 20,25 persen. Berarti, secara umum pelaku perdagangan komoditas bawang merah di Banten mampu meraup untung sekitar 20,25 persen.

Tabel 18. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Banten

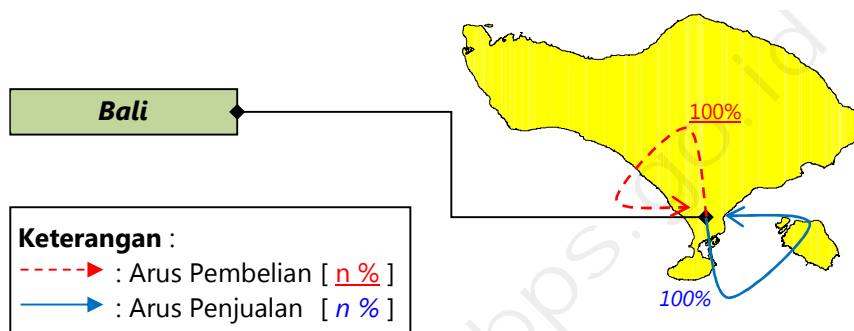
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	582.643,82	218.514,00	504.616,00
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	479.222,82	153.003,67	409.318,71
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	19.177,22	960,00	17.355,50
Rata-rata MPP (000 Rp)	103.421,00	65.510,33	95.297,29
Rasio MPP (%)	21,58	42,82	23,28
Rata-rata MP (000 Rp)	87.730,55	65.190,33	82.900,50
Rasio MP (%)	18,31	42,61	20,25

2.18 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karang Asem, dan Kota Denpasar.

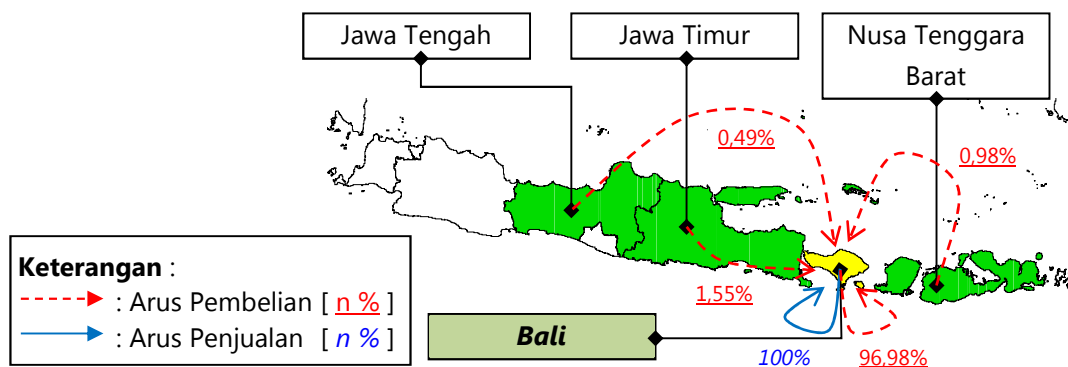
2.18.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Bali memperoleh keseluruhan bibit bawang merah dari dalam wilayah Bali sendiri. Hasil produksi bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan lokal provinsi Bali. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Bali secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 50. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Bali

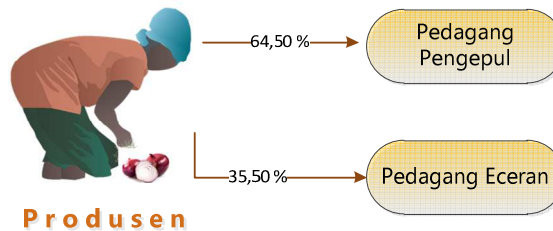
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa mayoritas pasokan (96,98%) bawang merah diperoleh dari dalam Provinsi Bali sendiri. Sedangkan sebagian kecil lainnya dipasok dari Jawa Timur (1,55%), Jawa Tengah (0,49%) dan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (0,98%). Bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya ke dalam wilayah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam Provinsi Bali. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 51. Peta Penjualan Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bali

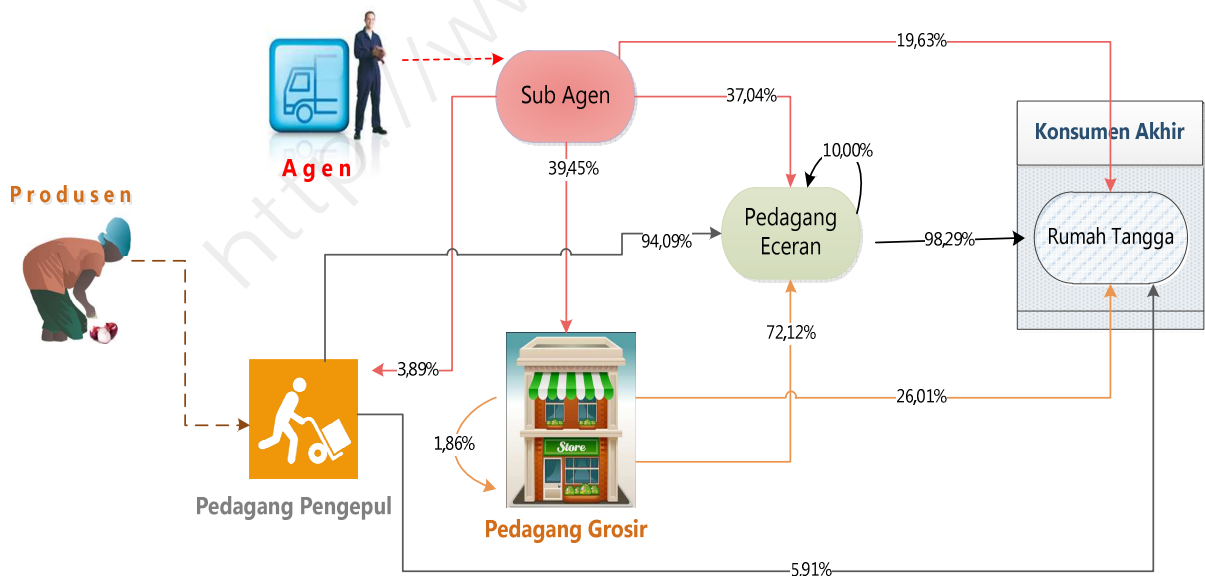
2.18.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Bali sebagian besar dijual melalui pedagang pengepul (64,50%) dan sebagian lainnya melalui pedagang eceran (35,50%) sebelum akhirnya nanti diperdagangkan di pasaran. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 52. Pola Distribusi Produksi Bawang Merah di Provinsi Bali

Provinsi Bali melibatkan fungsi usaha perdagangan grosir, sub agen dan pedagang pengepul untuk pedagang besar. Sedangkan dari konsumen akhir hanya terdiri dari rumah tangga. Dari hasil survei terlihat bahwa sub agen mendapat pasokan bawang merah dari agen. Selanjutnya pasokan di pasarkan sebagian besar ke pedagang grosir (39,45%), dan ke pedagang eceran (37,04%). Selebihnya, sebagian kecil dijual ke pedagang pengepul dan langsung ke konsumen akhir. Dari pedagang pengepul maupun pedagang grosir kemudian pasokan bawang merah sebagian besar dipasarkan melalui pedagang eceran dan sebagian lainnya dipasarkan langsung ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 53. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Bali

2.18.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp149,96 jutasedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp9,48 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp123,62 juta dengan rasio marjin sebesar 8,95 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 23.95 persen.

Tabel 19. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Bali

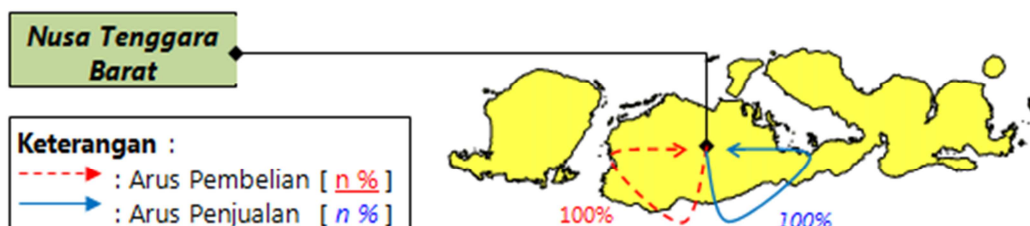
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.856.046,23	63.991,67	1.520.036,00
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.686.727,46	54.514,00	1.380.687,44
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	20.973,33	-	20.973,33
Rata-rata MPP (000 Rp)	169.318,69	9.477,33	139.348,44
Rasio MPP (%)	10,04	17,39	10,09
Rata-rata MP (000 Rp)	149.958,69	9.477,33	123.618,44
Rasio MP (%)	8,89	17,39	8,95

2.19 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima dan Kota Mataram.

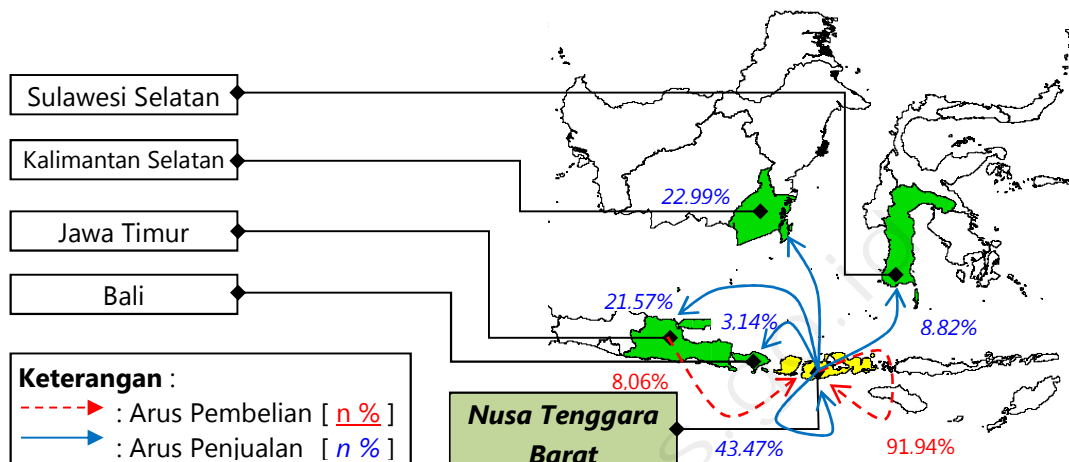
2.19.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh keseluruhan bibit bawang merah dari dalam wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri. Hasil produksi bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan lokal provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang tersaji pada gambar sebagai berikut:



Gambar 54. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

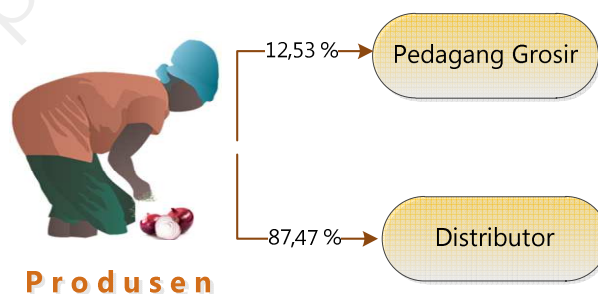
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa mayoritas pasokan (91,94%) bawang merah diperoleh dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan sebagian kecil lainnya dipasok dari Jawa Timur (8,06%). Bawang merah tersebut kemudian dijual sebanyak 43,47 persen ke dalam wilayah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu 56,53 persen sisanya dipasarkan ke provinsi terdekat yaitu Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Nusa Tenggara Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 55. Peta Penjualan Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.19.2 Pola Distribusi

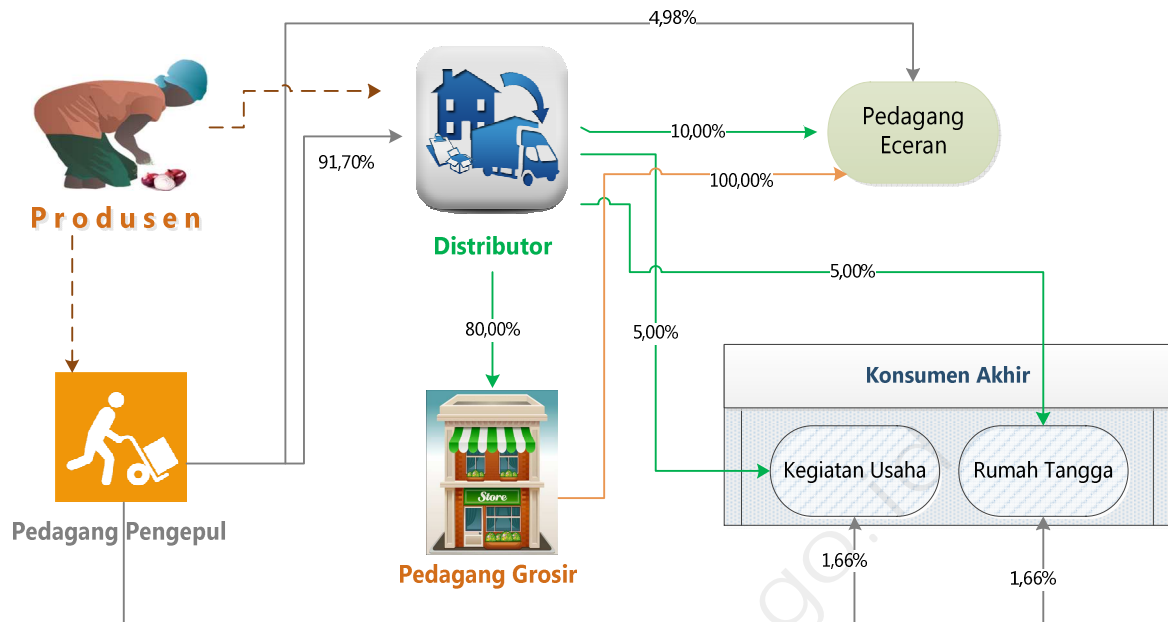
Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar dijual melalui distributor (87,47%) sebelum akhirnya nanti diperdagangkan di pasaran. Selain itu, bawang merah hasil produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dipasarkan melalui pedagang grosir. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 56. Pola Distribusi Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang pengepul. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga. Dari hasil survei terlihat bahwa distributor mendapat pasokan bawang merah dari produsen dan pedagang pengepul. Selanjutnya pasokan di pasarkan sebagian besar ke pedagang grosir. Selebihnya, sebagian kecil dijual ke pedagang eceran dan langsung ke konsumen akhir. Pola

perdagangan bawang merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 57. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.19.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp2,80milyar. Hasil survei tidak menangkap kegiatan perdagangan eceran, sehingga data nilai MP pun tidak teridentifikasi. Secara umum, rasio marjin MP yang diperoleh pedagang adalah 37,30 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawangmerah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 37,30 persen.

Tabel 20. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Nusa Tenggara Barat

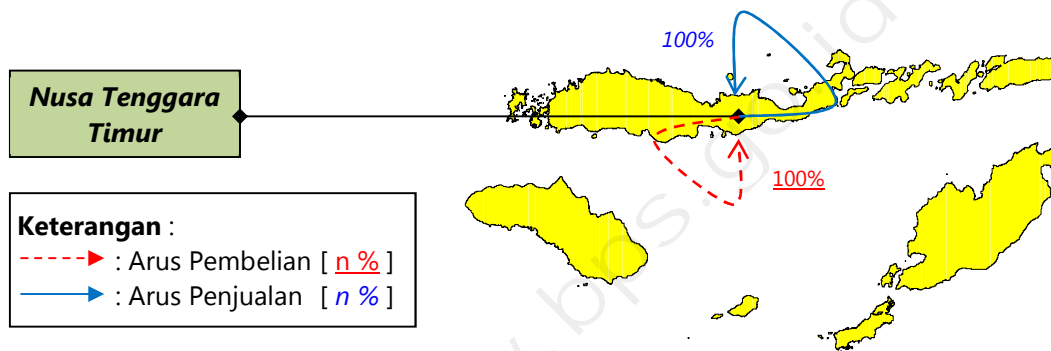
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	10.758.279,00	-	10.758.279,00
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	7.502.118,25	-	7.502.118,25
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	457.583,25	-	457.583,25
Rata-rata MPP (000 Rp)	3.256.160,75	-	3.256.160,75
Rasio MPP (%)	43,40	-	43,40
Rata-rata MP (000 Rp)	2.798.577,50	-	2.798.577,50
Rasio MP (%)	37,30	-	37,30

2.20 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kota Kupang.

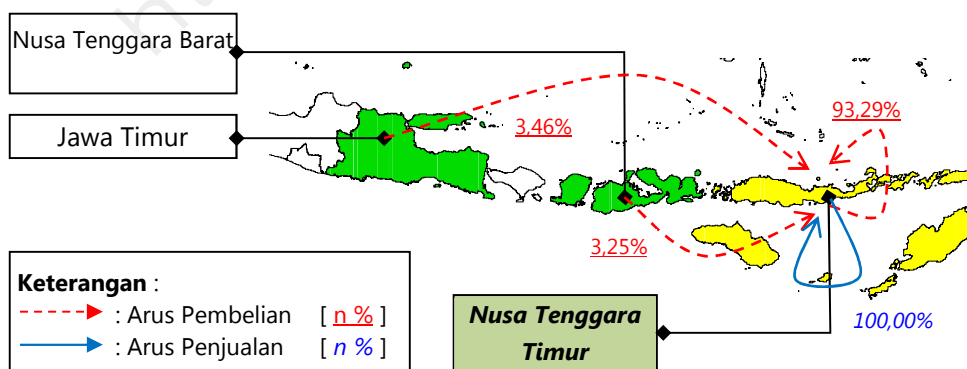
2.20.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh keseluruhan bahan baku atau bibit bawang merah dari dalam wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri. Hasil panen bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 58. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

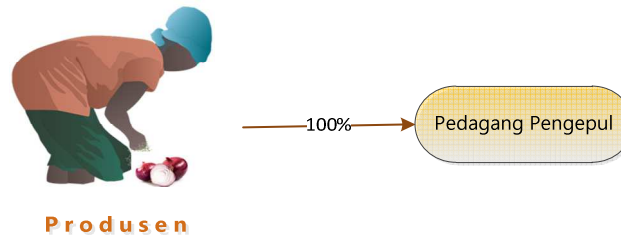
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa sebagian besar pasokan bawang merah diperoleh dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, yaitu sebesar 93,29 persen. Sedangkan sebagian kecil lainnya diperoleh dari luar provinsi, yaitu 3,46 persen dari Provinsi Jawa Timur dan 3,25 persen dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang tergambar sebagai berikut:



Gambar 59. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur

2.20.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluruhnya dijual langsung oleh petani ke pedagang pengepul, tanpa melalui fungsi kelembagaan lainnya. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 60. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari sisi perdagangan, dapat diketahui bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan fungsi usaha sub distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir, agen dan pedagang eceran. Distributor memasarkan pasokan bawang merahnya seluruhnya ke pedagang eceran. Selain sub distributor, pedagang pengepul juga mendapat pasokan bawang merahnya dari produsen langsung. Pasokan tersebut kemudian dipasarkan melalui pedagang grosir dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 61. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.20.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp11,20 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp9,04 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp10,39 juta dengan rasio

margin sebesar 34,89 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 34,89 persen.

Tabel 21. Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur

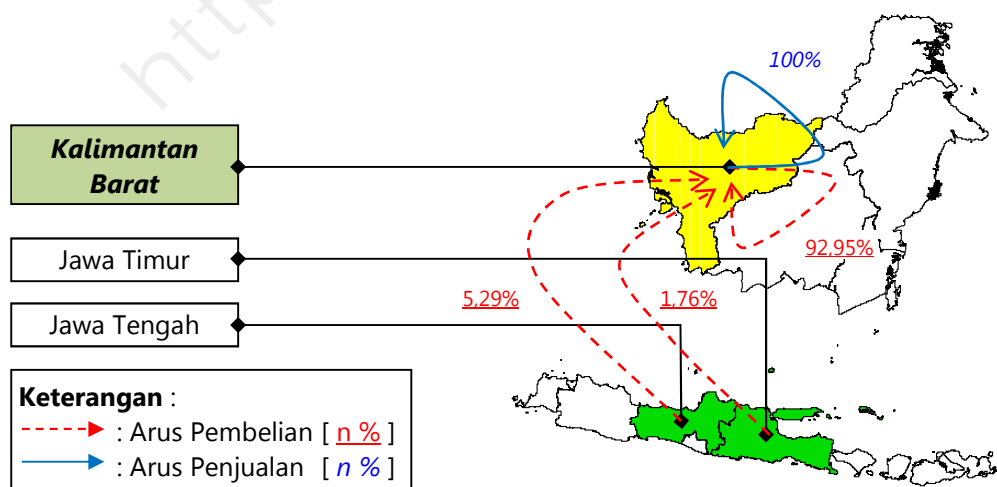
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	51.360,00	25.940,00	41.827,50
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	37.528,60	16.898,33	29.792,25
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	2.624,00	-	2.624,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	13.831,40	9.041,33	12.035,13
Rasio MPP (%)	36,86	53,50	40,40
Rata-rata MP (000 Rp)	11.207,40	9.041,33	10.395,13
Rasio MP (%)	29,86	53,50	34,89

2.21 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Bengkayang, Sintang, Kubu Raya dan Kota Pontianak.

2.21.1 Peta Distribusi Perdagangan

Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar bawang merah yang diperdagangkan di provinsi Kalimantan Barat berasal dari dalam wilayah Kalimantan Barat sendiri, yakni sebesar 92,95 persen.

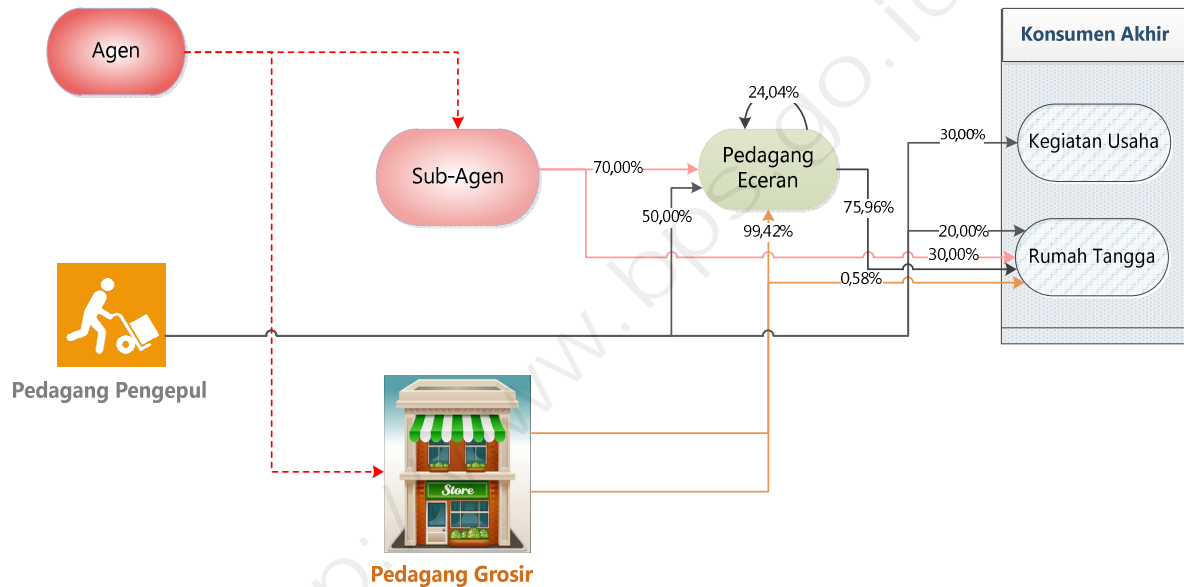


Gambar 62. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Barat

Sedang sebagian besar lainnya berasal dari Jawa Tengah (5,29%) dan Jawa Timur (1,76%). Dari sisi penjualan, seluruh stok bawang merah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di wilayah Kalimantan Barat. Secara lengkap gambar 62 menyajikan peta distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Kalimantan Barat.

2.21.2 Pola Distribusi

Berdasarkan Gambar 63, dapat dilihat bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di provinsi Kalimantan Barat menangkap hanya sub agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir yang tercatat melakukan aktivitas penjualan di level pedagang besar. Ketiga jalur tersebut semuanya menjual sebagian besar stok bawang merahnya ke PE dan sebagian kecil lainnya langsung ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada pola sebagai berikut:



Gambar 63. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Barat

2.21.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp91,31 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp34,61. Dengan demikian, secara umum gabungan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp62,96 juta dengan rasio marjin sebesar 17,59 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 17,59 persen.

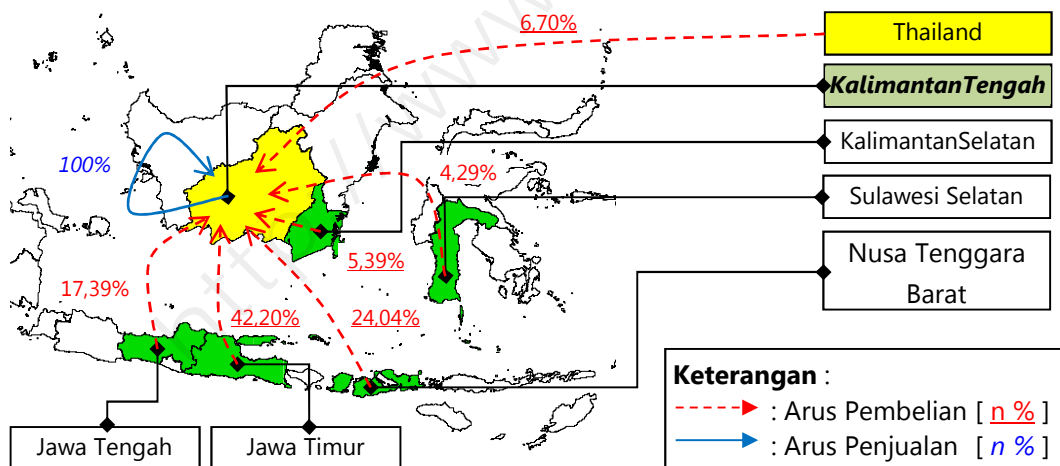
Tabel 22. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Kalimantan Barat

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	670.617,00	195.612,80	433.114,90
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	559.010,40	156.867,00	357.938,70
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	50.750,00	6.894,00	24.436,40
Rata-rata MPP (000 Rp)	111.606,60	38.745,80	75.176,20
Rasio MPP (%)	19,97	24,70	21,00
Rata-rata MP (000 Rp)	91.306,60	34.609,20	62.957,90
Rasio MP (%)	16,33	22,06	17,59

2.22 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangkaraya.

2.22.1 Peta Distribusi Perdagangan



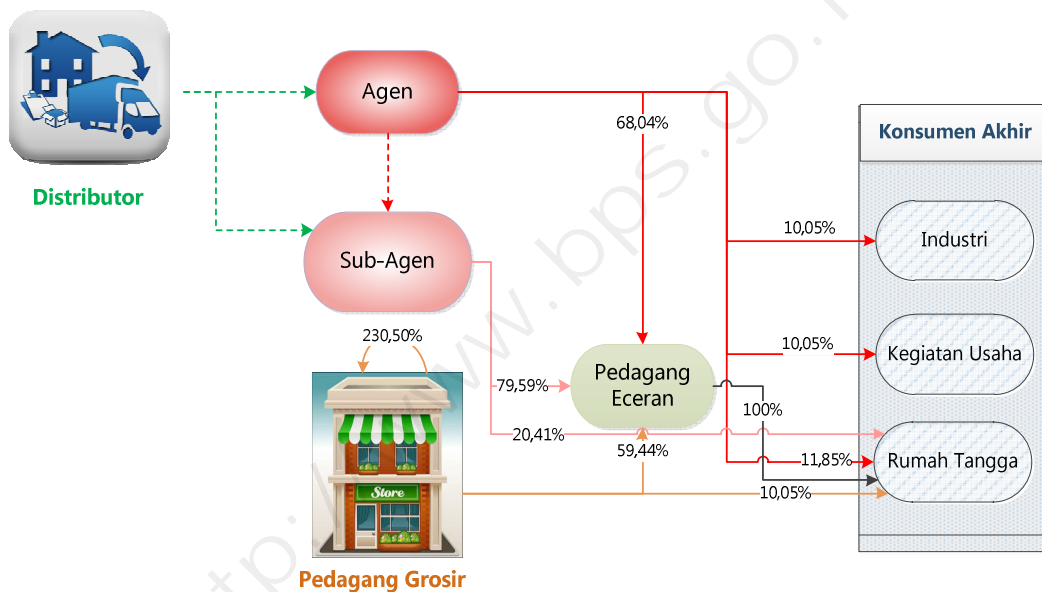
Gambar 64. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa semua pasokan bawang merah diperoleh dari luar provinsi Kalimantan Tengah. Pasokan bawang merah terbesar diperoleh dari Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 42,20 persen, disusul dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 24,04 persen dan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 17,39 persen. Selebihnya pasokan bawang merah di Kalimantan Tengah diperoleh dari Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan sebagian lainnya diimpor dari Thailand. Bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi permintaan

masyarakat di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

2.22.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan fungsi usaha seperti agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Agen dan sub agen mendapat pasokan dari distributor. Baik agen, sub agen maupun pedagang grosir ketiganya menyalurkan sebagian besar pasokannya melalui pedagang eceran. Sedang sebagian kecil lainnya disalurkan langsung ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 65. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Tengah

2.22.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp262,64 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp80,43 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp244,42 juta dengan rasio marjin sebesar 21,57 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 21,57 persen.

Tabel 23. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Kalimantan Tengah

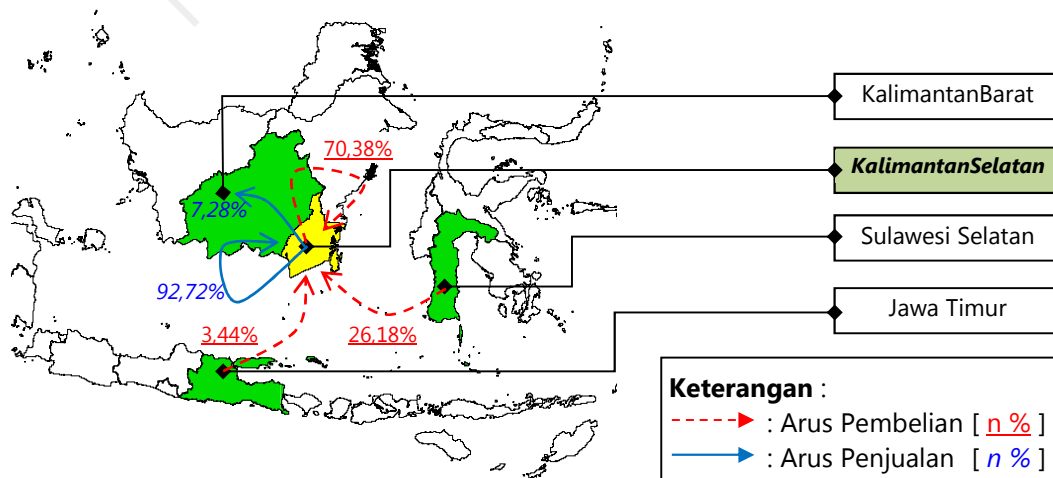
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.509.721,67	616.630,00	1.420.412,50
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.199.528,89	536.200,00	1.133.196,00
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	53.495,00	-	53.495,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	310.192,78	80.430,00	287.216,50
Rasio MPP (%)	25,86	15,00	25,35
Rata-rata MP (000 Rp)	262.641,67	80.430,00	244.420,50
Rasio MP (%)	21,90	15,00	21,57

2.23 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin.

2.23.1 Peta Distribusi Perdagangan

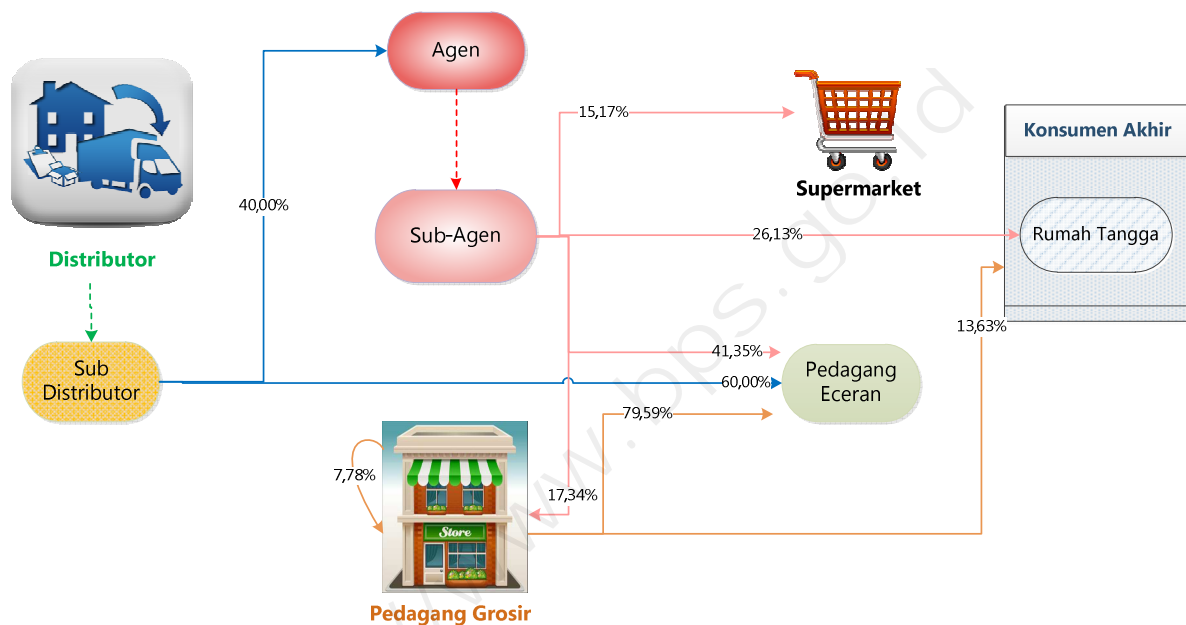
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa sebagian besar pasokan bawang merah diperoleh dari dalam provinsi Kalimantan Selatan sendiri (70,38%). Selain itu, pasokan bawang merah di Kalimantan Selatan juga diperoleh dari Sulawesi Selatan (26,18%) dan dari Jawa Timur (3,44%). Bawang merah tersebut kemudian dijual sebagian besar untuk memenuhi permintaan masyarakat di dalam Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 92,72 persen, dan sisanya dijual ke Kalimantan Barat (7,28%). Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 66. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Selatan

2.23.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan fungsi usaha seperti sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir hanya terdiri dari rumah tangga. Jalur perdagangan berawal dari sub distributor yang mendapat pasokan dari distributor yang kemudian memasarkan bawang merah yang sudah didapat ke agen dan ke pedagang eceran. Jalur lainnya sub agen memasarkan bawang merah yang didapat dari agen ke pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket dan sebagian lainnya langsung ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 67. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Selatan

2.23.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Tabel 24. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.888.565,80	-	1.888.565,80
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.728.978,80	-	1.728.978,80
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	72.129,71	-	72.129,71
Rata-rata MPP (000 Rp)	159.587,00	-	159.587,00
Rasio MPP (%)	9,23	-	9,23
Rata-rata MP (000 Rp)	109.096,20	-	109.096,20
Rasio MP (%)	6,31	-	6,31

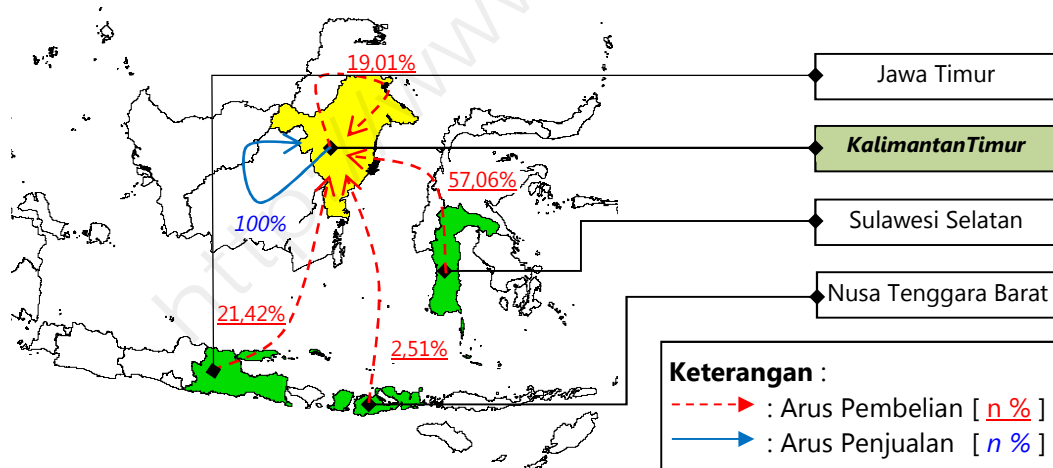
Berdasarkan data survei diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp109,10 juta. Sementara itu, data survei tidak menangkap adanya kegiatan perdagangan eceran sehingga data terkait MP di level PE pun tidak tersedia. Dengan demikian, rasio MP yang diperoleh secara keseluruhan adalah 6,31 persen, yang berarti keuntungan rata-rata yang diambil sekitar 6,31 persen.

2.24 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

2.24.1 Peta Distribusi Perdagangan

Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa sebagian besar pasokan bawang merah diperoleh dari luar provinsi Kalimantan Timur. Data survei menunjukkan bahwa 57,06 persen stok bawang merah di provinsi Kalimantan Timur diperoleh dari Sulawesi Selatan sebagai provinsi terdekat dari Kalimantan Timur, sementara sisanya dipasok dari Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan sebagian lainnya dari dalam Provinsi Kalimantan Timur sendiri. Bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi permintaan masyarakat di dalam Provinsi Kalimantan Timur. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Kalimantan Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 68. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Timur

2.24.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan fungsi usaha seperti sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, supermarket dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir hanya terdiri dari rumah tangga. Dari hasil survei diketahui bahwa ada porsi stok bawang merah di pedagang besar yang langsung di jual langsung ke konsumen

akhir. Sebagai contoh agen yang menjual 25,00 persen pasokan bawang yang diterimanya dari produsen langsung ke rumah tangga. Begitu juga dengan sub agen yang menjual 40,00 persen dari stoknya dan sub distributor yang menjual 25,00 persen dari stoknya langsung ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 69. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Timur

2.24.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Tabel 25. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Kalimantan Timur

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.256.293,33	-	1.256.293,33
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.050.423,67	-	1.050.423,67
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	144.000,00	-	144.000,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	205.869,67	-	205.869,67
Rasio MPP (%)	19,60	-	19,60
Rata-rata MP (000 Rp)	181.869,67	-	181.869,67
Rasio MP (%)	17,31	-	17,31

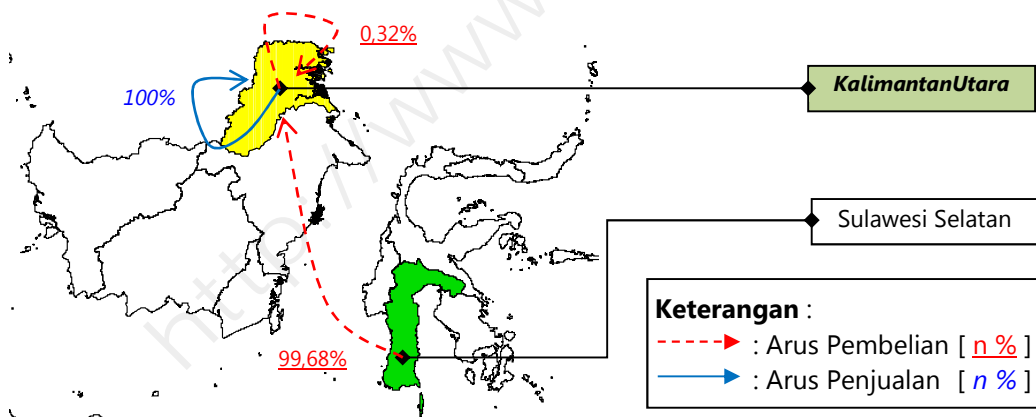
Berdasarkan data survei diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp181,87 juta. Sementara itu, data survei tidak menangkap adanya kegiatan perdagangan eceran sehingga data terkait MP di level PE pun tidak tersedia. Dengan demikian, rasio MP yang diperoleh secara keseluruhan adalah 17,31 persen, yang berarti keuntungan rata-rata yang diambil sekitar 6,31 persen.

2.25 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

2.25.1 Peta Distribusi Perdagangan

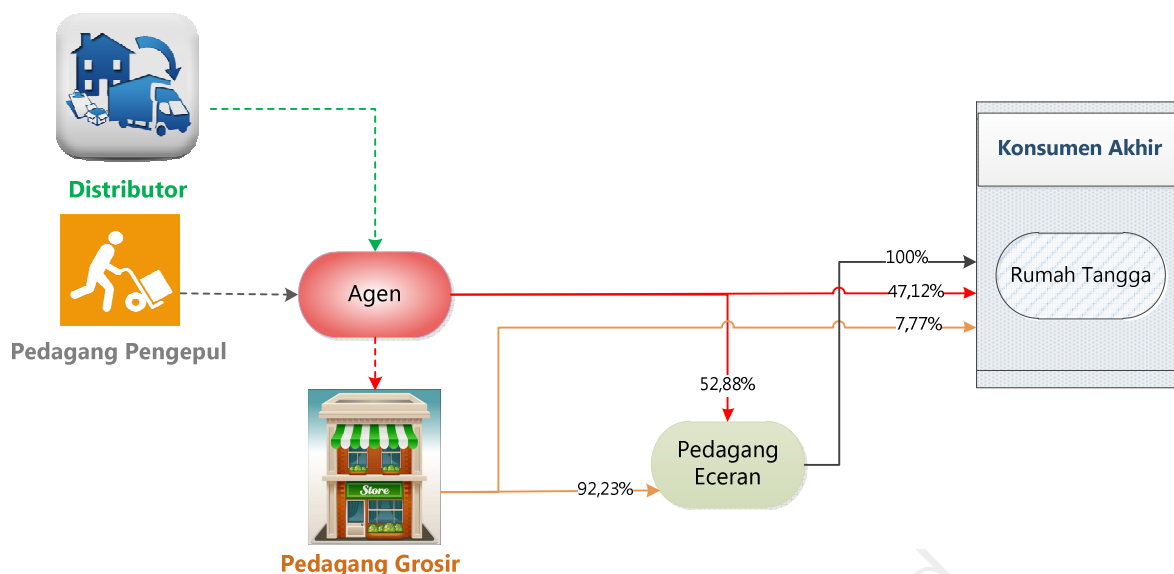
Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa sebagian besar pasokan bawang merah diperoleh dari luar Provinsi Kalimantan Utara. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 99,68 persen stok bawang merah di Provinsi Kalimantan Utara diperoleh dari Sulawesi Selatan. Sementara sisanya (0,32%) diperoleh dari dalam wilayah Kalimantan Utara sendiri. Bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi permintaan masyarakat di dalam Provinsi Kalimantan Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Kalimantan Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 70. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Utara

2.25.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi bawang merah di Provinsi Kalimantan Utara nampak relatif sederhana. Pedagang besar hanya diwakili oleh agen dan pedagang grosir. Keduanya menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran. Sedang sebagian kecil lainnya di pasarkan secara langsung ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 71. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Kalimantan Utara

2.25.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp546,06,96 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp5,07 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp391,49 juta dengan rasio marjin sebesar 26,87 persen. Ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 26,87 persen.

Tabel 26. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Kalimantan Utara

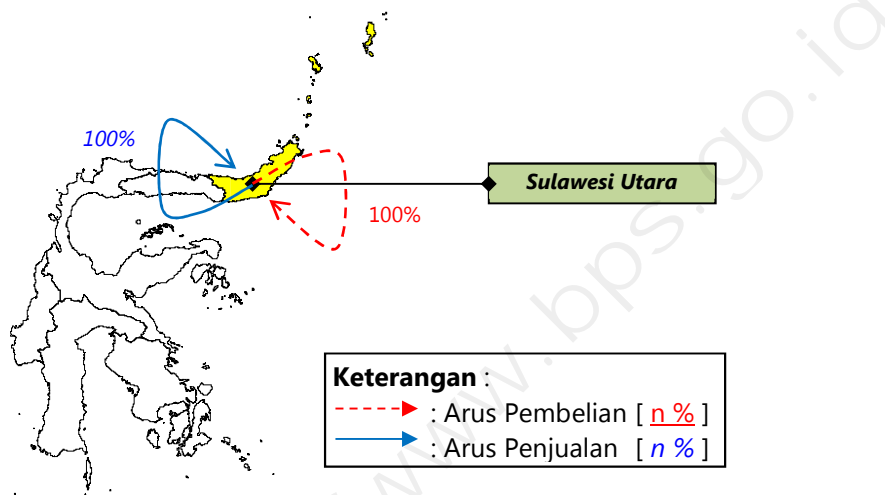
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.589.162,00	21.770,00	1.855.621,43
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.032.898,00	16.697,00	1.456.840,57
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	17.000,00	-	17.000,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	556.264,00	5.073,00	398.780,86
Rasio MPP (%)	27,36	30,38	27,37
Rata-rata MP (000 Rp)	546.064,00	5.073,00	391.495,14
Rasio MP (%)	26,86	30,38	26,87

2.26 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa dan Kota Manado.

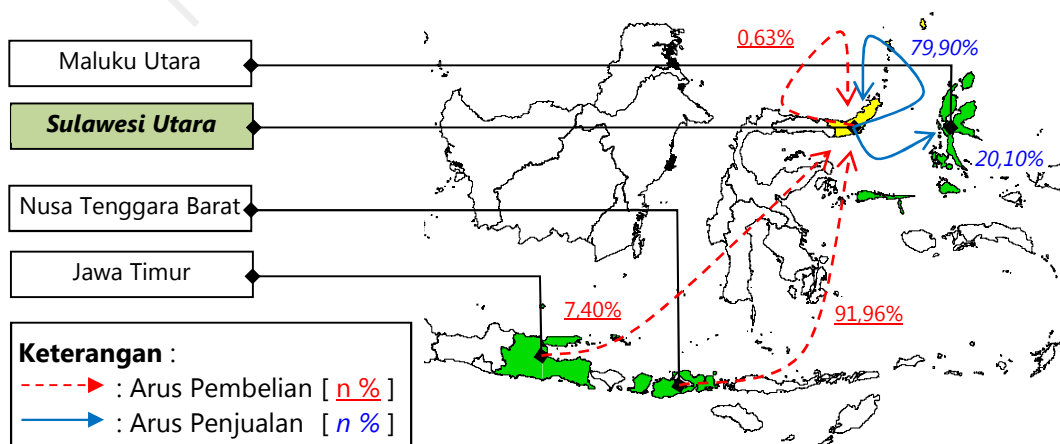
2.26.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Sulawesi Utara memperoleh keseluruhan bibit bawang merah dari dalam wilayah Sulawesi Utara sendiri. Hasil produksi bawang merah tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan lokal provinsi Sulawesi Utara. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 72. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara

Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa mayoritas pasokan (91,96%) bawang merah diperoleh dari provinsi Nusa Tenggara Barat.

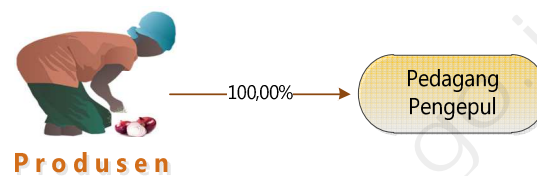


Gambar 73. Peta Penjualan Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara

Sedangkan sebagian kecil lainnya dipasok dari Jawa Timur (7,40%) dan juga dari dalam wilayah Sulawesi Utara sendiri (0,63%). Bawang merah tersebut kemudian dijual sebanyak 79,90 persen ke dalam wilayah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu sebanyak 20,10 persen sisanya dipasarkan ke provinsi terdekat yaitu Maluku Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 73.

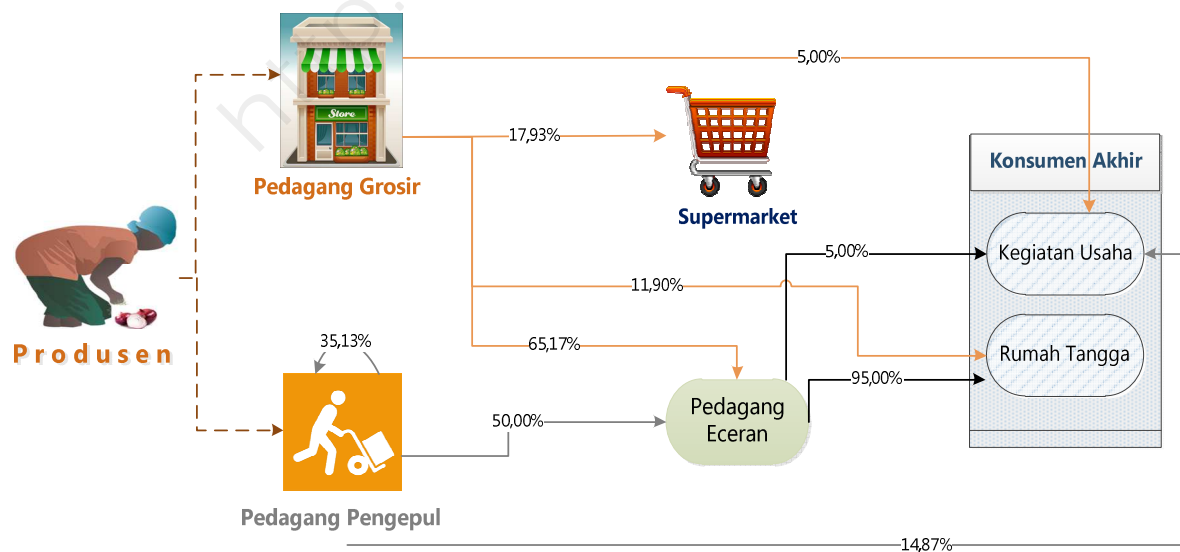
2.26.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Sulawesi Utara seluruhnya dijual melalui pedagang pengepul sebelum akhirnya nanti diperdagangkan di pasaran. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 74. Pola Distribusi Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara melibatkan fungsi usaha pedagang grosir, dan pedagang pengepul. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga. Dari hasil survei terlihat bahwa pedagang grosir mendapat pasokan bawang merah dari produsen. Selanjutnya pasokan di pasarkan sebagian besar ke pedagang eceran. Selebihnya, sebagian kecil dijual ke sesama supermarket dan langsung ke konsumen akhir.



Gambar 75. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Utara

Sementara itu, untuk pedagang pengepul sebagian besar dipasarkan ke pedagang eceran. Sebagian lainnya dijual ke sesama pedagang pengepul dan sebagian kecil lainnya langsung ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap disajikan pada Gambar 75.

2.26.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp589,45 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp24,48. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp508,39 juta dengan rasio marjin sebesar 23,23 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 23,23 persen.

Tabel 27. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.374.104,17	176.400,00	2.917.289,29
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.531.041,67	136.080,00	2.188.904,29
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	254.016,67	15.840,00	219.991,43
Rata-rata MPP (000 Rp)	843.062,50	40.320,00	728.385,00
Rasio MPP (%)	33,31	29,63	33,28
Rata-rata MP (000 Rp)	589.045,83	24.480,00	508.393,57
Rasio MP (%)	23,27	17,99	23,23

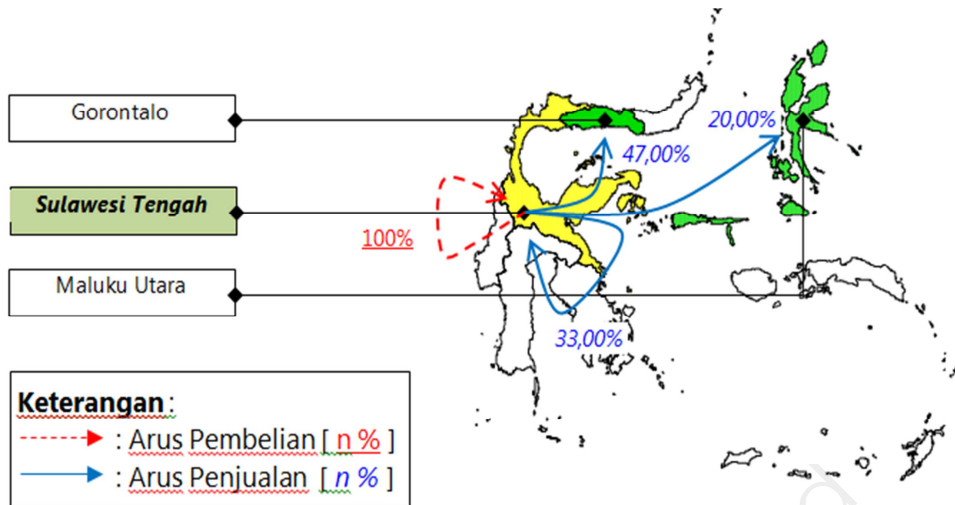
2.27 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Banggai, Parigi Moutong, dan Kota Palu.

2.27.1 Peta Distribusi Perdagangan

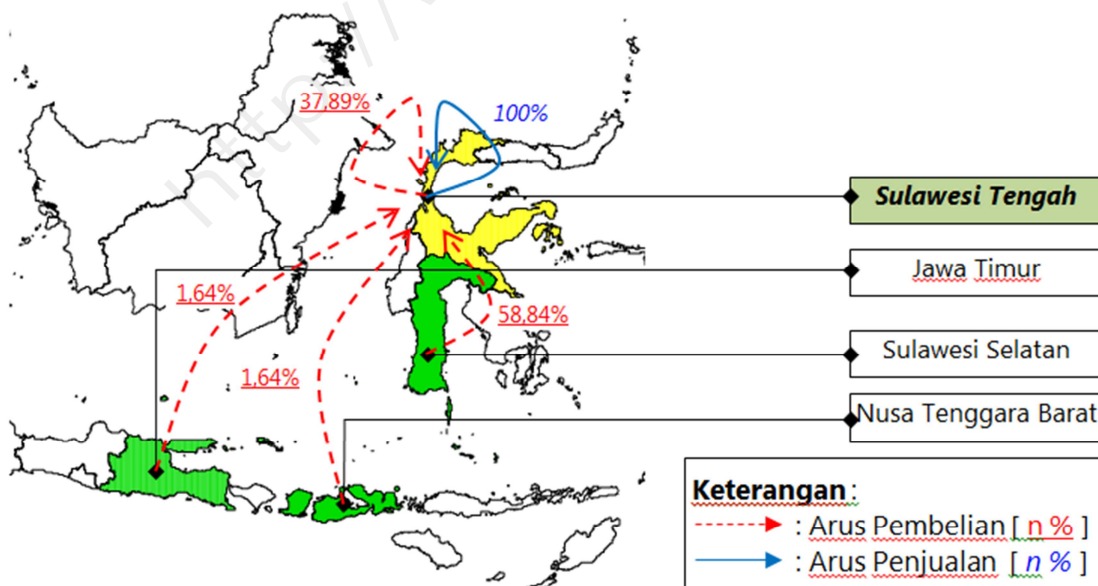
Berdasarkan hasil survei, petani bawang merah di Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh keseluruhan bibit bawang merah dari dalam wilayah Sulawesi Tengah sendiri. Hasil produksi bawang merah tersebut kemudian dijual sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan lokal provinsi Sulawesi Tengah. Sementara sebagian besar lainnya dijual ke Gorontalo (47,00%) dan Maluku Utara (20,00%). Secara umum lingkup arus penjualan hasil produksi bawang merah berada di area terdekat dari

Provinsi Sulawesi Tengah saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas bawang merah di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 76. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah

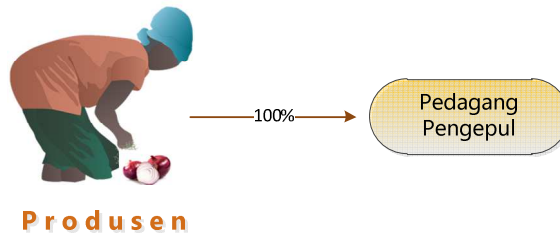
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa mayoritas pasokan (58,84%) bawang merah diperoleh dari provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan sebagian kecil lainnya dipasok dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan persentase masing-masing 1,64 persen, sementara sisanya mampu disuplai oleh pedagang lokal. Dari sisi penjualan, bawang merah tersebut kemudian dijual sebanyak seluruhnya ke dalam wilayah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 77. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah

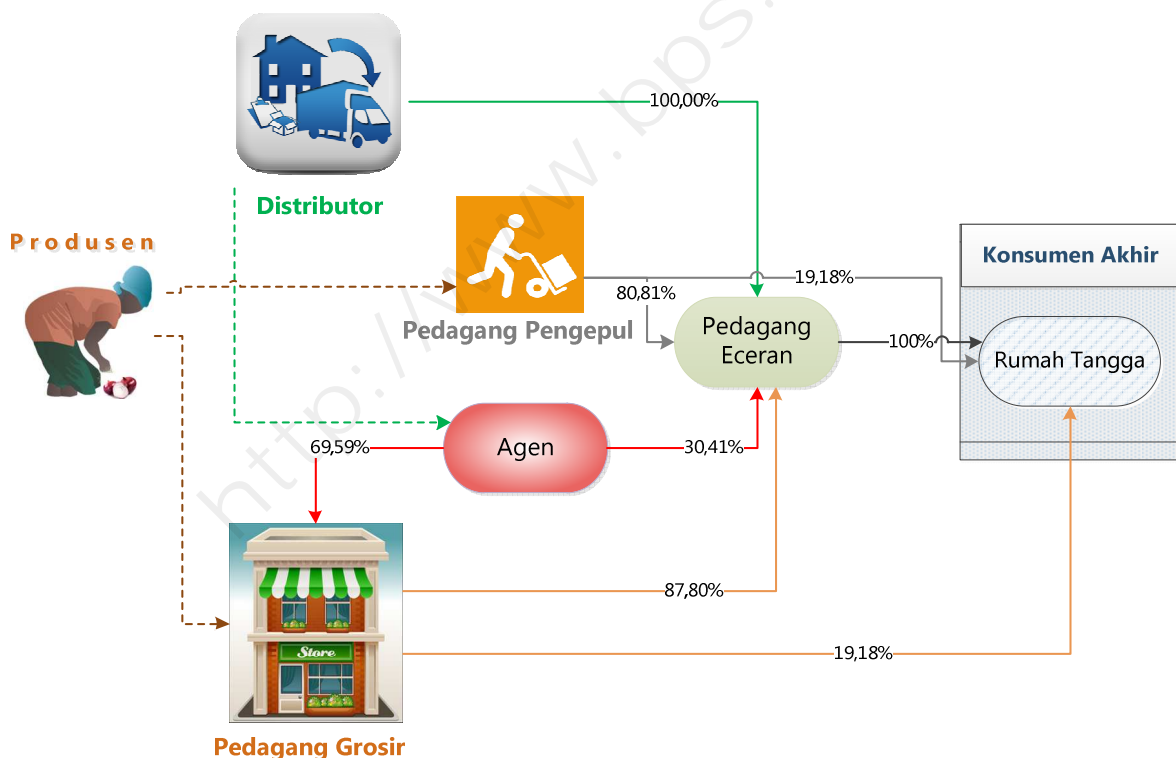
2.27.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh keterangan bahwa bawang merah yang diproduksi di Provinsi Sulawesi Tengah seluruhnya dijual ke pedagang pengepul saja. Pola tersebut tersaji pada gambar di bawah ini:



Gambar 78 Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah

Dari sisi perdagangan, Gambar 79 menunjukkan bahwa distribusi bawang merah di Provinsi Sulawesi Tengah tampak cukup sederhana. Distribusi tersebut melibatkan beberapa fungsi usaha seperti distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Gambar 79. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tengah

Sedangkan untuk level konsumen akhir, terdiri dari hanya rumah tangga saja. Jalur perdagangan berawal dari distributor, pedagang pengepul, dan pedagang grosir yang memasarkan sebagian besar pasokan bawang merahnya ke pedagang eceran. Selanjutnya PE sebagai mediator dari level pedagang besar ke konsumen akhir, menjual seluruh stok yang didapatkan sebelumnya ke rumah tangga.

2.27.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp589,05 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp24,48 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp508,39 juta dengan rasio marjin sebesar 23,23 persen, yang berarti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 23,23 persen.

Tabel 28. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Sulawesi Tengah

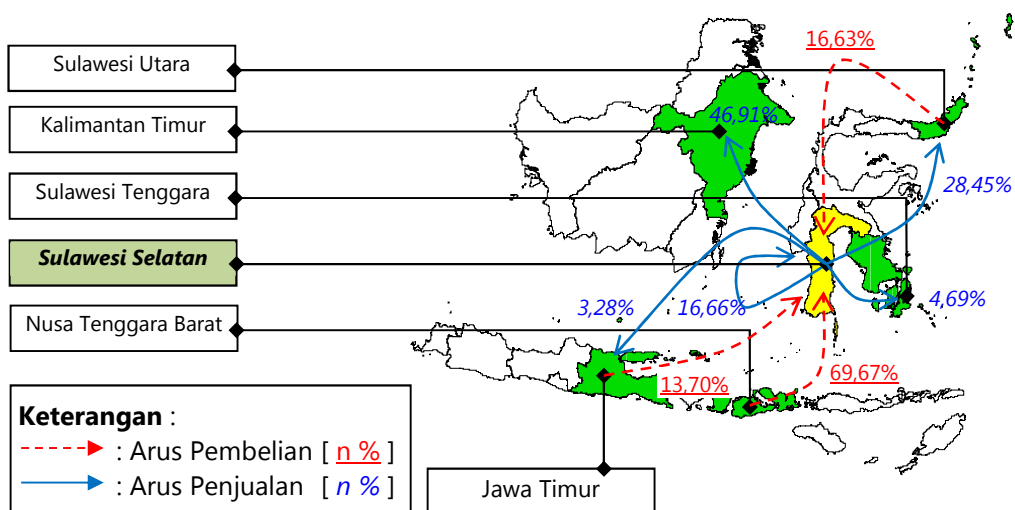
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.374.104,17	176.400,00	2.917.289,29
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.531.041,67	136.080,00	2.188.904,29
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	254.016,67	15.840,00	219.991,43
Rata-rata MPP (000 Rp)	843.062,50	40.320,00	728.385,00
Rasio MPP (%)	33,31	29,63	33,28
Rata-rata MP (000 Rp)	589.045,83	24.480,00	508.393,57
Rasio MP (%)	23,27	17,99	23,23

2.28 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kota Makasar dan Kota Palopo.

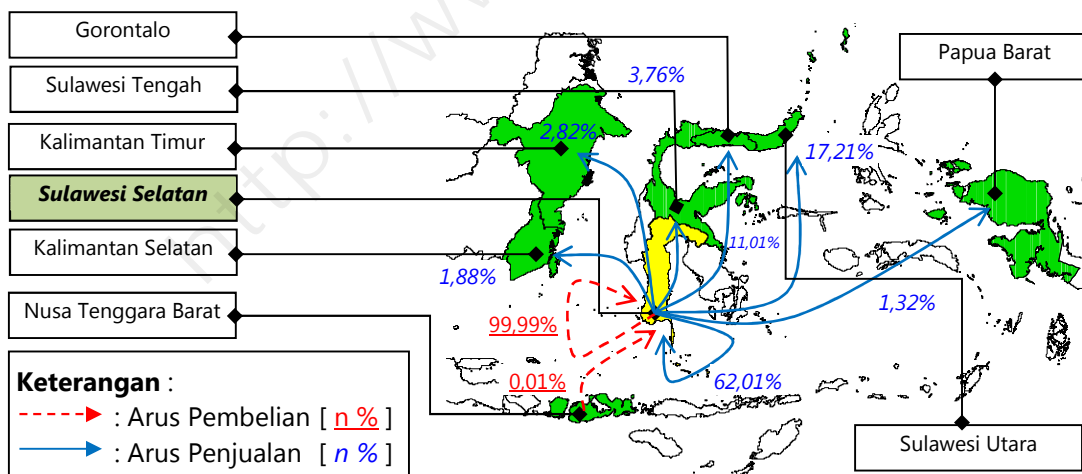
2.28.1 Peta Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan bahwa petani bawang merah memperoleh bibit tanaman bawang merah dari luar wilayah Sulawesi Selatan. Pasokan terbesar berasal dari Nusa Tenggara Barat, yaitu 69,67 persen. Sedang sisanya berasal dari Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Selanjutnya produksi bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan disebarkan ke dalam wilayahnya sendiri sebesar 16,66 persen. Selebihnya disebarkan ke beberapa propinsi terdekat seperti, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Pasakon bawang merah di Sulawesi Selatan paling banyak dijual ke Kalimantan Timur, yaitu sebesar 46,91 persen. Berikut peta distribusi penjualan produksi bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan:



Gambar 80. Peta Distribusi Penjualan Produksi Bawang Merah Provinsi Sulawesi Selatan

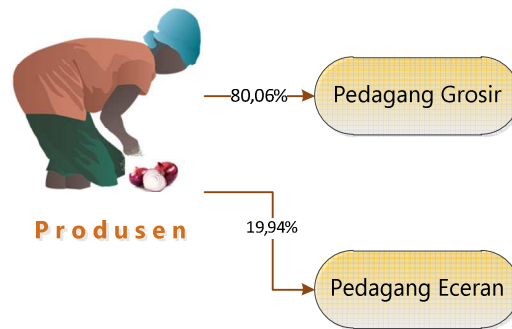
Dari sisi perdagangan, diketahui bahwa sebagian besar pasokan bawang merah yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari dalam wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian kecil pasokan lainnya diperoleh dari Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 0,01%. Distribusi pasokan bawang merah juga lebih banyak dipasarkan ke dalam Provinsi Sulawesi Selatan (62,01%). Sedangkan sisanya dipasarkan ke beberapa provinsi sekitar seperti Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Gambaran distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada peta sebagai berikut:



Gambar 81. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Selatan

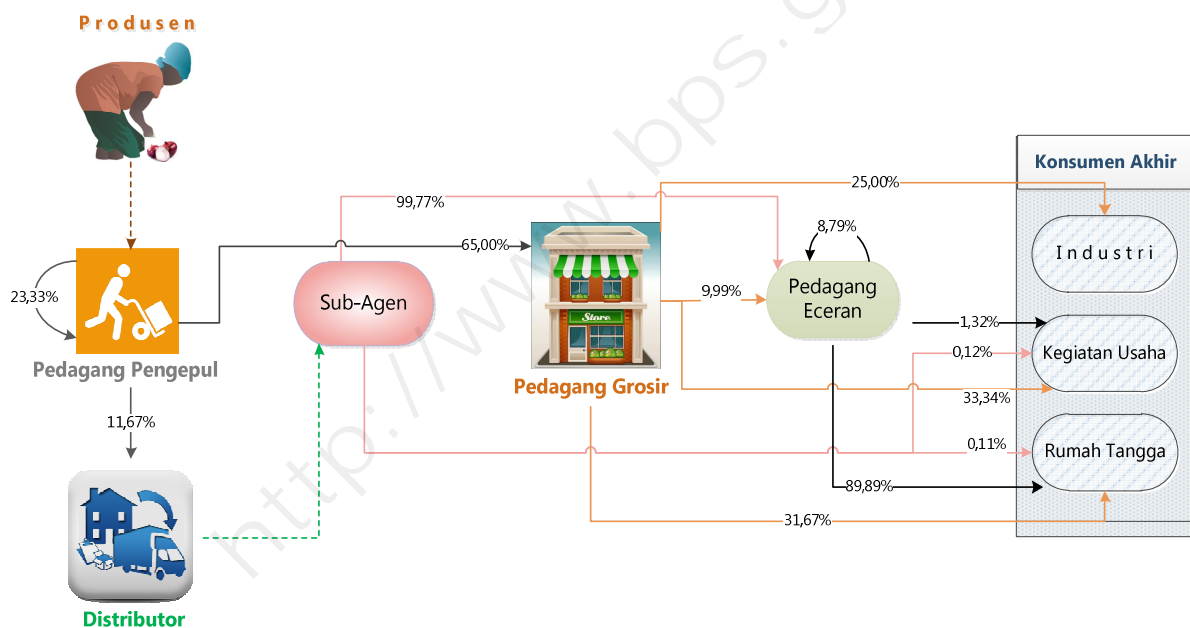
2.28.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh pola bahwa bawang merah hasil produksi di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar dijual petani melalui pedagang grosir dan sebagian kecil lainnya melalui pedagang eceran. Pola tersebut tersaji pada Gambar 82.



Gambar 82. Pola Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan pedagang pengepul sebagai jalur awal setelah produsen. Dari pedagang pengepul tersebut, kemudian pasokan bawang merah sebagian besar dijual melalui pedagang grosir (65,00%). Selanjutnya pedagang grosir yang akan meneruskan ke pedagang eceran atau langsung dijual ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 83. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Selatan

2.28.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh nilai rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp241,32 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp26,27. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp114,82 juta dengan rasio marjin sebesar 7,34 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah di Sulawesi Selatan secara rata-rata mengambil keuntungan sebesar 7,34 persen.

Tabel 29. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Sulawesi Selatan

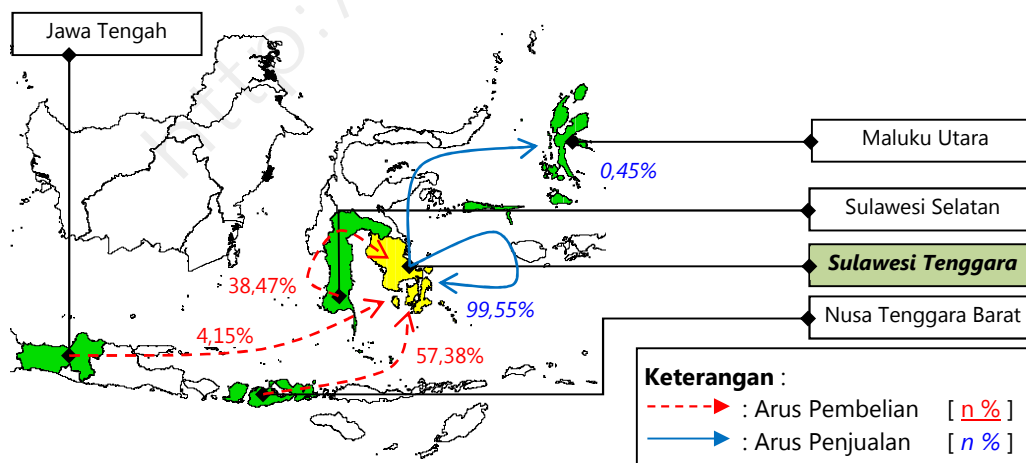
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.940.247,29	129.007,50	1.698.341,53
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	3.652.785,71	102.135,80	1.564.168,12
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	161.500,00	2.000,00	65.800,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	287.461,57	26.871,70	134.173,41
Rasio MPP (%)	7,87	26,31	8,58
Rata-rata MP (000 Rp)	241.318,71	26.271,70	114.820,47
Rasio MP (%)	6,61	25,72	7,34

2.29 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, dan Kota Kendari.

2.29.1 Peta Distribusi Perdagangan

Data survei menangkap bahwa untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan bawang merah di Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Tengah.

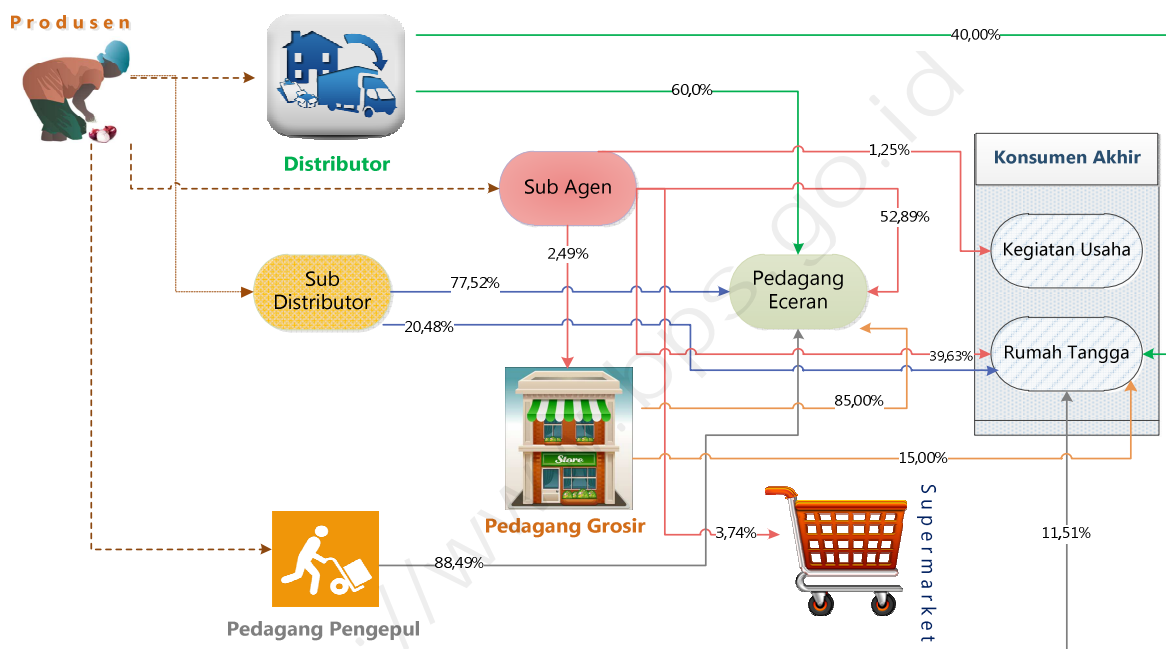


Gambar 84. Peta Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasokan bawang merah tersebut sebagian besar didistribusikan ke wilayah sendiri yaitu sebesar 99,55 persen dan sisanya (0,45%) didistribusikan ke Provinsi Maluku Utara. Peta distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 84.

2.29.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Tenggara diawali dari 4 fungsi usaha, yaitu distributor, sub distributor, sub agen dan pedagang pengumpul. Baik distributor, sub distributor dan pedagang pengepul ketiganya menyalurkan pasokan bawang yang ada melalui pedagang eceran dan sebagian lainnya disalurkan langsung ke konsumen akhir. Sedangkan untuk sub agen, selain menyalurkan pasokan bawang merah ke pedagang pengecer dan konsumen akhir, sub agen juga memasarkan bawang merahnya melalui pedagang grosir maupun supermarket. Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 85. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.29.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp112,69 juta. Sementara itu, hasil survei tidak menangkap adanya kegiatan perdagangan eceran sehingga rata-rata MP untuk PE tidak diketahui. Jadi, secara keseluruhan pedagang bawang merah mengambil di Sulawesi Tenggara meraup keuntungan rata-rata sebesar 17.35 persen.

Tabel 30. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Sulawesi Tenggara

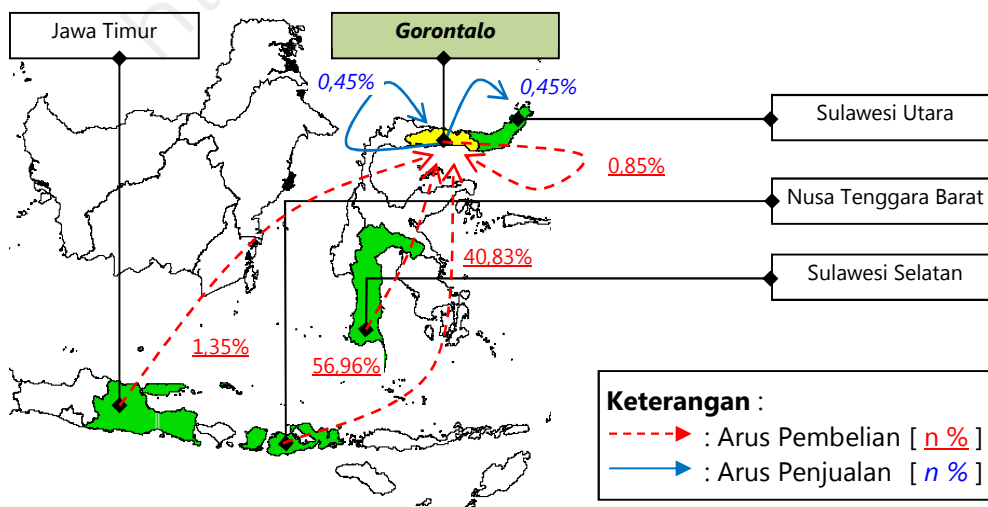
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	785.158,11	-	785.158,11
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	649.375,00	-	649.375,00
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	23.088,89	-	23.088,89
Rata-rata MPP (000 Rp)	135.783,11	-	135.783,11
Rasio MPP (%)	20,91	-	20,91
Rata-rata MP (000 Rp)	112.694,22	-	112.694,22
Rasio MP (%)	17,35	-	17,35

2.30 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

2.30.1 Peta Distribusi Perdagangan

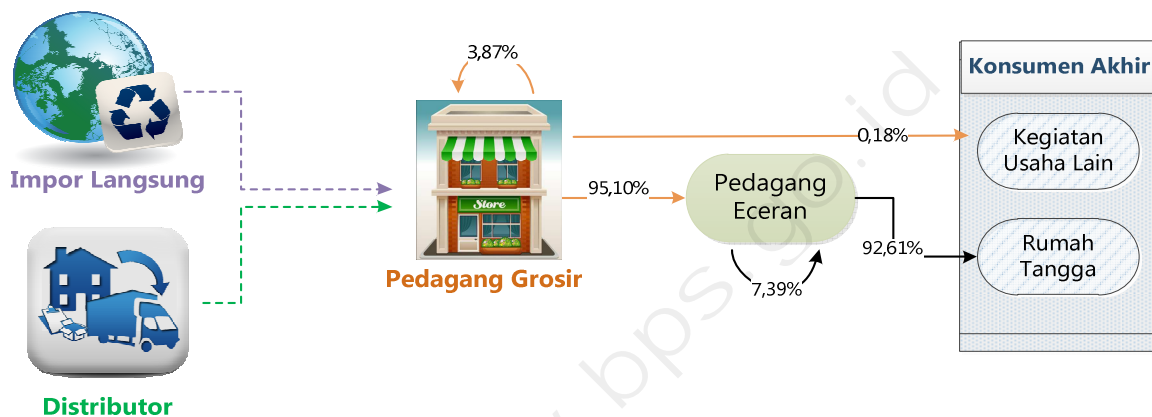
Berdasarkan hasil survei, dari sisi perdagangan pasokan bawang merah yang ada di Provinsi Gorontalo sebagian besar berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Pasokan terbesar selanjutnya diperoleh dari Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar 40,83 persen dan sisanya berasal dari Provinsi Jawa Timur serta dari dalam Provinsi Gorontalo sendiri. Sedang untuk penjualan, seluruhnya dipasarkan di dalam Provinsi Gorontalo itu sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Gorontalo secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 86. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Gorontalo

2.30.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Gorontalo melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lain, dan rumah tangga. Dari hasil survei terlihat bahwa pedagang grosir mendapat pasokan bawang merah dari impor langsung dan dari distributor. Selanjutnya pasokan di pasarkan sebagian besar ke pedagang eceran. Selebihnya, sebagian kecil dijual ke sesama pedagang grosir dan langsung ke konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lain. Sedangkan untuk pedagang eceran sebagian besar dipasarkan ke rumah tangga, dan sebagian kecil ke sesama pedagang eceran. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 87. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Gorontalo

2.30.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp2,64milyar sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp29,62 juta.

Tabel 31. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Gorontalo

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	13.909.588,50	136.262,50	10.466.257,00
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	11.034.474,67	101.268,00	8.301.173,00
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	280.660,00	5.375,00	202.007,14
Rata-rata MPP (000 Rp)	2.875.113,83	34.994,50	2.165.084,00
Rasio MPP (%)	26,06	34,56	26,08
Rata-rata MP (000 Rp)	2.641.230,50	29.619,50	1.988.327,75
Rasio MP (%)	23,94	29,25	23,95

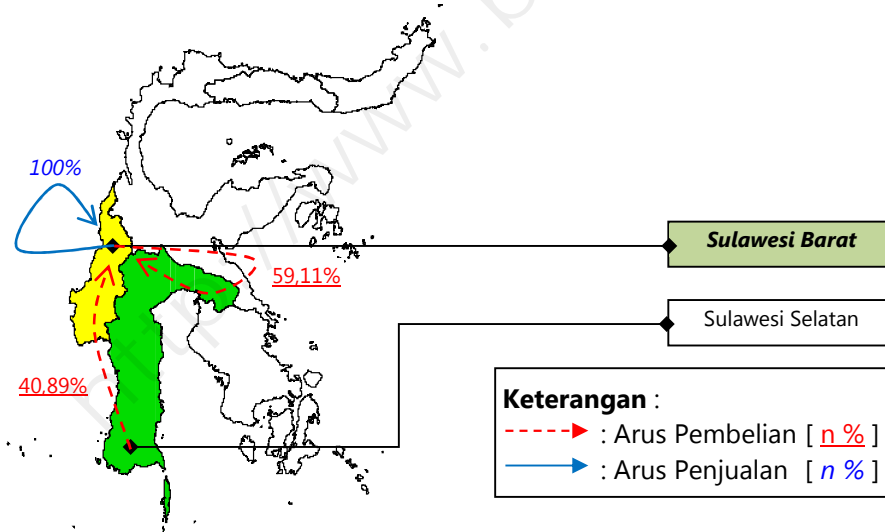
Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp1,98 juta dengan rasio margin sebesar 23,95 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 23.95 persen.

2.31 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju.

2.31.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, dari sisi perdagangan pasokan bawang merah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Barat sendiri. Selain itu pasokan bawang merah juga berasal dari provinsi sekitar yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 40,89 persen. Sedangkan untuk penjualan, seluruhnya dipasarkan di dalam Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Sulawesi Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

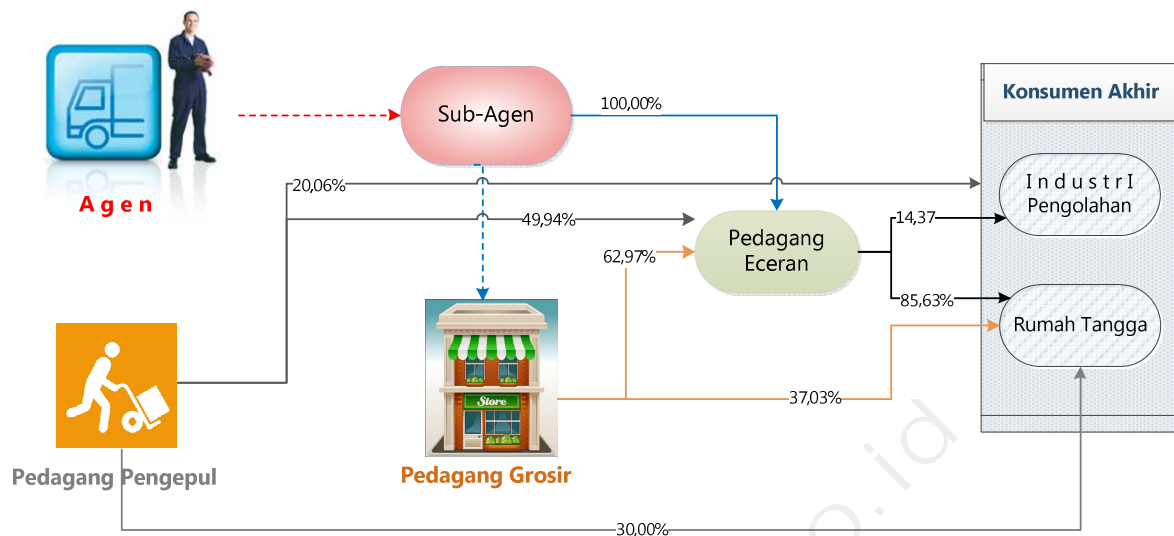


Gambar 88. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat

2.31.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Barat melibatkan fungsi usaha seperti sub agen, pedagang grosir, pedagang pengepul dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, dan rumah tangga. Jalur perdagangan bercabang dari dua jalur, yaitu melalui sub agen dan melalui pedagang pengepul. Sub Agen mendapat pasokan bawang merah dari agen, yang kemudian disalurkan ke konsumen akhir melalui pedagang eceran. Sedangkan dari jalur pedagang pengepul, komoditi bawang merah mayoritas dipasarkan ke konsumen

akhir melalui pedagang eceran dan sebagian lain dipasarkan langsung ke konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap disajikan pada gambar di



bawah ini:

Gambar 89. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat

2.31.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp17,18 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp9,66 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp14,67 juta dengan rasio marjin sebesar 19,66 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 19,66 persen.

Tabel 32. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Sulawesi Barat

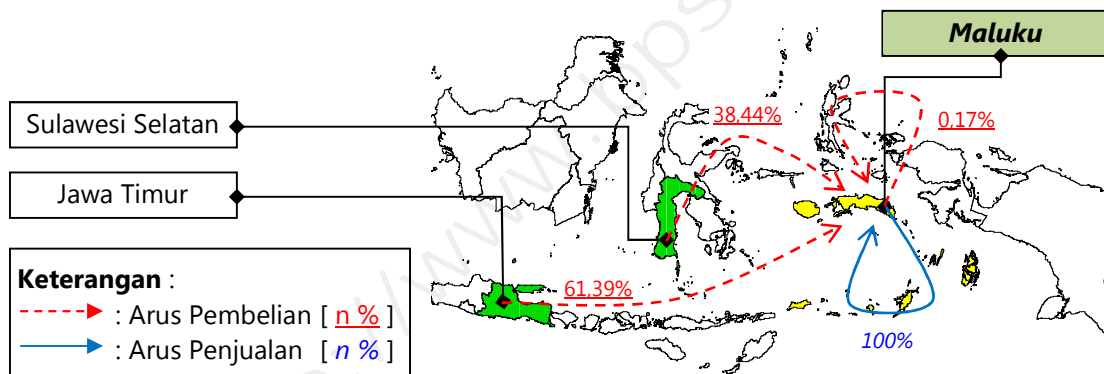
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	112.290,67	48.549,33	91.043,56
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	93.910,83	36.093,33	74.638,33
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	1.800,00	4.200,00	2.600,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	18.379,83	12.456,00	16.405,22
Rasio MPP (%)	19,57	34,51	21,98
Rata-rata MP (000 Rp)	17.179,83	9.656,00	14.671,89
Rasio MP (%)	18,29	26,75	19,66

2.32 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon.

2.32.1 Peta Distribusi Perdagangan

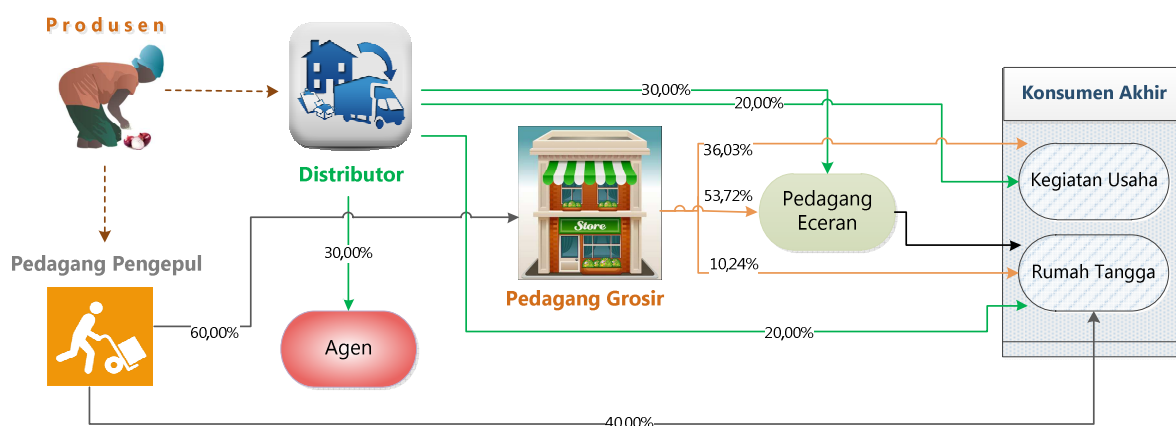
Berdasarkan hasil survei, peta distribusi dari sisi perdagangan memperlihatkan bahwa pasokan bawang merah yang ada di Provinsi Maluku berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dimana pasokan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 61,39 persen. Selain itu pasokan bawang merah juga berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 38,44 persen, dan sebagian kecil lainnya berasal dari dalam Provinsi Maluku. Sedang untuk penjualan, seluruhnya dipasarkan di dalam Provinsi Maluku itu sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Maluku secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 90. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Maluku

2.32.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Maluku melibatkan fungsi usaha seperti distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lain dan rumah tangga. Jalur awal perdagangan bercabang dari distributor dan dari pedagang pengepul. Dari distributor, pasokan bawang merah kemudian dijual ke agen, pedagang eceran, dan selebihnya langsung dijual ke konsumen akhir. Sedang jalur pedagang pengepul, distribusi bawang merah kemudian bercabang antara pedagang grosir dan konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 91. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Maluku

2.32.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp2,01milyar sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp2,25 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp1,73milyar dengan rasio marjin sebesar 30,18 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 30,18 persen.

Tabel 33. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Maluku

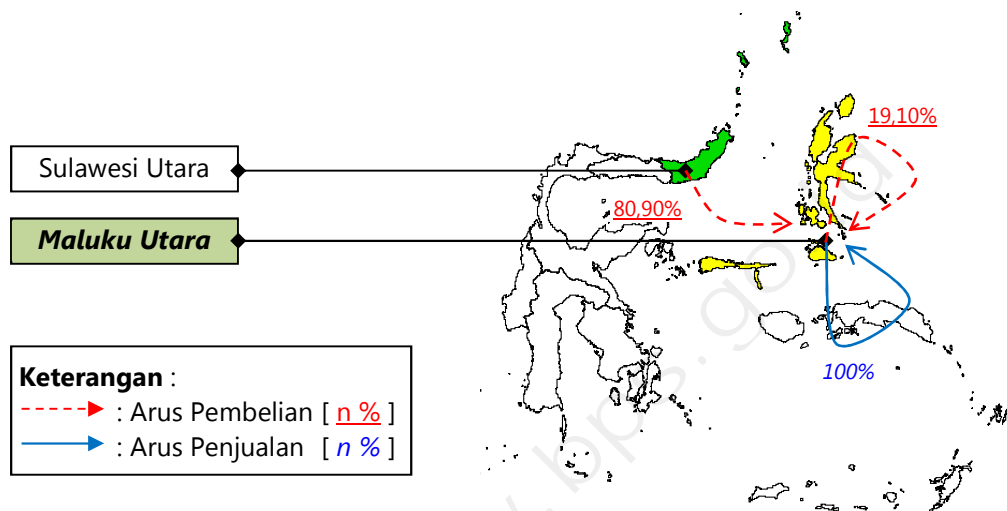
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	8.897.348,33	9.000,00	7.627.584,29
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	6.673.167,50	6.750,00	5.720.822,14
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	252.540,00	-	252.540,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	2.224.180,83	2.250,00	1.906.762,14
Rasio MPP (%)	33,33	33,33	33,33
Rata-rata MP (000 Rp)	2.013.730,83	2.250,00	1.726.376,43
Rasio MP (%)	30,18	33,33	30,18

2.33 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

2.33.1 Peta Distribusi Perdagangan

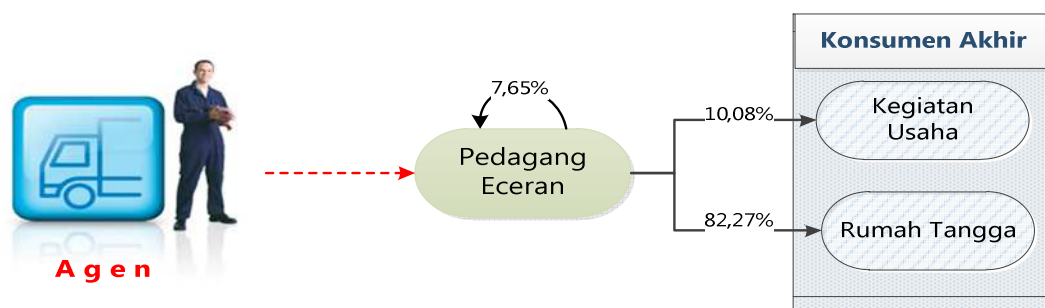
Berdasarkan hasil survei, pasokan bawang merah dari sisi pedagang di Provinsi Maluku Utara sebagian besar diperoleh dari Sulawesi Utara, yaitu sebanyak 80,90 persen. Selain itu pasokan bawang merah juga berasal dari dalam Provinsi Maluku Utara sebesar 19,10 persen. Sedang untuk penjualan, seluruhnya dipasarkan di dalam Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Papua Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 92. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Maluku Utara

2.33.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Maluku Utara tergolong sederhana, dimana pada pengamatan survei di dapati fungsi usaha yang terlibat hanya agen dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lain dan rumah tangga. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 93. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Maluku Utara

2.33.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp84,73 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp17,77 juta. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp40,10 juta dengan rasio marjin sebesar 11,74 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 11,74 persen.

Tabel 34. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Maluku Utara

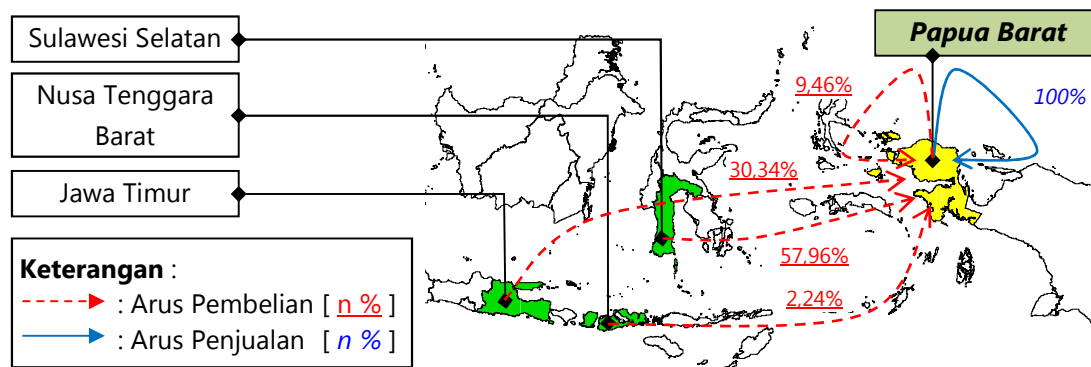
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.104.800,00	84.158,33	424.372,22
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	901.400,00	61.517,33	341.478,22
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	-	4.863,33	64.196,67
Rata-rata MPP (000 Rp)	203.400,00	22.641,00	82.894,00
Rasio MPP (%)	22,56	36,80	24,28
Rata-rata MP (000 Rp)	84.733,33	17.777,67	40.096,22
Rasio MP (%)	9,40	28,90	11,74

2.34 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

2.34.1 Peta Distribusi Perdagangan

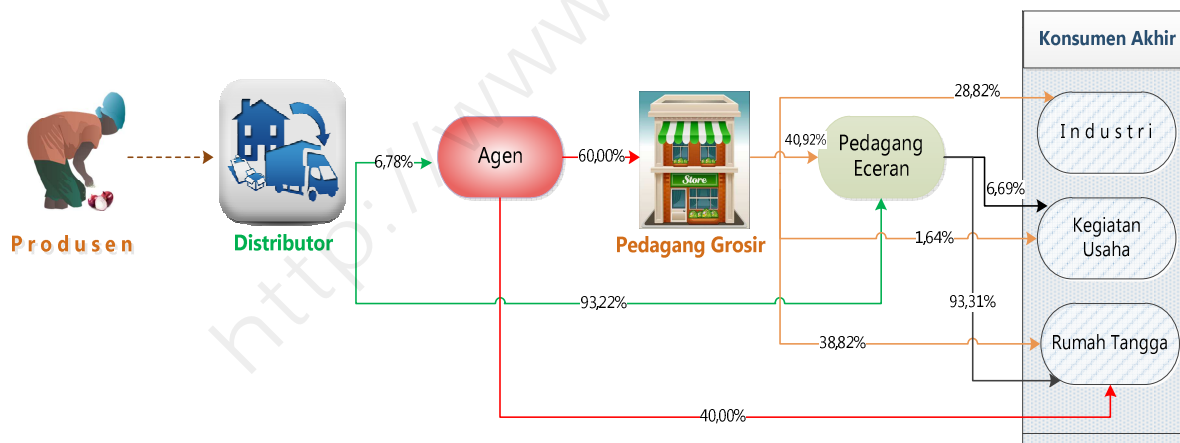
Berdasarkan hasil survei, tidak didapatkan data terkait produsen komoditi bawang merah. Sehingga peta distribusi hanya bisa terlihat dari sisi perdagangan. Pasokan bawang merah yang ada di Provinsi Papua Barat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dimana pasokan terbanyak berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 57,96 persen. Selain itu pasokan bawang merah juga berasal dari Provinsi Jawa Timur sebesar 30,34 persen, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,24 persen dan berasal dari dalam Provinsi Papua sebesar 9,46 persen. Sedang untuk penjualan, seluruhnya dipasarkan di dalam Provinsi Papua Barat itu sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Papua Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 94. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Papua Barat

2.34.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Papua Barat melibatkan fungsi usaha seperti distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari industri, kegiatan usaha dan rumah tangga. Jalur perdagangan terpanjang dimulai dari produsen - distributor - agen - pedagang grosir - pedagang eceran - konsumen akhir. Sedang jalur distribusi terpendek dari produsen - distributor - pedagang eceran - konsumen akhir. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Papua Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 95. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Papua Barat

2.34.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Data hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp490,20 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp11,17. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp272,46 juta dengan rasio marjin sebesar 33,05 persen. Angka ini berarti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 33,05 persen.

Tabel 35. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Papua Barat

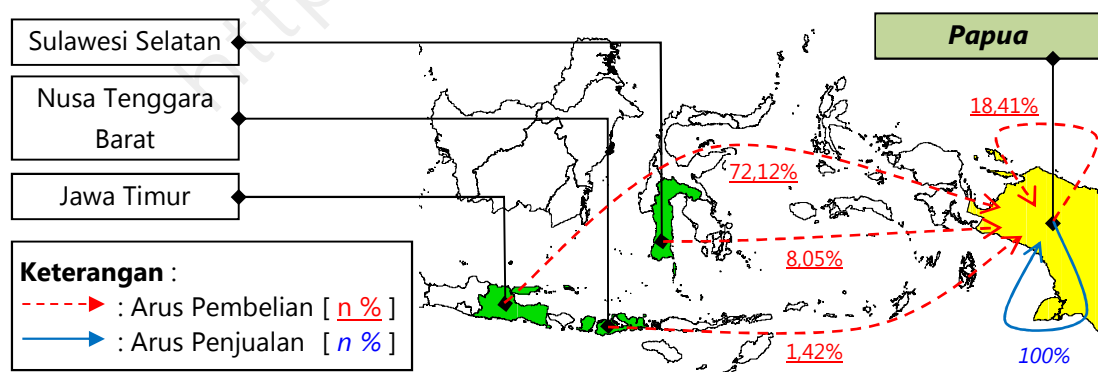
Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.173.979,33	50.090,40	1.208.575,27
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.478.716,33	38.922,00	824.264,36
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	246.080,00	-	246.080,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	695.262,83	11.168,40	384.310,82
Rasio MPP (%)	47,02	28,69	46,62
Rata-rata MP (000 Rp)	490.196,17	11.168,40	272.456,27
Rasio MP (%)	33,15	28,69	33,05

2.35 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel survei pola distribusi perdagangan komoditas bawang merah meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

2.35.1 Peta Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil survei, tidak didapatkan data terkait produsen komoditi bawang merah. Sehingga peta distribusi hanya bisa terlihat dari sisi perdagangan. Pasokan bawang merah yang ada di Provinsi Papua berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dimana pasokan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 72,12 persen.



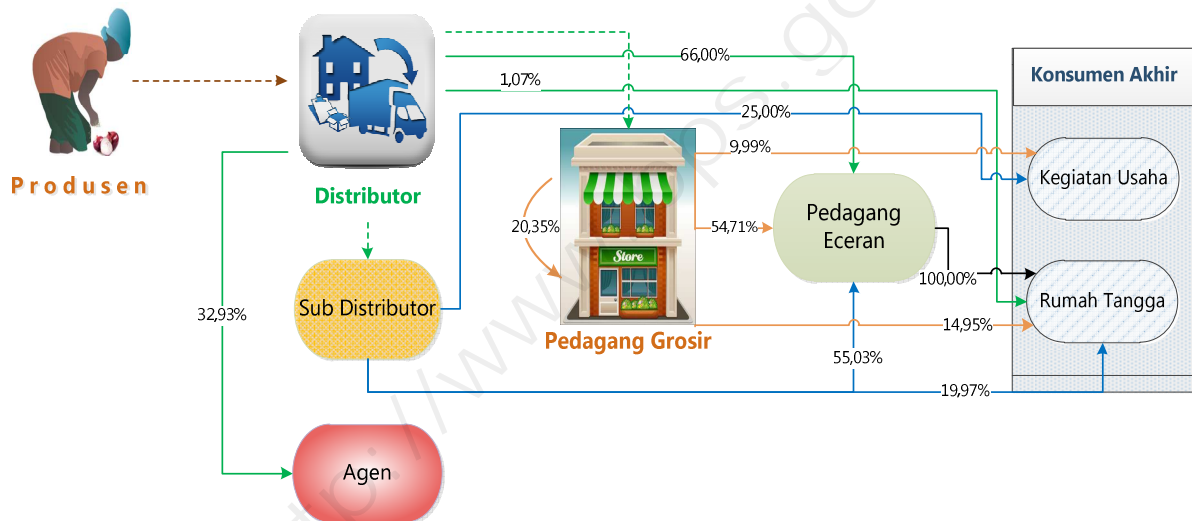
Gambar 96. Peta Penjualan Produksi Bawang Merah di Provinsi Papua

Selain itu pasokan bawang merah juga berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,05 persen, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,42 persen dan berasal dari dalam Provinsi Papua sebesar 18,41 persen. Sedang untuk penjualan, seluruhnya dipasarkan di dalam Provinsi Papua itu sendiri.

Peta wilayah distribusi perdagangan bawang merah di Papua secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 96.

2.35.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan bawang merah di Provinsi Papua melibatkan fungsi usaha seperti distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha dan rumah tangga. Jalur perdagangan berawal dari distributor yang mendapatkan pasokan bawang merah langsung dari produsen. Selanjutnya jalur perdagangan berlanjut ke agen, pedagang eceran dan sebagian kecil ke rumah tangga. Informasi mengenai jalur perdagangan dari distributor ke sub distributor dan pedagang grosir tidak tertangkap melalui sampel, akan tetapi didapatkan dari pendekatan tabel pembelian masing-masing fungsi usaha. Pola perdagangan bawang merah di Provinsi Papua secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 97. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Provinsi Papua

2.35.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

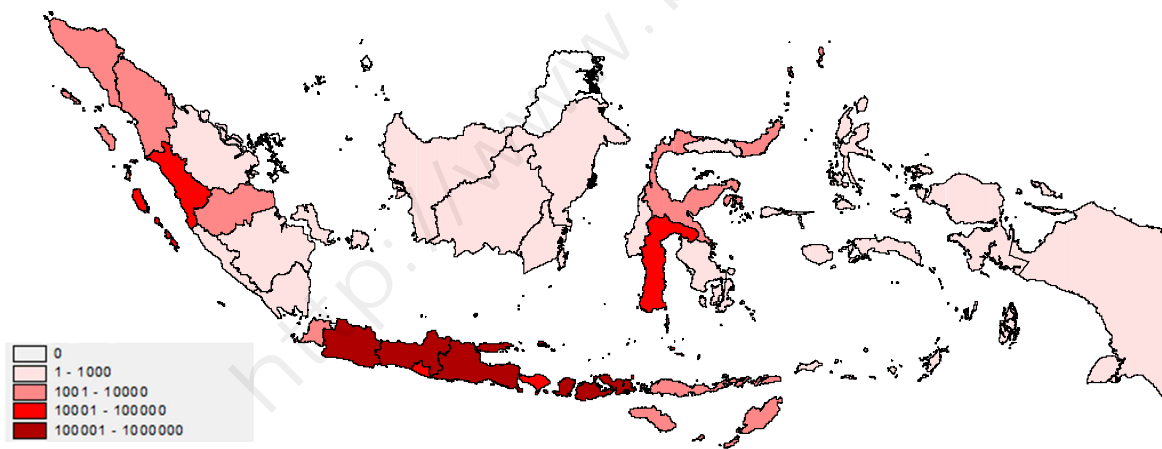
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah adalah sekitar Rp206,28 juta sedangkan rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE adalah sekitar Rp15,14. Jika digabungkan rata-rata MP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp165,33 juta dengan rasio marjin sebesar 19,10 persen. Angka ini mengandung arti bahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 19,10 persen.

Tabel 36. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Provinsi Papua

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.301.398,00	125.266,67	1.049.369,86
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.072.873,36	108.800,00	866.286,21
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	24.460,00	1.990,00	20.715,00
Rata-rata MPP (000 Rp)	228.524,55	16.466,67	183.083,57
Rasio MPP (%)	21,30	15,13	21,13
Rata-rata MP (000 Rp)	206.288,18	15.140,00	165.327,86
Rasio MP (%)	19,23	13,92	19,08

2.36 Indonesia

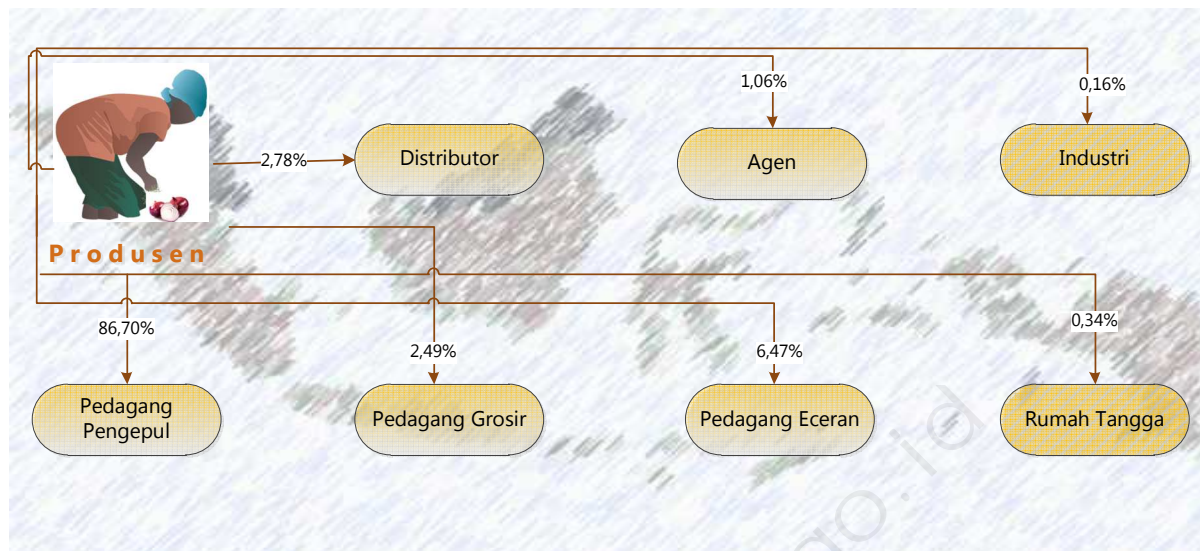
Data BPS menginformasikan bahwa pusat-pusat produksi bawang merah berada di kawasan pulau jawa, dengan produksi terbesar ada di Provinsi Jawa Tengah. Peta sentra produksi selengkapnya disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 98. Peta Sentra Produksi Bawang Merah Tahun 2014 di Indonesia

Jika ditinjau dari pola perdagangannya, hasil survei mencatat bahwa sebagian besar hasil produksi bawang merah dijual oleh petani ke pedagang pengepul. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh dari pedagang pengepul dalam distribusi bawang merah nasional cukup kuat, karena pedagang pengepul lah yang memiliki akses paling dekat terhadap penjualan hasil produksi bawang merah. Dengan kata lain, struktur perdagangan hasil panen bawang merah tergolong masih bersifat tradisional. Selain itu, pola demikian diduga akan berdampak pada tinggi rendahnya harga komoditas yang dipasarkan nanti, khususnya pada level konsumen akhir, mengingat posisi sentral pedagang pengepul sebagai fungsi lembaga dengan pembelian terbesar dari produsen. Dari data survei

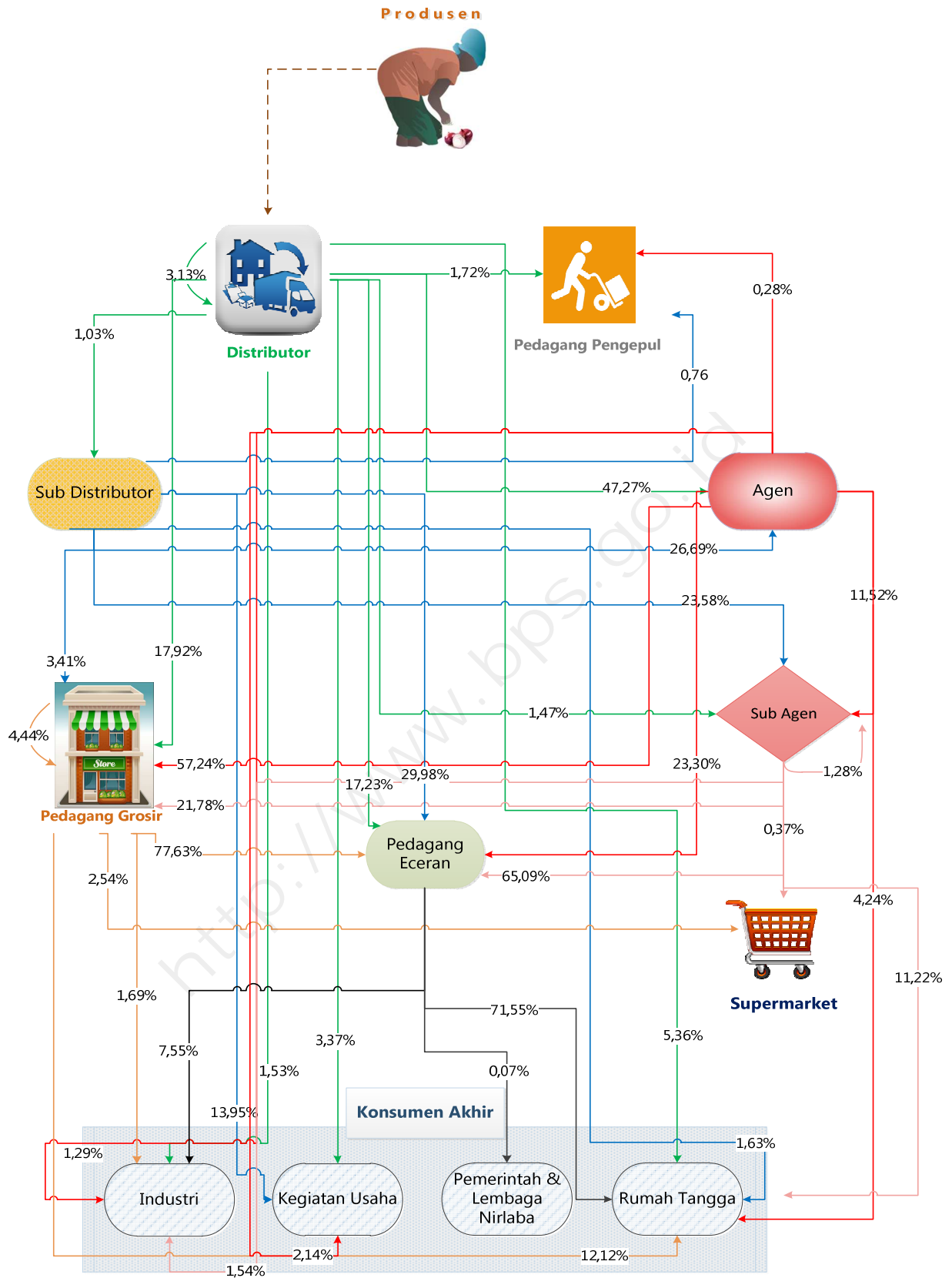
diketahui pula bahwa seluruh hasil produksi bawang merah hanya dijual di pasar domestik, tanpa diekspor ke luar negeri. Pola penjualan produksi bawang merah di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 99. Pola Penjualan Produksi Bawang merah di Indonesia

Dari sisi perdagangan, Gambar 100 memperlihatkan kompleksitas pola distribusi perdagangan antar fungsi lembaga yang terlibat. Seluruh fungsi usaha turut serta dalam rantai distribusi perdagangan bawang merah, termasuk di dalamnya ada pedagang besar yang mengimpor bawang merah dari luar negeri.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki ketersediaan stok bawang merah yang cukup untuk memenuhi konsumsi nasional, tetapi masih terdapat aktivitas impor oleh pelaku perdagangan (walaupun dalam jumlah yang sangat kecil). Berbeda dengan pola penjualan produksi, pada pola perdagangan secara umum distributor memainkan peran yang cukup penting. Mendapat pasokan dari produsen dan juga sebagian impor secara langsung, pasokan bawang merah tersebut diperjualbelikan ke hampir seluruh fungsi kelembagaan bahkan hingga ke konsumen akhir. Sementara itu, beberapa pedagang besar lain juga memiliki pola demikian, dengan persentase terbanyak dijual ke pengecer. Di penghujung rantai distribusi, pedagang eceran menjual mayoritas stok bawang merahnya ke rumah tangga.



Gambar 100. Pola Distribusi Perdagangan Bawang Merah di Indonesia

Sementara, dari hasil survei didapatkan pula rata-rata MP untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB bawang merah dalam skala nasional yaitu sekitar Rp1,20 milyar. Sementara itu, rata-rata MP yang diperoleh lembaga usaha yang termasuk kategori PE dalam skala nasional adalah sekitar Rp77,73. Jika digabungkan, rata-rata MP yang didapattkanseluruh pelaku perdagangan bawang merah adalah sekitar Rp867,56 juta dengan rasio margin sebesar 20,15 persen. Indikatorini menggambarkanbahwa secara umum pedagang bawang merah mengambil keuntungan rata-rata sebesar 20,15 persen.

Tabel 37. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Bawang Merah Indonesia

Indikator	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB&PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	7.348.640,16	401.184,22	5.300.451,50
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	5.973.396,75	316.276,30	4.305.613,60
Rata-rata Biaya Transportasi (000 Rp)	237.979,89	13.592,32	186.735,67
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.375.243,40	84.907,92	994.837,89
Rasio MPP (%)	23,02	26,85	23,11
Rata-rata MP (000 Rp)	1.197.753,38	77.731,18	867.558,16
Rasio MP (%)	20,05	24,58	20,15

<http://www.bps.go.id>

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari survei Pola Distribusi (POLDIS) komoditas bawang merah tahun 2015, antara lain:

1. Ditinjau dari sisi produksi, hanya 3 dari 14 provinsi sampel produsen yang membeli sebagian bagian bakunya (bibit) dari luar provinsi. Pendistribusian hasil produksi pada umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah provinsi masing-masing, tercatat ada 4 provinsi yang mendistribusikan hasil produksinya ke luar provinsi. Dari sisi penjualan menurut fungsi lembaga, diketahui sebagian besar hasil produksi bawang merah dijual ke pedagang pengepul.
2. Dari sisi perdagangan, data survei menunjukkan bahwa 33 dari 34 provinsi membeli sebagian stok bawang merahnya dari luar provinsinya. Sementara itu, rantai pendistribusian komoditas ini dari produsen hingga ke tangan konsumen akhir membutuhkan 2 hingga 5 fungsi perdagangan. Mata rantai perdagangan terpanjang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah, sedangkan yang terpendek dialami oleh beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
3. Perolehan rata-rata margin perdagangan (MP) perdagangan dalam skala nasional secara keseluruhan adalah 20,15 persen. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan MP tertinggi, yang menembus angka 50,65 persen. Adapun rata-rata MP terendah terjadi pada Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perolehan MP terendah yaitu 5,87 persen.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



VPDP-15
PEDAGANG

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

 (disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT						
(1)	(2)					
1. Provinsi :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
2. Kabupaten/Kota*) :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
3. Kecamatan :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
4. Kelurahan/Desa*) :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :						
7. Alamat Perusahaan/Usaha :						
Kode pos :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
Nomor Telepon : (.....)	Ext:					
Nomor Fax : (.....)					
E-mail:	Website:					

*) coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan. c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan	Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Kewajiban	Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

<p>Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>

BLOK II: KETERANGAN UMUM			
(Jenis komoditas yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS)			
(1)		(2)	
1. Kegiatan utama perusahaan/usaha:		VPDP-15 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> *) diisi oleh pemeriksa	
2. Komoditas yang diteliti:		<input type="checkbox"/>	
Beras Premium	1	1	Bawang Merah
Beras Medium	2	4	Jagung Pipilan
Cabai Merah	3	3	Daging Ayam Ras
		4	
		5	
		6	
Rincian 3 s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditas pada Rincian 2.			
3. Fungsi perusahaan/usaha dalam lembaga usaha perdagangan:		<input type="checkbox"/>	
Distributor	1	Pedagang Pengepul	6
Sub distributor	2	Eksportir	7
Agen	3	Importir	8
Sub agen	4	Pedagang eceran	9
Pedagang grosir	5		

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2014:			
No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Persentase dari luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Impor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Importir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Produsen	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Sub distributor	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Agen	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Sub agen	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang grosir	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang pengepul	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Pedagang eceran	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Perorangan	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	
2. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2014:			
No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode*)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %
*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan			

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (LANJUTAN)

3. Penjualan barang dagangan selama tahun 2014:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan	Persentase	Persentase ke luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Ekspor tir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Sub agen	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang grosir	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang pengepul	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<i>Department Store</i>	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Supermarket/swalayan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Pedagang eceran	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Industri pengolahan	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Kegiatan usaha lainnya	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
n.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
o.	Rumah tangga	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

4. Wilayah penjualan barang dagangan selama tahun 2014:

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan

BLOK IV: KENDALA PENGADAAN DAN PEMASARAN BARANG DAGANGAN				
(1)			(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam pengadaan barang dagangan selama tahun 2014? <input type="checkbox"/>				
Ya	1	Tidak	2	→ ke rincian 2
b. Jika "Ya", jenis kendala: <input type="checkbox"/>				
Kelangkaan barang	1	Modal	16	
Fluktuasi Harga	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama <input type="checkbox"/>				
2. a. Apakah ada kendala dalam pemasaran barang dagangan selama tahun 2014? <input type="checkbox"/>				
Ya	1	Tidak	2	→ ke Blok V
b. Jika "Ya", jenis kendala: <input type="checkbox"/>				
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16	
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama <input type="checkbox"/>				

BLOK V: PEMBELIAN DAN PENJUALAN				
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan selama tahun 2014:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2013)
b. Pembelian
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain
d. Hilang/rusak
e. Penjualan
f. Stok Akhir (sisa 2014)

**Satuan yang digunakan: kilogram, kwintal, ton*

2. Berapa persen nilai penjualan pada Blok V Rincian 1e terhadap seluruh penjualan usaha perdagangan selama tahun 2014? <input type="checkbox"/>				
3. a. Apakah ada biaya transportasi dalam pembelian dan/atau penjualan barang dagangan selama tahun 2014? <input type="checkbox"/>				
Ya	1	Tidak	2	
b. Jika "Ya", berapa nilainya? Rp.				

BLOK VI: CATATAN

BLOK VII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan

Lampiran 2: Daftar VPDP15-PRODUSEN



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS**

**VPDP-15
PRODUSEN**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

 (disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT					
(1)	(2)				
1. Provinsi :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
2. Kabupaten/Kota*) :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
3. Kecamatan :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
4. Kelurahan/Desa*) :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>				
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :					
7. Alamat Perusahaan/Usaha :					
Kode pos : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
Nomor Telepon : (.....) Ext: Nomor Fax. : (.....)					
E-mail: Website:					

*) coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi. b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan. c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

<p>Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>

BLOK II: KETERANGAN KOMODITAS

(Jenis komoditas harus ditentukan oleh petugas BPS)

(1)				(2)	
1. Komoditas yang diteliti:				<input type="text"/>	
Beras Premium	1	Bawang Merah	4		
Beras Medium	2	Jagung Pipilan	5		
Cabai Merah	3	Daging Ayam Ras	6		

Pertanyaan pada Blok III sampai dengan Blok VI berkaitan dengan jenis komoditas yang diteliti pada Blok II Rincian 1 di atas

BLOK III: Bahan Baku

1. Pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2014:

No.	Asal pengadaan bahan baku utama	Persentase	Persentase dari luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Impor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Importir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Produsen lain	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang grosir	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang pengepul	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Produksi sendiri	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Petani/Peternak	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

2. Wilayah pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2014:

No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

BLOK IV: PENJUALAN PRODUKSI

1. Penjualan barang produksi selama tahun 2014:

No.	Tujuan penjualan barang produksi	Persentase	Persentase ke luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Eksporir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Agen	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Pedagang grosir	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang pengepul	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Department Store	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Supermarket/swalayan	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Industri pengolahan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Kegiatan usaha lainnya	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Rumah tangga	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

2. Wilayah penjualan barang produksi selama tahun 2014:

No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

BLOK V: KENDALA PERUSAHAAN/USAHA			
(1)		(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam proses produksi selama tahun 2014?		<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2 → ke Rincian 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:		<input type="text"/>	
Kesulitan modal	1	Bencana alam	16
Tenaga kerja trampil	2	Transportasi	32
Birokrasi administrasi	4	Lainnya	64
Bahan baku/bibit	8	(tuliskan	
c. Kendala utama proses produksi		<input type="text"/>	
2. a. Apakah ada kendala dalam penjualan barang produksi selama tahun 2014?		<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2 → ke Blok VI
b. Jika "Ya", jenis kendala:		<input type="text"/>	
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16
Rantai distribusi	2	Lainnya	32
Transportasi	4	(tuliskan	
Sarana dan prasarana produksi	8		
c. Kendala utama penjualan		<input type="text"/>	


BLOK VI: NERACA PRODUKSI				
1. Produksi selama tahun 2014:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2013)
b. Produksi
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain		
d. Hilang/rusak		
e. Penjualan
f. Stok Akhir (sisa 2014)
<i>Satuan yang digunakan: Kilogram, Kwintal, Ton</i>				


BLOK VII: CATATAN

BLOK VIII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan

Lampiran 3: Surat Tanda Terima Perusahaan

	UNTUK PERUSAHAAN
BADAN PUSAT STATISTIK	
KABUPATEN/KOTA :	
SURAT TANDA TERIMA	
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2015 (VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP15-PEDAGANG/VPDP15-PRODUSEN yang ditujukan kepada:	
1. Nama Perusahaan :	_____
2. Alamat :	_____
Telepon :	_____
HP :	_____
Pesawat :	_____
3. Kegiatan Usaha :	_____
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :	_____ , _____ 2015
Identitas Petugas VPDP15	
Nama :	_____
NIP :	_____
Yang Menerima,	
Nama :	_____
Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :	
BPS Kabupaten/Kota : _____ , Telepon : _____	
atau No. HP Petugas VPDP15 : _____	

	UNTUK PETUGAS
BADAN PUSAT STATISTIK	
KABUPATEN/KOTA :	
SURAT TANDA TERIMA	
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2015 (VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP15-PEDAGANG/VPDP15-PRODUSEN yang ditujukan kepada:	
1. Nama Perusahaan :	_____
2. Alamat :	_____
Telepon :	_____
HP :	_____
Pesawat :	_____
3. Kegiatan Usaha :	_____
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :	_____ , _____ 2015
Identitas Petugas VPDP15	
Nama :	_____
NIP :	_____
Yang Menerima,	
Nama :	_____
Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :	
BPS Kabupaten/Kota : _____ , Telepon : _____	
atau No. HP Petugas VPDP15 : _____	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710 Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 – 4 Fax: 021-3857048

E-mail: bpshq@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-979-064-745-9



9 789790 647459